



Kementerian Sekretariat Negara  
Republik Indonesia

**BA 007**

# LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA **TA 2023 *AUDITED***



JI Veteran 17-18 Jakarta, 10110

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Sekretariat Negara adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi serta kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Sekretariat Negara. Disamping itu, Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Mei 2024  
Menteri Sekretaris Negara,





MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara Bagian Anggaran 007 Tahun Anggaran 2023 *Audited* yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Mei 2024  
Menteri Sekretaris Negara,





**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA (007)  
TAHUN ANGGARAN 2023 (AUDITED)**

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara (007) untuk Tahun Anggaran 2023 (*Audited*) berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Kementerian Sekretariat Negara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Jakarta, Mei 2024



## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Pernyataan Tanggung Jawab	ii
Pernyataan Telah Direviu	
Daftar Isi	iv
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
A.1. Kebijakan Teknis Kementerian Sekretariat Negara	8
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	11
A.3. Basis Akuntansi	11
A.4. Dasar Pengukuran	12
A.5. Kebijakan Akuntansi	12
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	20
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	22
B.2. Belanja Negara	27
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	38
C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran	38
C.2. Kas Lainnya dan Setara Kas	39
C.3. Kas pada Badan Layanan Umum	41
C.4. Belanja Dibayar di Muka ( <i>Prepaid</i> )	43
C.5. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	47
C.6. Piutang Bukan Pajak	47
C.7. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Gantian Rugi	49
C.8. Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	50
C.9. Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	52
C.10. Persediaan	52
C.11. Tanah	55
C.12. Peralatan dan Mesin	56
C.13. Gedung dan Bangunan	60
C.14. Jalan, Irigasi, dan Jaringan	63
C.15. Aset Tetap Lainnya	65
C.16. Konstruksi Dalam Pengerjaan	69
C.17. Akumulasi Penyusutan	71

C.18.	Properti Investasi	72
C.19.	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	73
C.20.	Piutang Jangka Panjang Lainnya	74
C.21.	Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	74
C.22.	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	74
C.23.	Aset Tak Berwujud	76
C.24.	Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	78
C.25.	Aset Lain-lain	78
C.26.	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	82
C.27.	Utang kepada Pihak Ketiga	83
C.28.	Pendapatan Diterima Di Muka	85
C.29.	Uang Muka dari KPPN	86
C.30.	Utang Jangka Pendek Lainnya	86
C.31.	Ekuitas	87
D.	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	88
D.1.	Pendapatan Negara Bukan Pajak	88
D.2.	Beban Pegawai	89
D.3.	Beban Persediaan	89
D.4.	Beban Barang dan Jasa	90
D.5.	Beban Pemeliharaan	91
D.6.	Beban Perjalanan Dinas	92
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	93
D.8.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	94
D.9.	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	95
D.10.	Surplus/ Defisit Kegiatan Operasional	95
D.11.	Surplus/ Defisit dari Pelepasan Aset Non Lancar	96
D.12.	Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	97
D.13.	Surplus/ Defisit Kegiatan Non Operasional	98
D.14.	Surplus/ Defisit LO	98
E.	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	99
E.1.	Ekuitas Awal	99
E.2.	Surplus/Defisit-LO	99
E.3.	Koreksi Nilai Persediaan	99
E.4.	Koreksi Atas Reklasifikasi	99
E.5.	Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	100
E.6.	Koreksi Lain-Lain	100

**Lampiran**

- Laporan Realisasi Anggaran
- Neraca
- Laporan Operasional
- Laporan Perubahan Ekuitas
- Laporan Barang Milik Negara
- Laporan Keuangan PPK Gelora Bung Karno
- Laporan Keuangan PPK Kemayoran
- Lampiran Lain-Lain

## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara BA 007 Tahun 2023 *Audited* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara (neto) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp605.327.230.779,00 atau mencapai 114,21 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp530.002.867.000,00.

Realisasi Belanja Negara (neto) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.490.447.063.630,00 atau mencapai 97,31 persen dari alokasi anggaran setelah revisi sebesar Rp4.614.692.296.000,00.

### 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada 31 Desember 2023.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp633.678.549.730.941,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp3.030.455.386.392,00, Aset Tetap (neto) sebesar Rp596.200.026.938.471,00, Properti Investasi (neto) sebesar Rp729.032.513.611,00, Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp109.907.907,00 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp33.718.924.984.560,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp559.219.297.394,00 dan Rp633.119.330.433.547,00.

### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp689.211.029.838,00, sedangkan

jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp5.441.765.057.741,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp4.752.554.027.903,00. Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp893.959.451,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp4.751.660.068.452,00.

#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp631.909.007.145.694,00 dikurang Defisit-LO sebesar Rp4.751.660.068.452,00 ditambah dengan koreksi yang mengurangi ekuitas sebesar Rp152.879.083.373,00 dan transaksi antar entitas sebesar Rp6.114.862.439.678,00, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp633.119.330.433.547,00.

#### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

Uraian	CaLK *	2023		% Realisasi	2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
<b>A. Pendapatan Negara dan Hibah</b>	<b>B.1.</b>	<b>530.002.867.000,00</b>	<b>605.327.230.779,00</b>	<b>114,21</b>	<b>446.475.364.054,00</b>
<b>I. Pendapatan Perpajakan</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
1. Pajak Dalam Negeri		0,00	0,00	-	0,00
2. Pajak Perdagangan Internasional		0,00	0,00	-	0,00
<b>II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak</b>		<b>530.002.867.000,00</b>	<b>605.327.230.779,00</b>	<b>114,21</b>	<b>446.475.364.054,00</b>
1. Pendapatan Sumber Daya Alam		0,00	0,00	-	0,00
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan		0,00	0,00	-	0,00
3. Pendapatan BLU		443.602.358.000,00	501.980.717.894,00		366.639.030.439,00
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya		86.400.509.000,00	103.346.512.885,00		79.836.333.615,00
<b>III. Pendapatan Hibah</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)</b>		<b>530.002.867.000,00</b>	<b>605.327.230.779,00</b>	<b>114,21</b>	<b>446.475.364.054,00</b>
<b>Belanja Negara</b>	<b>B.2.</b>	<b>4.614.692.296.000,00</b>	<b>4.490.447.063.630,00</b>	<b>97,31</b>	<b>3.419.288.110.136,00</b>
1. Belanja Pegawai	B.2.1	513.517.639.000,00	505.957.141.653,00		442.614.533.921,00
2. Belanja Barang	B.2.2	3.670.177.431.000,00	3.562.999.537.857,00		2.810.055.525.774,00
3. Belanja Modal	B.2.3	430.997.226.000,00	421.490.384.120,00		166.618.050.441,00

Keterangan:

- \* Lihat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

Jakarta, Mei 2024

Menteri Sekretaris Negara,



## II. NERACA

### KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER TA 2023 DAN 2022

Uraian	CaLK*	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	27.282.699.334,00	36.343.556.425,00
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	95.890.521.718,00	59.209.627.571,00
Kas pada Badan Layanan Umum	C.3	854.705.264.574,00	804.951.616.067,00
Belanja Dibayar Dimuka ( <i>prepaid</i> )	C.4	13.316.747.520,00	32.651.027.285,00
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.5	1.637.555.256,00	609.902.097,00
Piutang Bukan Pajak	C.6	1.769.261.770,00	4.800.393.304,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak		(8.966.308,00)	(23.983.737,00)
Piutang Bukan Pajak (Neto)		1.760.295.462,00	4.776.409.567,00
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.7	24.000.000,00	24.000.000,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi		0,00	(120.000,00)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)		24.000.000,00	23.880.000,00
Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	C.8	1.063.525.938.532,00	1.171.387.187.151,00
Penyisihan Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum		(102.295.347.715,00)	(94.431.633.663,00)
Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (Neto)		961.230.590.817,00	1.076.955.553.488,00
Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	C.9	563.190.095,00	563.190.095,00
Penyisihan Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum		(563.190.095,00)	(563.190.095,00)
Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum (Neto)		0,00	0,00
Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya	C.10	0,00	0,00
Persediaan	C.11	1.074.607.711.711,00	1.074.688.059.576,00
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>3.030.455.386.392,00</b>	<b>3.090.209.632.076,00</b>
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.12	586.178.916.553.093,00	585.216.320.466.093,00
Peralatan dan Mesin	C.13	4.620.753.299.191,00	4.312.341.973.278,00
Gedung dan Bangunan	C.14	6.587.560.322.969,00	6.529.159.343.839,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.15	997.161.395.979,00	897.641.015.005,00
Aset Tetap Lainnya	C.16	3.214.802.904.770,00	3.214.951.526.176,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.17	12.305.312.233,00	6.422.903.773,00
Akumulasi Penyusutan	C.18	(5.411.472.849.764,00)	(4.873.823.372.575,00)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>596.200.026.938.471,00</b>	<b>595.303.013.855.589,00</b>
<b>PROPERTI INVESTASI</b>			
Properti Investasi	C.19	851.414.794.095,00	627.629.693.908,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	C.20	(122.382.280.484,00)	(90.355.363.595,00)
<b>Jumlah Properti Investasi</b>		<b>729.032.513.611,00</b>	<b>537.274.330.313,00</b>

Uraian	CaLK*	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>			
Piutang Jangka Panjang lainnya	C.21	110.460.209,00	88.002.500,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang lainnya	C.22	(552.302,00)	(440.013,00)
Piutang Jangka Panjang lainnya (netto)		109.907.907,00	87.562.487,00
<b>Jumlah Piutang Jangka Panjang</b>		<b>109.907.907,00</b>	<b>87.562.487,00</b>
<b>ASET LAINNYA</b>			
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	C.23	34.066.396.817.257,00	33.421.880.206.000,00
Aset Tak Berwujud	C.24	49.299.294.386,00	69.299.317.395,00
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.25	237.719.668.619,00	0,00
Aset Lain-lain	C.26	245.942.616.845,00	212.500.937.932,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.27	(880.446.612.547,00)	(435.902.892.650,00)
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>33.718.911.784.560,00</b>	<b>33.267.777.568.677,00</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>633.678.549.730.941,00</b>	<b>632.198.362.949.142,00</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.28	475.719.479.662,00	190.560.147.685,00
Pendapatan Diterima Dimuka	C.29	49.953.077.531,00	57.603.599.189,00
Uang Muka dari KPPN	C.30	27.282.699.334,00	36.343.556.425,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.31	6.264.040.867,00	4.848.500.149,00
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>559.219.297.394,00</b>	<b>289.355.803.448,00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>559.219.297.394,00</b>	<b>289.355.803.448,00</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.32	633.119.330.433.547,00	631.909.007.145.694,00
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>633.119.330.433.547,00</b>	<b>631.909.007.145.694,00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>633.678.549.730.941,00</b>	<b>632.198.362.949.142,00</b>

Keterangan:

- \* Lihat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

Jakarta, Mei 2024  
Menteri Sekretaris Negara,

*Pratikno*  
Pratikno



### III. LAPORAN OPERASIONAL

#### KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER TA 2023 DAN 2022

Uraian	CaLK	31 DESEMBER TA 2023	31 DESEMBER TA 2022
		Rp	Rp
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN OPERASIONAL</b>			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	689.211.029.838,00	417.441.861.324,00
<b>Jumlah Pendapatan Operasional</b>		<b>689.211.029.838,00</b>	<b>417.441.861.324,00</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>			
Beban Pegawai	D.2	630.794.182.021,00	544.288.053.382,00
Beban Persediaan	D.3	40.296.404.505,00	41.719.864.756,00
Beban Barang dan Jasa	D.4	2.304.469.220.267,00	1.514.375.107.372,00
Beban Pemeliharaan	D.5	536.241.823.114,00	468.037.801.385,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	813.215.044.026,00	592.184.179.683,00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7	43.668.655.081,00	19.207.375.889,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	1.065.207.166.066,00	675.511.785.439,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9	7.872.562.661,00	290.614.585,00
<b>Jumlah Beban Operasional</b>		<b>5.441.765.057.741,00</b>	<b>3.855.614.782.491,00</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>D.10</b>	<b>(4.752.554.027.903,00)</b>	<b>(3.438.172.921.167,00)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
<b>Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar</b>	<b>D.11</b>	<b>(451.893.528,00)</b>	<b>8.221.484.076,00</b>
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		2.033.509.286,00	8.795.124.384,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		2.485.402.814,00	573.640.308,00
<b>Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>	<b>D.12</b>	<b>1.345.852.979,00</b>	<b>3.175.999.019,00</b>
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		1.547.563.501,00	4.645.670.385,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		201.710.522,00	1.469.671.366,00
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>D.13</b>	<b>893.959.451,00</b>	<b>11.397.483.095,00</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>(4.751.660.068.452,00)</b>	<b>(3.426.775.438.072,00)</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>	<b>D.14</b>	<b>(4.751.660.068.452,00)</b>	<b>(3.426.775.438.072,00)</b>

Keterangan:

- \* Lihat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

Jakarta, Mei 2024  
Menteri Sekretaris Negara,



Pratikno

## IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER TA 2023 DAN 2022

Uraian	CaLK	31 DESEMBER TA 2023 Rp	31 DESEMBER TA 2022 Rp
<b>EKUITAS AWAL</b>	<b>E.1</b>	<b>631.909.007.145.694,00</b>	<b>637.788.515.002.811,00</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>	<b>E.2</b>	<b>(4.751.660.068.452,00)</b>	<b>(3.426.775.438.072,00)</b>
<b>KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS</b>		<b>(152.879.083.373,00)</b>	<b>(5.672.217.113.621,00)</b>
PENYESUAIAN NILAI ASET		0,00	0,00
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3	0,00	525.380.900,00
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.4	791.751.913,00	20.318.606,00
SELISIH REVALUASI ASET		0,00	0,00
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.5	(154.327.119.146,00)	(5.667.533.023.606,00)
KOREKSI LAIN-LAIN	E.6	656.283.860,00	(5.229.789.521,00)
<b>TRANSAKSI ANTAR ENTITAS</b>	<b>E.7</b>	<b>6.114.862.439.678,00</b>	<b>3.219.484.694.576,00</b>
<b>KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS</b>		<b>1.210.323.287.853,00</b>	<b>(5.879.507.857.117,00)</b>
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>E.8</b>	<b>633.119.330.433.547,00</b>	<b>631.909.007.145.694,00</b>

Keterangan:

- \* Lihat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

Jakarta, Mei 2024  
Menteri Sekretaris Negara,

  
**Pratiko**



## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Penjelasan  
Umum

Kebijakan Teknis

Rencana  
Strategis  
Kementerian  
Sekretariat  
Negara

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. KEBIJAKAN TEKNIS KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

##### A.1.1. RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

Dalam mewujudkan visi Presiden 2020-2024 sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” dan mempedomani potensi yang dimiliki serta sejumlah permasalahan dan tantangan di kurun waktu 2020-2024, maka Kementerian Sekretariat Negara menetapkan penyesuaian visi kelembagaan dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya.

Dalam rangka mendukung tercapainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan kesuksesan pemerintahan yang sedang berjalan, Kementerian Sekretariat Negara menetapkan visi sebagai berikut: **“Kementerian Sekretariat Negara yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam memberikan pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”**.

Dalam rangka mewujudkan visi Kementerian Sekretariat Negara tersebut, ditetapkan misi Kementerian Sekretariat Negara sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif, kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara.
2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi pelayanan kerumahtanggaan, keprotokolan, pers, dan media serta koordinasi pengamanan yang optimal kepada Presiden dan Wakil Presiden.
3. Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih serta peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di Kementerian Sekretariat Negara.

Kementerian Sekretariat Negara, sebagai kantor Presiden (dan Wakil Presiden) RI, berperan dalam posisi sentral yang mensupervisi seluruh pelaksanaan kegiatan pembangunan serta memastikan tahapan pencapaiannya oleh segenap Kementerian dan Lembaga, termasuk isu gender dalam isu-isu prioritas K/L.

Secara teknis, dalam menjalankan fungsi kesekretariatan negara, peran strategis Kementerian Sekretariat Negara dimaksud dapat dilihat dari beberapa

kondisi berikut: (1) Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kementerian Sekretariat Negara memberikan dukungan teknis, administrasi, dan analisis kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan seluruh tugas pemerintahan negara, mulai dari supervisi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan pelaksanaan hingga evaluasi hasil-hasil pelaksanaan program prioritas nasional; (2) Kementerian Sekretariat Negara menjadi filter terakhir dalam perumusan dan penetapan seluruh kebijakan nasional sebelum ditetapkan oleh Presiden; dan (3) Kementerian Sekretariat Negara juga ikut melaksanakan fungsi fasilitasi *debottlenecking* terhadap program-program pembangunan yang mengalami hambatan dalam pelaksanaannya.

Selain berperan sentral dalam memastikan suksesnya seluruh agenda pembangunan nasional, termasuk yang telah ditetapkan sebagai prioritas pembangunan, Kementerian Sekretariat Negara juga bertanggungjawab secara spesifik atas ketercapaian agenda pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024, yakni pada agenda pembangunan ke-2, yaitu “Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan” dan agenda pembangunan ke-7 “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam, dan Transformasi Pelayanan Publik”, yang penjabarannya adalah sebagai berikut.

1. Agenda Pembangunan “Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan”.
2. Agenda Pembangunan “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Tranformasi Pelayanan Publik.

Seiring dengan arah kebijakan dan strategi bersifat nasional yang telah diuraikan diatas, Kementerian Sekretariat Negara menetapkan langkah-langkah pelaksanaan berupa program indikatif. Program indikatif dirancang untuk memberikan dampak besar bagi pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Sekretariat Negara yang telah ditetapkan.

Sebagai langkah awal penyusunan program dimaksud, Kementerian Sekretariat Negara menetapkan arah kebijakan meliputi:

1. Pengembangan cara kerja yang adaptif, inovatif, dan bersinergi dengan pemangku kepentingan terkait, baik internal maupun eksternal organisasi, melalui tata kelola berbasis manajemen resiko yang didukung teknologi mutakhir.
2. Penguatan kelembagaan dan penyempurnaan bisnis proses dengan dukungan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi secara lebih komprehensif dan terintegrasi.
3. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian Sekretariat Negara, melalui:

- a. Pelaksanaan reformasi birokrasi yang menyeluruh dan berkesinambungan.
- b. Penerapan sistem merit dalam pelaksanaan manajemen SDM secara terpadu.
- c. Penataan kelembagaan yang dilakukan melalui: pemetaan kembali tugas fungsi sesuai mandat perundang-undangan dan sinkronisasi tugas, fungsi, dan pemisahan kewenangan yang makin jelas antara unit-unit organisasi di lingkungan Kantor Kepresidenan.
- d. Perluasan penerapan *e-government* dengan mengedepankan prinsip-prinsip kerja sama, keterbukaan, komunikasi, dan berbagi.

Arah kebijakan tersebut di atas selanjutnya dijabarkan melalui serangkaian program dan kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing satuan organisasi dan unit kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Program tersebut merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Sekretariat Negara untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

Setelah melalui kajian mendalam dengan mempertimbangkan potensi dan tantangan yang dihadapi, serta hasil perumusan restrukturisasi program bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan, maka untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, Kementerian Sekretariat Negara pada tahun 2020-2024 melaksanakan 2 (dua) program, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen.
2. Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden.

Unit Akuntansi  
Kementerian  
Sekretariat  
Negara

#### **A.1.2. UNIT AKUNTANSI KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA**

Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) Kementerian Sekretariat Negara (Bagian Anggaran 007) pada Tahun Anggaran (TA) 2023 terdiri dari 4 (empat) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1 (UAPPA-E1), 3 (tiga) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W), dan 13 (tiga belas) Satuan Kerja (satker) yang merupakan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dengan rincian sebagai berikut:

1. UAPPA-E1, terdiri dari:
  - a) UAPPA-E1 Sekretariat Negara (007.01).
  - b) UAPPA-E1 Pasukan Pengamanan Presiden (007.06).
  - c) UAPPA-E1 Dewan Pertimbangan Presiden (007.07).
  - d) UAPPA-E1 Kantor Staf Presiden (007.10).
2. UAPPA-W terdiri dari:
  - a) UAPPA-W Provinsi Jawa Barat (0200).
  - b) UAPPA-W Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (0400).
  - c) UAPPA-W Provinsi Bali (2200).

3. UAKPA terdiri dari:
  - a) Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara (403013).
  - b) Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (499672).
  - c) Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (499681).
  - d) Istana Kepresidenan Jakarta (403993).
  - e) Istana Kepresidenan Bogor (403994).
  - f) Istana Kepresidenan Cipanas (403997).
  - g) Istana Kepresidenan Yogyakarta (403995).
  - h) Istana Kepresidenan Tampaksiring Bali (403996).
  - i) Sekretariat Wakil Presiden (403998).
  - j) Sekretariat Militer Presiden (403999).
  - k) Pasukan Pengamanan Presiden (403171).
  - l) Dewan Pertimbangan Presiden (500562).
  - m) Kantor Staf Presiden (400847).

Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan

## A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan TA 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian Sekretariat Negara. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Pada aplikasi SAKTI, sistem sudah terintegrasi antar modul mulai dari dengan adanya jurnal di beberapa titik pengakuan jurnal secara manual. Modul-modul dalam aplikasi SAKTI terdiri dari modul penganggaran, modul pelaksanaan anggaran (komitmen, bendahara, dan pembayaran), dan modul pelaporan (aset tetap, persediaan, serta *general ledger* dan pelaporan).

Basis Akuntansi

## A.3. BASIS AKUNTANSI

Kementerian Sekretariat Negara menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang

telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar  
Pengukuran*

#### **A.4. DASAR PENGUKURAN**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian Sekretariat Negara dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan  
Akuntansi*

#### **A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan TA 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Sekretariat Negara. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-LRA*

##### **(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-LO*

**(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kementerian Sekretariat Negara adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

**(3) Belanja**

*Belanja*

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Negara (KUN).
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**(4) Beban**

*Beban*

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**(5) Aset**

*Aset*

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

**a. Aset Lancar**

*Aset Lancar*

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
  - Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Perhitungan penyisihan piutang adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan (%)
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian.
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

#### Aset Tetap

##### b. Aset Tetap

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan  
Aset Tetap*

**c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - Tanah.
  - Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).
  - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

#### Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat (Tahun)
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4

#### Properti Investasi

#### d. Properti Investasi

- Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
  - digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif atau
  - dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Pengakuan properti investasi adalah saat:
  - Barang Milik Negara (BMN) berupa properti diakui sebagai properti investasi apabila BMN properti untuk digunakan menghasilkan pendapatan sewa atau untuk dimaksudkan meningkatkan nilai aset atau keduanya.
  - BMN properti yang tidak digunakan diakui sebagai properti investasi pada saat diterbitkannya Surat Permintaan klarifikasi Tertulis oleh pengelola barang yaitu pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.

#### Piutang Jangka Panjang

#### e. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Penyisihan  
Piutang Tidak  
Tertagih*

**f. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan atas PMK Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

**Penggolongan Kualitas Piutang**

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan (%)
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

*Aset Lainnya*

**g. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

#### Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	

- Aset kemitraan adalah aset kerjasama yang timbul dari perjanjian antara pemerintah dengan mitra (badan usaha, pihak ketiga atau investor) yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/ atau hak usaha yang dimiliki.
- Bangun, Kelola, Serah - BKS (*Build, Operate, Transfer - BOT*), adalah pola kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah oleh mitra (badan usaha, pihak ketiga atau investor), dengan cara pihak mitra tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkan kembali aset pemerintah beserta bangunan dan/ atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).
- Bangun, Serah, Kelola - BSK (*Build, Transfer, Operate - BTO*) adalah pola kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah oleh mitra (badan usaha, pihak ketiga atau investor), dengan cara pihak mitra tersebut mendirikan bangunan dan/ atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan asset yang dibangun tersebut kepada pemerintah untuk dikelola oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati (masa konsesi).
- Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.
- Aset kemitraan diakui pada saat telah terdapat BAST kerjasama

pemanfaatan atau dokumen yang dipersamakan.

- Aset Kemitraan diukur sebesar nilai bersih yang tercatat atau nilai wajar pada saat telah terdapat BAST atau dokumen yang dipersamakan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

#### *Kewajiban*

### **(6) Kewajiban**

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

#### *Ekuitas*

### **(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

**B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Selama periode berjalan, Kementerian Sekretariat Negara telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Setelah Revisi (Rp)
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan PNB	436.999.024.000,00	530.002.867.000,00
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>436.999.024.000,00</b>	<b>530.002.867.000,00</b>
<b>Belanja</b>		
Belanja Pegawai	481.090.565.000,00	513.517.639.000,00
Belanja Barang	1.867.492.522.000,00	3.670.177.431.000,00
Belanja Modal	261.166.694.000,00	430.997.226.000,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.609.749.781.000,00</b>	<b>4.614.692.296.000,00</b>

Dilihat dari program maka perubahannya adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Setelah Revisi (Rp)
Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden	1.283.457.160.000,00	3.146.815.467.000,00
Program Dukungan Manajemen	1.326.292.621.000,00	1.467.876.829.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.609.749.781.000,00</b>	<b>4.614.692.296.000,00</b>

Sedangkan apabila dilihat berdasarkan Satuan Kerja, maka perubahannya adalah sebagai berikut:

Satker	Anggaran Semula (Rp)	Anggaran Setelah Revisi (Rp)
Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara	1.189.812.381.000,00	2.281.691.285.000,00
Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno	185.091.791.000,00	263.659.910.000,00
Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran	181.083.071.000,00	221.896.131.000,00
Istana Kepresidenan Jakarta	369.951.314.000,00	599.614.301.000,00
Istana Kepresidenan Bogor	44.855.741.000,00	49.816.737.000,00
Istana Kepresidenan Cipanas	16.142.115.000,00	16.564.133.000,00
Istana Kepresidenan Yogyakarta	17.530.806.000,00	24.031.576.000,00
Istana Kepresidenan Tampaksiring Bali	15.300.949.000,00	16.160.453.000,00
Sekretariat Wakil Presiden	190.616.905.000,00	368.896.520.000,00
Sekretariat Militer Presiden	49.234.593.000,00	47.647.766.000,00
Pasukan Pengamanan Presiden	192.978.007.000,00	571.860.982.000,00
Dewan Pertimbangan Presiden	35.373.524.000,00	32.148.490.000,00
Kantor Staf Presiden	121.778.584.000,00	120.704.012.000,00
<b>Jumlah Anggaran Belanja</b>	<b>2.609.749.781.000,00</b>	<b>4.614.692.296.000,00</b>

Revisi jumlah pagu anggaran Kementerian Sekretariat Negara antara lain dijelaskan sebagai berikut:

1. Penambahan anggaran untuk pembayaran tunggakan kegiatan persiapan dan penyelenggaraan penerimaan Kepala Negara/Pemerintahan/Pimpinan Organisasi Internasional pada penyelenggaraan KTT G20 Tahun 2022.
2. Penambahan anggaran untuk penyediaan rumah kediaman bagi Mantan Wakil Presiden Periode 2019-2024 Tahun Anggaran 2023.
3. Penambahan anggaran untuk persiapan dan penyelenggaraan penerimaan Kepala Negara/Pemerintahan/Pimpinan Organisasi Internasional pada penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42 dan 43 Tahun 2023.
4. Penambahan anggaran untuk kegiatan perjalanan dinas Dokter Kepresidenan dalam rangka kunjungan dalam negeri dan luar negeri Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2023.
5. Penambahan anggaran dengan menggunakan saldo awal kas pada Satker PPKK, yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ataupun mitra lain.

Pendapatan  
Negara dan  
Hibah  
Rp605.327.230.77  
9,00

### B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Pendapatan Kementerian Sekretariat Negara hanya berasal dari PNBP lainnya dan PNBP Badan Layanan Umum. Kementerian Sekretariat Negara bukan merupakan instansi yang secara fungsional mempunyai peranan untuk menghasilkan penerimaan negara. Besarnya realisasi PNBP Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

#### Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2023

Uraian	Estimasi (Rp)	Realisasi Neto (Rp)	% Realisasi
<b>Penerimaan Negara Bukan Pajak</b>	<b>530.002.867.000,00</b>	<b>605.327.230.779,00</b>	<b>114,21</b>
Pendapatan BLU	443.602.358.000,00	501.980.717.894,00	113,16
Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	86.400.509.000,00	103.346.512.885,00	119,61

Realisasi pendapatan negara dan hibah Kementerian Sekretariat Negara hanya berupa pendapatan PNBP sebesar Rp605.327.230.779,00 atau 114,21 persen dari estimasi pendapatan sebesar Rp530.002.867.000,00. Tidak terdapat realisasi pengembalian pendapatan negara dan hibah pada TA 2023, sehingga realisasi pendapatan neto sama dengan realisasi pendapatan bruto. Estimasi dan realisasi pendapatan dan hibah Kementerian Sekretariat Negara TA 2023 adalah sebagai berikut:

#### Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Neto TA 2023

Uraian	Estimasi (Rp)	Realisasi	
		Rp	%
<b>Pendapatan BLU</b>	<b>443.602.358.000,00</b>	<b>501.980.717.894,00</b>	<b>113,16</b>
Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	47.994.264.000,00	40.816.339.638,00	85,04
Pendapatan Pengelolaan Kawasan Lainnya	318.936.167.000,00	401.570.289.530,00	125,91
Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	15.292.669.000,00	7.495.028.960,00	49,01
Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	37.087.830.000,00	23.997.531.898,00	64,70
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	24.291.428.000,00	27.577.747.843,00	113,53
Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	257.839.810,00	N/A
Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	52.099.561,00	N/A
Pendapatan Lain-lain BLU	0,00	213.840.654,00	N/A

<b>Penerimaan Bukan Pajak Lainnya</b>	<b>86.400.509.000,00</b>	<b>103.346.512.885,00</b>	<b>119,61</b>
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	1.496.626.788,00	N/A
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	335.000.000,00	536.882.498,00	160,26
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	958.082.000,00	969.229.521,00	101,16
Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan	733.413.000,00	733.413.472,00	100,00
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	47.520.000,00	512.900.000,00	1.079,34
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	987.300.000,00	693.583.000,00	70,25
Pendapatan Jasa Lainnya	83.339.194.000,00	91.908.777.164,00	110,28
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	0,00	575.000.000,00	N/A
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak	0,00	24.000.000,00	N/A
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	1.987.966.488,00	N/A
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	652.053.859,00	N/A
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	3.203.204.011,00	N/A
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	18.244.524,00	N/A
Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0,00	34.631.550,00	N/A
Pendapatan Anggaran Lainnya	0,00	10,00	N/A
<b>Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak</b>	<b>616.403.376.000,00</b>	<b>605.327.230.779,00</b>	<b>98,20</b>

Realisasi Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp605.327.230.779,00 terdiri dari Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp501.980.717.894,00 dan Penerimaan Bukan Pajak Lainnya sebesar Rp103.346.512.885,00. Dibandingkan dengan realisasi PNBP pada 31 Desember 2022 sebesar Rp446.475.364.054,00, realisasi PNBP Kementerian Sekretariat Negara periode 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp158.851.866.725,00 atau 35,58 persen.

### B.1.1 Pendapatan BLU

*Pendapatan BLU  
Rp501.980.717.894,00*

Pendapatan BLU yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp501.980.717.894,00 jika dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp366.639.030.439,00, mengalami kenaikan sebesar Rp135.341.687.455,00 atau 36,91 persen. Kenaikan Pendapatan BLU antara lain yang signifikan berasal dari pendapatan pengelolaan kawasan lainnya dan pendapatan jasa layanan perbankan BLU.

Perbandingan realisasi Pendapatan BLU Kementerian Sekretariat Negara periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan realisasi Pendapatan BLU Kementerian Sekretariat Negara periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

**Perbandingan Realisasi Pendapatan BLU  
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2023 dan 2022**

Uraian	Realisasi		Kenaikan/(Penurunan)	
	2023	2022	Rp	%
<b>Pendapatan BLU</b>	<b>501.980.717.894,00</b>	<b>366.639.030.439,00</b>	<b>135.341.687.455,00</b>	<b>36,91</b>
Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	40.816.339.638,00	45.301.512.034,00	(4.485.172.396,00)	(9,90)
Pendapatan Pengelolaan Kawasan Lainnya	401.570.289.530,00	261.351.341.756,00	140.218.947.774,00	53,65
Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	7.495.028.960,00	9.097.940.541,00	(1.602.911.581,00)	(17,62)
Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	23.997.531.898,00	32.787.576.950,00	(8.790.045.052,00)	(26,81)
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	27.577.747.843,00	18.100.659.158,00	9.477.088.685,00	52,36
Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	257.839.810,00	0,00	257.839.810,00	N/A
Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	52.099.561,00	0,00	52.099.561,00	N/A
Pendapatan Lain-lain BLU	213.840.654,00	0,00	213.840.654,00	N/A

Kenaikan Pendapatan Pengelolaan Kawasan Lainnya dan Pendapatan Jasa Lainnya antara lain pada Satker PPKGBK antara lain karena pencabutan PPKM yang berpengaruh pada peningkatan penyelenggaraan event di kawasan PPKGBK serta peningkatan pendapatan yang berasal dari pembayaran kontribusi dan pelunasan piutang mitra BOT KSO diantaranya PT. Manggala Gelora Perkasa, PT. Graha Sidang Pratama, PT. Lingga Hamparan Krida, PT. Ariobimo Laguna Perkasa, PT. Mulia Intan Lestari, dan PT. Plataran Boga Rasa. Disamping itu, terdapat perubahan kenaikan pada tarif layanan Badan Layanan Umum berdasarkan Peraturan Direktur Utama Nomor 73 Tahun 2022 yang berlaku mulai akhir Desember 2022.

*Pendapatan  
PNBP Lainnya  
Rp103.346.512.885,00*

### **B.1.2 Pendapatan PNBP Lainnya**

Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp103.346.512.885,00 jika dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp79.836.333.615,00, mengalami kenaikan sebesar Rp23.510.179.270,00 atau 29,45 persen. Kenaikan Penerimaan Bukan Pajak Lainnya antara lain yang signifikan berasal dari pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai tusi, pendapatan penyelesaian ganti kerugian negara, pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah, dan penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu.

**Perbandingan Realisasi Pendapatan PNPB Lainnya  
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2023 dan 2022**

Uraian	Realisasi		Kenaikan/(Penurunan)	
	2023	2022	Rp	%
<b>Penerimaan Bukan Pajak Lainnya</b>	<b>103.346.512.885,00</b>	<b>79.836.333.615,00</b>	<b>23.510.179.270,00</b>	<b>29,45</b>
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	1.496.626.788,00	3.727.557.819,00	(2.230.931.031,00)	(59,85)
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	536.882.498,00	5.067.566.565,00	(4.530.684.067,00)	(89,41)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	969.229.521,00	2.880.239.978,00	(1.911.010.457,00)	(66,35)
Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan	733.413.472,00	712.674.640,00	20.738.832,00	2,91
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	512.900.000,00	81.655.000,00	431.245.000,00	528,13
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	693.583.000,00	916.357.000,00	(222.774.000,00)	(24,31)
Pendapatan Jasa Lainnya	91.908.777.164,00	61.559.517.934,00	30.349.259.230,00	49,30
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	575.000.000,00	0,00	575.000.000,00	N/A
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak	24.000.000,00	20.000.000,00	4.000.000,00	20,00
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	1.987.966.488,00	3.660.193,00	1.984.306.295,00	54.213,16
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	652.053.859,00	265.604.703,00	386.449.156,00	145,50
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	3.203.204.011,00	4.165.464.779,00	(962.260.768,00)	(23,10)
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	18.244.524,00	425.222.954,00	(406.978.430,00)	(95,71)
Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	34.631.550,00	0,00	34.631.550,00	N/A
Pendapatan Anggaran Lain-lain	10,00	10.812.050,00	(10.812.040,00)	(100,00)

Kenaikan pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai tusi berasal dari pendapatan sewa Pusdiklat Kemensetneg akibat telah dicabutnya PPKM sehingga penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan secara luar jaringan (luring). Kenaikan pendapatan penyelesaian ganti kerugian negara berasal dari pengembalian Dana Deposito TIKE TMII dan kenaikan pendapatan denda penyelesaian pemerintah berasal dari pekerjaan TA 2022 PT Dirgantara dan PT GMF yang terlambat diselesaikan.

Rincian PNPB Kementerian Sekretariat Negara berdasarkan Satuan Kerja pada periode 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

**Rincian Estimasi dan Realisasi PNB**  
berdasarkan Satuan Kerja periode 31 Desember 2023

Satker	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara	3.061.315.000,00	8.350.406.387,00	272,77
Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno	310.758.891.000,00	415.482.037.813,00	133,70
Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran	216.182.661.000,00	178.407.457.245,00	82,53
Istana Kepresidenan Jakarta	0,00	2.018.042.857,00	N/A
Istana Kepresidenan Bogor	0,00	25.472.856,00	N/A
Istana Kepresidenan Cipanas	0,00	9.589.585,00	N/A
Istana Kepresidenan Yogyakarta	0,00	57.936.365,00	N/A
Istana Kepresidenan Tampaksiring Bali	0,00	2.485.370,00	N/A
Sekretariat Wakil Presiden	0,00	757.032.080,00	N/A
Sekretariat Militer Presiden	0,00	205.125.550,00	N/A
Dewan Pertimbangan Presiden	0,00	11.120.254,00	N/A
Kantor Staf Presiden	0,00	524.417,00	N/A
<b>Jumlah</b>	<b>530.002.867.000,00</b>	<b>605.327.230.779,00</b>	<b>114,21</b>

Belanja Negara  
Rp4.490.447.063.6  
30,00

## B.2. Belanja Negara

Realisasi belanja negara neto sebesar Rp4.490.447.063.630,00 atau sebesar 97,31 persen dari anggaran sebesar Rp4.614.692.296.000,00. Realisasi Belanja Negara menurut sumber dana terdiri dari:

No.	Sumber Dana	Anggaran (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	% Realisasi
1	Rupiah Murni	4.112.524.191.000,00	4.021.771.587.216,00	97,79
2	PNBP	987.284.000,00	905.780.304,00	91,74
3	Badan Layanan Umum	485.556.041.000,00	452.227.069.387,00	93,14
4	Hibah Luar Negeri	15.624.780.000,00	15.542.626.723,00	99,47
<b>Jumlah</b>		<b>4.614.692.296.000,00</b>	<b>4.490.447.063.630,00</b>	<b>97,31</b>

Realisasi anggaran belanja neto Kementerian Sekretariat Negara menurut Satuan Kerja adalah sebagai berikut:

### Rincian Realisasi Anggaran Belanja Berdasarkan Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2023

Satker	Anggaran Setelah Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara	2.281.691.285.000,00	2.260.734.146.943,00	99,08
Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno	263.659.910.000,00	258.997.956.358,00	98,23
Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran	221.896.131.000,00	193.229.113.029,00	87,08
Istana Kepresidenan Jakarta	599.614.301.000,00	595.513.773.070,00	99,32
Istana Kepresidenan Bogor	49.816.737.000,00	49.078.247.697,00	98,52
Istana Kepresidenan Cipanas	16.564.133.000,00	15.919.227.276,00	96,11
Istana Kepresidenan Yogyakarta	24.031.576.000,00	23.926.137.359,00	99,56
Istana Kepresidenan Tampaksiring Bali	16.160.453.000,00	15.705.202.213,00	97,18
Sekretariat Wakil Presiden	368.896.520.000,00	308.284.303.399,00	83,57
Sekretariat Militer Presiden	47.647.766.000,00	47.106.928.490,00	98,86
Pasukan Pengamanan Presiden	571.860.982.000,00	571.762.200.324,00	99,98
Dewan Pertimbangan Presiden	32.148.490.000,00	31.194.549.229,00	97,03
Kantor Staf Presiden	120.704.012.000,00	118.995.278.243,00	98,58
<b>Jumlah</b>	<b>4.614.692.296.000,00</b>	<b>4.490.447.063.630,00</b>	<b>97,31</b>

Belanja negara digolongkan menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Rincian anggaran dan realisasi belanja Kementerian Sekretariat Negara menurut jenis belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

#### Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2023

Uraian	Anggaran Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Neto (Rp)	% Realisasi
Belanja Pegawai	513.517.639.000,00	505.957.141.653,00	98,53
Belanja Barang	3.670.177.431.000,00	3.562.999.537.857,00	97,08
Belanja Modal	430.997.226.000,00	421.490.384.120,00	97,79
<b>Jumlah</b>	<b>4.614.692.296.000,00</b>	<b>4.490.447.063.630,00</b>	<b>97,31</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada grafik berikut:



Perbandingan realisasi belanja neto untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

**Realisasi Belanja Kementerian Sekretariat Negara  
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2023 dan 2022**

Uraian	Realisasi (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	2023	2022	Rp	%
Belanja Pegawai	505.957.141.653,00	442.614.533.921,00	63.342.607.732,00	14,31
Belanja Barang	3.562.999.537.857,00	2.810.055.525.774,00	752.944.012.083,00	26,79
Belanja Modal	421.490.384.120,00	166.618.050.441,00	254.872.333.679,00	152,97
<b>Jumlah</b>	<b>4.490.447.063.630,00</b>	<b>3.419.288.110.136,00</b>	<b>1.071.158.953.494,00</b>	<b>31,33</b>

Dibandingkan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022, realisasi belanja neto untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.071.158.953.494,00 atau 31,33 persen yang secara umum disebabkan adanya kenaikan belanja pegawai dan belanja barang.

Penjelasan lebih rinci tentang realisasi belanja Kementerian Sekretariat Negara dapat dilihat pada butir B.2.1 sampai dengan butir B.2.3.

*Belanja Pegawai  
Rp505.957.141.653,00*

### **B.2.1 Belanja Pegawai**

Realisasi belanja pegawai neto untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp505.957.141.653,00 dan Rp442.614.533.921,00. Realisasi belanja pegawai Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp63.342.607.732,00 atau 14,31 persen dari realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022. Rincian perbandingan realisasi belanja pegawai Kementerian Sekretariat Negara untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

**Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Pegawai  
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2023 dan 2022**

Uraian	Realisasi (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	2023	2022	Rp	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	121.993.980.697,00	123.242.689.759,00	(1.248.709.062,00)	(1,01)
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	18.784.129.119,00	18.698.652.732,00	85.476.387,00	0,46
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	53.489.348.076,00	52.743.359.302,00	745.988.774,00	1,41
Belanja Honorarium	1.980.000.000,00	1.920.000.000,00	60000000,00	3,13
Belanja Lembur	11.328.843.950,00	11.769.572.000,00	(440.728.050,00)	(3,74)
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	298.589.899.687,00	234.689.645.767,00	63.900.253.920,00	27,23
<b>Jumlah Bruto</b>	<b>506.166.201.529,00</b>	<b>443.063.919.560,00</b>	<b>63.102.281.969,00</b>	<b>14,24</b>
<b>Pengembalian Belanja</b>	<b>209.059.876,00</b>	<b>449.385.639,00</b>	<b>(240.325.763,00)</b>	<b>(53,48)</b>
<b>Jumlah Neto</b>	<b>505.957.141.653,00</b>	<b>442.614.533.921,00</b>	<b>63.342.607.732,00</b>	<b>14,31</b>

Kenaikan belanja pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar 14,31 persen antara lain adanya belanja berupa kenaikan tunjangan khusus/kinerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

*Belanja Barang  
Rp3.562.999.537.857,00*

### **B.2.2 Belanja Barang**

Realisasi belanja barang neto untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp3.562.999.537.857,00 dan Rp2.810.055.525.774,00. Realisasi belanja barang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp752.944.012.083,00 atau 26,79 persen dari realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022.

**Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Barang  
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2023 dan 2022**

Uraian	Realisasi (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	2023	2022	Rp	%
Belanja Barang Operasional	296.425.455.674,00	256.630.134.352,00	39.795.321.322,00	15,51
Belanja Barang Non Operasional	192.373.796.512,00	125.139.904.587,00	67.233.891.925,00	53,73
Belanja Barang Persediaan	61.024.124.714,00	53.858.770.983,00	7.165.353.731,00	13,30
Belanja Jasa	1.343.618.239.637,00	699.191.590.392,00	644.426.649.245,00	92,17
Belanja Pemeliharaan	493.196.550.993,00	504.372.748.014,00	(11.176.197.021,00)	(2,22)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	417.693.115.260,00	342.138.071.555,00	75.555.043.705,00	22,08
Belanja Perjalanan Luar Negeri	338.045.436.790,00	199.850.071.260,00	138.195.365.530,00	69,15
Belanja Barang BLU	406.331.253.467,00	329.436.523.407,00	76.894.730.060,00	23,34
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau	16.767.160.163,00	301.731.447.500,00	(284.964.287.337,00)	(94,44)
<b>Jumlah</b>	<b>3.565.475.133.210,00</b>	<b>2.812.349.262.050,00</b>	<b>753.125.871.160,00</b>	<b>26,78</b>
<b>Pengembalian Belanja</b>	<b>2.475.595.353,00</b>	<b>2.293.736.276,00</b>	<b>181.859.077,00</b>	<b>7,93</b>
<b>Jumlah</b>	<b>3.562.999.537.857,00</b>	<b>2.810.055.525.774,00</b>	<b>752.944.012.083,00</b>	<b>26,79</b>

Kenaikan belanja barang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar 26,79 persen antara lain disebabkan:

1. Adanya pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-43 (KTT ASEAN ke-42) di Labuan Bajo pada bulan Mei 2023.
2. Adanya pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-43 (KTT ASEAN ke-43) di Jakarta pada bulan September 2023 .
3. Adanya pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi AIS Forum 2023 di Bali pada bulan Oktober 2023.
4. Telah terlaksananya beberapa kegiatan Satgas Percepatan Sosialisasi UUCK pada Semester I TA 2023, yang pada periode sebelumnya, kegiatan baru terlaksana pada Semester II TA 2022.
5. Telah dicabutnya status PPKM menyebabkan kegiatan operasional perkantoran kembali berjalan normal, sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

6. Peningkatan volume perjalanan dinas dalam dan luar negeri dalam rangka kunjungan kerja Presiden.
7. Banyaknya dinamika acara kenegaraan/acara resmi lainnya mengakibatkan peningkatan biaya jamuan, dekorasi, dan sewa.
8. Penyesuaian remunerasi belanja gaji dan tunjangan Satker PPKGBK berdasarkan Peraturan Direktur Utama PPKGBK Nomor 5 s.d. 7 Tahun 2023.

Kementerian Sekretariat Negara mengalokasikan belanja barang untuk penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp5.250.409.000,00. Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp5.233.144.174,00 atau 99,67 persen dengan rincian sebagai berikut:

Akun	Uraian Akun	Anggaran Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Bruto Rp	%
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1.157.369.000,00	1.157.364.938,00	100,00
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	170.550.000,00	170.550.000,00	100,00
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	349.683.000,00	349.282.236,00	99,89
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	3.570.506.000,00	3.553.646.900,00	99,53
525154	Belanja Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	2.301.000,00	2.300.100,00	99,96
<b>Jumlah Bruto</b>		<b>5.250.409.000,00</b>	<b>5.233.144.174,00</b>	<b>99,67</b>
<b>Pengembalian Belanja</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Neto</b>		<b>5.250.409.000,00</b>	<b>5.233.144.174,00</b>	<b>99,67</b>

Belanja barang dalam rangka penanggulangan Pandemi Covid-19 antara lain untuk:

- Biaya paket data dan komunikasi berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Nomor 02 Tahun 2023.
- Pengadaan alat tes antigen COVID-19.
- Keperluan pemeriksaan COVID-19 bagi Tim Dokter Kepresidenan, Pejabat dan Pegawai di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.
- Penyemprotan disinfektan.

Belanja Modal  
Rp421.490.384.12  
0,00

### B.2.3 Belanja Modal

Realisasi belanja modal neto untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 Rp421.490.384.120,00 dan Rp166.618.050.441,00. Realisasi belanja modal untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023

mengalami kenaikan sebesar Rp254.872.333.679,00 atau 152,97 persen dari belanja modal untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022.

**Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal  
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2023 dan 2022**

Uraian	Realisasi (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	2023	2022	Rp	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	345.656.989.659,00	107.916.034.970,00	237.740.954.689,00	220,30
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.041.072.067,00	18.942.215.406,00	1.098.856.661,00	5,80
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.435.946.000,00	0,00	1.435.946.000,00	N/A
Belanja Modal Lainnya	8.460.560.474,00	5.778.260.061,00	2.682.300.413,00	46,42
Belanja Modal BLU	45.895.815.920,00	33.981.540.004,00	11.914.275.916,00	35,06
<b>Jumlah</b>	<b>421.490.384.120,00</b>	<b>166.618.050.441,00</b>	<b>254.872.333.679,00</b>	<b>152,97</b>
<b>Pengembalian Belanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah</b>	<b>421.490.384.120,00</b>	<b>166.618.050.441,00</b>	<b>254.872.333.679,00</b>	<b>152,97</b>

*Belanja Modal Peralatan dan Mesin*

*Rp345.656.989.659,00*

### B.2.3.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp345.656.989.659,00 dan Rp107.916.034.970,00. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp237.740.954.689,00 atau sebesar 220,30 persen dibandingkan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022. Tidak terdapat pengembalian belanja modal peralatan dan mesin untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin antara lain berupa:

1. Pengadaan peralatan kantor.
2. Pengadaan komputer dan laptop.
3. Pengadaan peralatan rumah tangga lainnya.

Rincian dan perbandingan realisasi belanja modal peralatan dan mesin adalah sebagai berikut:

### Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	2023	2022	Rp	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	344.848.149.659,00	106.095.532.261,00	238.752.617.398,00	225,04
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	22.200.000,00	(22.200.000,00)	(100,00)
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	808.840.000,00	1.798.302.709,00	(989.462.709,00)	(55,02)
<b>Jumlah Belanja Bruto</b>	<b>345.656.989.659,00</b>	<b>107.916.034.970,00</b>	<b>237.740.954.689,00</b>	<b>220,30</b>
<b>Pengembalian Belanja Modal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Belanja Neto</b>	<b>345.656.989.659,00</b>	<b>107.916.034.970,00</b>	<b>237.740.954.689,00</b>	<b>220,30</b>

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp20.041.072.067,00

### B.2.3.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp20.041.072.067,00 dan Rp18.942.215.406,00. Realisasi belanja modal gedung dan bangunan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.098.856.661,00 atau 5,80 persen dibandingkan modal belanja gedung dan bangunan periode yang berakhir 31 Desember 2022. Rincian dan perbandingan realisasi belanja modal gedung dan bangunan adalah sebagai berikut:

### Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2023 dan 2022

Akun	Realisasi (Rp)		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Rp	%
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	20.041.072.067,00	18.942.215.406,00	1.098.856.661,00	5,80
<b>Jumlah Belanja Bruto</b>	<b>20.041.072.067,00</b>	<b>18.942.215.406,00</b>	<b>1.098.856.661,00</b>	<b>5,80</b>
<b>Pengembalian Belanja Modal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Belanja Neto</b>	<b>20.041.072.067,00</b>	<b>18.942.215.406,00</b>	<b>1.098.856.661,00</b>	<b>5,80</b>

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp1.435.946.000,00

### B.2.3.3 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp1.435.946.000,00 dan Rp0,00. Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.435.946.000,00 dari belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada periode

yang berakhir 31 Desember 2022. Rincian dan perbandingan realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah sebagai berikut:

**Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2023 dan 2022**

Akun	Realisasi (Rp)		Kenaikan (Penurunan)	
	2022	2021	Rp	%
Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	70.852.000,00	0,00	70.852.000,00	N/A
Belanja Penambahan Nilai Jaringan	1.365.094.000,00	0,00	1.365.094.000,00	N/A
<b>Jumlah Belanja Bruto</b>	<b>1.435.946.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.435.946.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pengembalian Belanja Modal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Belanja Neto</b>	<b>1.435.946.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.435.946.000,00</b>	<b>0,00</b>

*Belanja Modal Lainnya*  
Rp8.460.560.474,00

**B.2.3.4 Belanja Modal Lainnya**

Realisasi belanja modal lainnya pada untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp8.460.560.474,00 dan Rp5.778.260.061,00 Realisasi belanja modal lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp2.682.300.413,00 atau 46,42 persen dibandingkan realisasi periode yang berakhir 31 Desember 2022. Rincian dan perbandingan realisasi belanja modal lainnya adalah sebagai berikut:

**Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal Lainnya Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2023 dan 2022**

Akun	Realisasi (Rp)		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Rp	%
Belanja Modal Lainnya	7.913.744.172,00	5.488.055.588,00	2.425.688.584,00	44,20
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	546.816.302,00	290.204.473,00	256.611.829,00	100,00
<b>Jumlah Belanja Bruto</b>	<b>8.460.560.474,00</b>	<b>5.778.260.061,00</b>	<b>2.682.300.413,00</b>	<b>46,42</b>
<b>Pengembalian Belanja Modal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Belanja Neto</b>	<b>8.460.560.474,00</b>	<b>5.778.260.061,00</b>	<b>2.682.300.413,00</b>	<b>46,42</b>

*Belanja Modal BLU*  
Rp45.895.815.920,00

**B.2.3.5 Belanja Modal BLU**

Realisasi belanja modal BLU untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp45.895.815.920,00 dan Rp33.981.540.004,00. Realisasi belanja modal BLU untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp11.914.275.916,00 atau 35,06 persen dibandingkan realisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022.

Kenaikan belanja modal BLU antara lain disebabkan:

1. Penambahan komponen belanja modal peralatan dan mesin Satker PPKGBK berupa pengisian desain *interior sky box* IMS dalam rangka event FIBA dan pengadaan *ground protection*. Disamping itu, terdapat peningkatan realisasi belanja atas pengadaan sarana dan prasarana pendukung *venue*, pengadaan peralatan kehumasan, dan pengadaan *smart field system*.
2. Pembuatan akses dan saluran drainase di kawasan PPKGBK.
3. Pengembangan *software* dan aplikasi di lingkungan PPKGBK, antara lain pengembangan IT Kawasan (*counting traffic management*), *love* GBK, dan *e-book*ing.

Rincian dan perbandingan realisasi belanja modal BLU adalah sebagai berikut:

**Perbandingan Rincian Realisasi Belanja Modal BLU  
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 2023 dan 2022**

Akun	Realisasi (Rp)		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Rp	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	35.322.101.540,00	6.860.157.761,00	28.461.943.779,00	414,89
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	8.454.373.743,00	8.970.811.026,00	(516.437.283,00)	(5,76)
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan - BLU	1.325.631.637,00	17.487.407.717,00	(16.161.776.080,00)	(92,42)
Belanja Modal Lainnya - BLU	793.709.000,00	663.163.500,00	130.545.500,00	19,69
<b>Jumlah Belanja Bruto</b>	<b>45.895.815.920,00</b>	<b>33.981.540.004,00</b>	<b>11.914.275.916,00</b>	<b>35,06</b>
<b>Pengembalian Belanja Modal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Belanja Neto</b>	<b>45.895.815.920,00</b>	<b>33.981.540.004,00</b>	<b>11.914.275.916,00</b>	<b>35,06</b>

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

*Kewajiban*

**(6) Kewajiban**

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Ekuitas*

**(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

### C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di  
Bendahara  
Pengeluaran  
Rp27.282.699.  
334,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp27.282.699.334,00 dan Rp36.343.556.425,00. Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke kas negara per tanggal neraca. Dibandingkan per 31 Desember 2022, Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp9.060.857.091,00 atau 24,93 persen.

Kas di Bendahara Pengeluaran berdasarkan Satker di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

#### Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran Berdasarkan Satker Per 31 Desember 2023 dan 2022

Satker	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(penurunan)	
			Rp	%
Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara	1.000.000.000,00	296.218.330,00	703.781.670,00	237,59
Istana Kepresidenan Jakarta	23.184.699.334,00	32.665.951.845,00	(9.481.252.511,00)	(29,02)
Istana Kepresidenan Bogor	98.000.000,00	98.000.000,00	0,00	0,00
Sekretariat Wakil Presiden	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00
Sekretariat Militer Presiden	0,00	282.933.750,00	(282.933.750,00)	(100,00)
Dewan Pertimbangan Presiden	0,00	452.500,00	(452.500,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>27.282.699.334,00</b>	<b>36.343.556.425,00</b>	<b>(9.060.857.091,00)</b>	<b>(24,93)</b>

Rincian saldo kas di bendahara pengeluaran dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut:

#### 1. Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara

Saldo sebesar Rp1.000.000.000,00 merupakan sisa Dana Tambahan Uang Persediaan (TUP) per tanggal 31 Desember 2023 yang tidak akan disetorkan ke rekening kas negara untuk digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan kesehatan pada pelaksanaan kunjungan kerja Presiden dan Istri/Suami Presiden, Wakil Presiden dan Istri/Suami Wakil Presiden baik di dalam negeri maupun luar negeri sesuai surat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-223/PB/2023 tanggal 29 Desember 2023.

2. Istana Kepresidenan Jakarta

Saldo sebesar Rp23.184.699.334,00 berupa uang tunai. Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan No. S-222/PB/2023 tanggal 29 Desember 2023 hal Persetujuan Penggunaan Sisa Dana Uang Persediaan (UP)/Tambahannya Uang Persediaan (TUP) Tunai Tahun Anggaran (TA) 2023 pada Akhir TA 2023 dan Awal TA 2024 bahwa terkait penggunaan sisa dana UP/TUP tunai TA 2023 telah disetujui sebesar Rp31.000.000.000,00 untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kerumahtanggaan kepresidenan baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan sisa dana UP Tunai 2023 akan diperhitungkan dengan alokasi penerimaan UP Tunai TA 2024.

3. Istana Kepresidenan Bogor

Saldo sebesar Rp98.000.000,00 berupa uang tunai. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut merupakan sisa Tambahan Uang Persediaan (TUP) per tanggal 31 Desember 2023 yang tidak disetorkan ke rekening kas negara untuk digunakan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan acara resmi/kepresidenan dan kegiatan operasional kebutuhan VVIP sampai dengan Istana Kepresidenan Bogor menerima uang persediaan TA 2024, sesuai surat Kepala Istana Kepresidenan Bogor Nomor R-51/I-Bgr/KU.05.06/12/2023, tanggal 22 Desember 2023 hal Permohonan Izin Dispensasi Penggunaan Dana Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan dan surat persetujuan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-210/PB/2023, tanggal 23 Desember 2023.

4. Sekretariat Wakil Presiden

Saldo sebesar Rp3.000.000.000,00 merupakan sisa UP TA 2023 yang akan diperhitungkan dengan Penerimaan UP Tunai TA 2024, berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-207/PB/2023 tanggal 20 Desember tahun 2023 Hal Persetujuan Penggunaan Sisa Dana Uang Persediaan (UP)/Tambahannya Uang Persediaan (TUP) Tunai Tahun Anggaran (TA) 2023 yang Diperhitungkan dengan Penerimaan UP Tunai TA 2024.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 terdiri dari:

- a. Uang tunai sebesar Rp2.000.000.000,00.
- b. Uang di rekening BP sebesar Rp1.000.000.000,00.

Kas Lainnya  
dan Setara  
Kas  
Rp95.890.521.  
718,00

## C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp95.890.521.718,00 dan Rp59.209.627.571,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Dibandingkan per

31 Desember 2022, Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp36.680.894.147,00 atau 61,95 persen.

Kas Lainnya dan Setara Kas berdasarkan Satker di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

**Perbandingan Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas Berdasarkan Satker  
Per 31 Desember 2023 dan 2022**

Satker	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(penurunan)	
			Rp	%
Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara	831.899.343,00	1.444.341.922,00	(612.442.579,00)	(42,40)
Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno	81.528.361.022,00	45.799.372.180,00	35.728.988.842,00	78,01
Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran	11.945.983.552,00	10.643.694.625,00	1.302.288.927,00	12,24
Istana Kepresidenan Jakarta	1.584.277.801,00	1.319.846.248,00	264.431.553,00	20,04
Sekretariat Wakil Presiden	0,00	2.372.596,00	(2.372.596,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>95.890.521.718,00</b>	<b>59.209.627.571,00</b>	<b>36.680.894.147,00</b>	<b>61,95</b>

Penjelasan atas saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 antara lain sebagai berikut:

1. Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp831.899.343,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Nilai (Rp)
LS Bendahara yang belum dibayarkan	718.258.000,00
Utang pajak Bendahara Pengeluaran yang belum disetor	113.641.343,00
<b>Jumlah</b>	<b>831.899.343,00</b>

2. Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp81.528.361.022,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Nilai (Rp)
Pungutan pajak yang belum disetor	3.611.703.280,00
Uang jaminan	17.487.766.243,00
Dana titipan pihak ketiga	47.883.871.822,00
Uang muka layanan	12.531.997.400,00
Dana KUN yang belum disetor	13.022.277,00
<b>Jumlah</b>	<b>81.528.361.022,00</b>

Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp35.728.988.842,00 atau 78,01 persen karena terdapat peningkatan arus kas masuk dari pihak ketiga diantaranya dana titipan pihak ketiga, uang muka layanan, dan jaminan sewa seiring dengan meningkatnya aktivitas penyewaan tanah dan atau bangunan serta penyelenggaraan event di lingkungan PPKGBK.

### 3. Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp11.945.983.552,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Setoran PNBK 20% s.d periode 16 s.d. 31 Desember 2023 yang belum disetorkan	1.038.388.111,00
2	Uang Jaminan Dana Kelola	9.806.305.855,00
3	PPN Masa Desember 2023 yang belum disetorkan	527.114.258,00
4	Penerimaan belum teridentifikasi	261.197.421,00
5	Bagi hasil 55% dengan PT Cawang Mitra atas Golfcar Desember 2023 yang belum disetorkan	183.840.000,00
6	Penerimaan atas Caddie Fee periode 16 s.d. 31 Desember 2023 yang belum dibayarkan	85.719.000,00
7	Penerimaan PP1 Desember 2023 yang belum disetor	23.226.670,00
8	Penerimaan yang belum pemindahbukuan periode Desember 2023	19.552.237,00
9	Fee Virtual Account yang belum diambil pihak Bank	640.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>11.945.983.552,00</b>

### 4. Istana Kepresidenan Jakarta

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp1.584.277.801,00 berupa pajak yang belum disetorkan.

Kas pada BLU  
Rp854.705.264.574,00

### C.3 Kas pada Badan Layanan Umum

Saldo Kas pada BLU per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp854.705.264.574,00 dan Rp804.951.616.067,00. Dibandingkan per 31 Desember 2022, Kas pada BLU per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp49.753.648.507,00 atau 6,18 persen.

Rincian Kas Pada BLU di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

#### Perbandingan Kas Pada BLU Berdasarkan Satker Per 31 Desember 2023 dan 2022

Satker	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(penurunan)	
			Rp	%
Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno	476.599.991.571,00	384.030.518.666,00	92.569.472.905,00	24,10
Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran	378.105.273.003,00	420.921.097.401,00	(42.815.824.398,00)	(10,17)
<b>Jumlah</b>	<b>854.705.264.574,00</b>	<b>804.951.616.067,00</b>	<b>49.753.648.507,00</b>	<b>6,18</b>

Penjelasan atas saldo Kas pada BLU per 31 Desember 2023 antara lain sebagai berikut:

#### 1. PPKGBK

Saldo Kas pada BLU per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp476.599.991.571,00 dan Rp384.030.518.666,00. Kas pada BLU per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp92.569.472.905,00 atau 24,10 persen karena terdapat peningkatan realisasi belanja sampai dengan Desember 2023 seiring dengan peningkatan pendapatan dari aktivitas penyewaan bangunan, penyelenggaraan event, dan kenaikan kontribusi mitra BOT KSO di lingkungan PPKGBK.

Adapun peningkatan pendapatan dari penyelenggaraan *event*, pengoperasian venue baru Indonesia Arena serta kenaikan kontribusi mitra BOT KSO dari adanya tarif layanan Badan Layanan Umum berdasarkan Peraturan Direktur Utama Nomor 73 Tahun 2022, turut ditunjang dengan peningkatan realisasi belanja yang digunakan untuk kebutuhan operasional di antaranya pengisian desain interior *sky box* Indonesia Arena, *ground protection* serta fasilitas penunjang *venue* lainnya. Kas pada Badan Layanan Umum (BLU) merupakan selisih antara Pendapatan dan Belanja yang disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selama periode berjalan. Kas pada BLU sesuai Pengesahan SP3B BLU adalah sebesar Rp476.599.991.571,00.

#### 2. PPKK

Saldo Kas pada BLU sebesar Rp378.105.273.003,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis	Nilai (Rp)
1	Deposito	366.960.000.000
2	Mandiri Pengeluaran (PPKK)	7.175.700.804
3	BNI Induk	832.785.853
4	BNI PMK	683.359.009
5	BRI Golf	487.943.712
6	BNI Golf	425.145.514
7	BRI	394.828.926
8	BTN	334.632.670
9	Mandiri Golf	325.985.268
10	BSI	299.867.100
11	Mandiri PMK	171.513.647
12	Kas Kecil	10.000.000
13	Uang Persediaan	3.510.500
<b>Jumlah</b>		<b>378.105.273.003</b>

*Belanja  
Dibayar di  
Muka(Prepaid)  
Rp13.316.747.  
520,00*

#### **C.4 Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)**

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp13.316.747.520,00 dan Rp32.651.027.285,00. Belanja Dibayar Dimuka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkannya secara penuh, namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Dibandingkan per 31 Desember 2022, Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp19.334.279.765,00 atau 59,21 persen. Penurunan Belanja Dibayar Dimuka yang signifikan karena adanya perubahan mekanisme pembayaran. Pada tahun sebelumnya pembayaran dilakukan dengan menggunakan jaminan, sedangkan mulai tahun 2023 menggunakan Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA).

Rincian Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

**Perbandingan Saldo Belanja Dibayar Dimuka Berdasarkan Satker  
Per 31 Desember 2023 dan 2022**

Satker	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(penurunan)	
			Rp	%
Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara	8.155.376.657,00	29.923.575.734,00	(21.768.199.077,00)	(72,75)
Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran	243.076.758,00	243.076.758,00	0,00	0,00
Istana Kepresidenan Jakarta	604.420.942,00	761.474.699,00	(157.053.757,00)	(20,62)
Istana Kepresidenan Bogor	50.391.064,00	23.804.033,00	26.587.031,00	100,00
Istana Kepresidenan Yogyakarta	41.619.651,00	12.810.946,00	28.808.705,00	224,88
Istana Kepresidenan Cipanas	629.708,00	2.671.919,00	(2.042.211,00)	(76,43)
Sekretariat Wakil Presiden	1.161.341.972,00	93.848.000,00	1.067.493.972,00	1.137,47
Sekretariat Militer Presiden	0,00	27.866.663,00	(27.866.663,00)	0,00
Dewan Pertimbangan Presiden	5.087.226,00	4.239.233,00	847.993,00	20,00
Kantor Staf Presiden	3.054.803.542,00	1.557.659.300,00	1.497.144.242,00	96,12
<b>Jumlah</b>	<b>13.316.747.520</b>	<b>32.651.027.285</b>	<b>(19.334.279.765)</b>	<b>(59,21)</b>

Penjelasan atas saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 antara lain sebagai berikut:

1. Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara

Saldo sebesar Rp8.155.376.657,00 dijelaskan pada tabel berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan / Penurunan	
	Rp	Rp	Rp	%
Pembayaran perpanjangan Lisensi Perangkat Keras	4.837.204.776,00	3.673.016.029,00	1.164.188.747,00	31,70
Pembayaran perpanjangan Lisensi Perangkat Lunak	3.264.829.127,00	1.680.987.243,00	1.583.841.884,00	94,22
Pembayaran pengadaan akun video conference dan zoom meeting (SPP 00164T); dan pengadaan akun virtual meeting - Zoom Pro (SPP 03860T).	38.025.899,00	0,00	38.025.899,00	N/A
Pembayaran biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio dan langganan blinkist	11.526.563,00	11.526.563,00	0,00	0,00
Pembayaran lisensi aplikasi berbayar pada Satgas UUCK di Jakarta (SPBY 02400); dan belanja barang penyimpanan Google Drive selama setahun (SPBY 03538).	3.790.292,00	0,00	3.790.292,00	N/A
Pembayaran pemeliharaan dan pelatihan Helikopter Super Puma AS-332 L2 VVIP	0,00	8.347.731.999,00	(8.347.731.999,00)	(100,00)
Pembayaran pekerjaan pemeliharaan Pesawat Bae RJ-85 VVIP	0,00	7.724.956.200,00	(7.724.956.200,00)	(100,00)
Pembayaran pekerjaan pemeliharaan dan pelatihan Mekanik Pesawat BBJ-2 VVIP	0,00	8.485.357.700,00	(8.485.357.700,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>8.155.376.657,00</b>	<b>29.923.575.734,00</b>	<b>(21.768.199.077,00)</b>	<b>(72,75)</b>

## 2. PPKK

Saldo sebesar Rp243.076.758,00 berupa uang jaminan langganan listrik yang dibayarkan pihak ketiga (PLN) yang dapat diterima Kembali setelah berakhirnya langganan.

## 3. Istana Kepresidenan Jakarta

Saldo sebesar Rp604.420.942,00 merupakan penyesuaian atas penggunaan renewal lisensi yang berlaku sampai dengan TA 2024, namun sudah dibayar pada TA 2023.

## 4. Istana Kepresidenan Bogor

Saldo sebesar Rp50.391.064,00 berupa:

- Saldo RFID untuk bahan bakar kendaraan dinas sebesar Rp790.107,00 yang telah dibayarkan di TA 2023, namun belum habis terpakai hingga akhir periode Neraca per 31 Desember 2023.
- Saldo renewal lisensi perangkat lunak sebesar Rp49.600.957,00 yang penggunaannya melewati *cutoff* tanggal laporan keuangan (31 Desember 2023).

## 5. Istana Kepresidenan Cipanas

Saldo sebesar Rp629.708,00 berupa saldo RFID untuk bahan bakar kendaraan dinas yang telah dibayarkan di TA 2023, namun belum habis terpakai hingga akhir periode Neraca per 31 Desember 2023.

6. Istana Kepresidenan Yogyakarta

Saldo sebesar Rp41.619.651,00 berupa:

- Saldo RFID untuk bahan bakar kendaraan dinas sebesar Rp39.001.018,00 yang telah dibayarkan di TA 2023, namun belum habis terpakai hingga akhir periode Neraca per 31 Desember 2023.
- Saldo langganan tv kabel sebesar Rp2.618.633,00 yang penggunaannya melewati *cutoff* tanggal laporan keuangan (31 Desember 2023).

7. Sekretariat Wakil Presiden

Saldo sebesar Rp1.161.341.972, berupa:

- Saldo renewal lisensi perangkat lunak sebesar Rp941.933.222,00 yang penggunaannya melewati *cutoff* tanggal laporan keuangan (31 Desember 2023)
- Saldo voucher pembelian untuk bahan bakar kendaraan dinas sebesar Rp219.408.750,00 yang telah dibayarkan di TA 2023, namun belum habis terpakai hingga akhir periode Neraca per 31 Desember 2023.

8. Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden

Saldo sebesar Rp5.087.226,00 terdiri dari:

- a. Pembayaran lisensi zoom meeting sebesar Rp1.281.919,00.
- b. Pembayaran lisensi SSL dan Elementer Pro sebesar Rp3.360.732,00.
- c. Pembayaran domain Wantimpres sebesar Rp444.575,00.

9. Kantor Staf Presiden

Saldo sebesar Rp3.054.803.542,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pembayaran pemutakhiran jaminan layanan penggunaan dan pemeliharaan perangkat sebesar Rp327.108.829,00.
- b. Pembayaran pemutakhiran jaminan layanan penggunaan dan pemeliharaan perangkat jaringan komputer sebesar Rp127.875.000,00.
- c. Pembayaran pemutakhiran jaminan layanan penggunaan dan pemeliharaan perangkat keamanan jaringan sebesar Rp1.509.368.750,00.
- d. Pembayaran pemutakhiran jaminan layanan penggunaan dan pemeliharaan perangkat lunak sebesar Rp957.467.500,00.
- e. Pembayaran perpanjangan lisensi *video conference* sebesar Rp132.983.463,00.

Pendapatan yang  
Masih  
Harus Diterima  
Rp1.637.555.256,00

### C.5 Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.637.555.256,00 dan Rp609.902.097,00. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan pendapatan PNBPN yang berdasarkan perhitungan secara akuntansi sudah menjadi hak pemerintah tetapi belum ada hak tagihnya karena belum waktunya untuk dibayar/ditagih. Dibandingkan per 31 Desember 2022, Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.027.653.159,00 atau 168,49 persen. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima terdapat pada Satker:

1. PPKGBK berupa hak pendapatan bunga deposito yang dihitung sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp759.434.703,00,00.
2. PPKK berupa hak pendapatan bunga deposito yang dihitung sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp862.332.603,00.
3. Setwapres berupa pembayaran sewa atm BNI pada tahun 2024 sebesar Rp15.787.950,00 dengan jangka waktu sewa selama 5 tahun dari 8 April 2023 s.d. 7 April 2028.

#### Perbandingan Pendapatan yang Masih Harus Diterima Berdasarkan Satker Per 31 Desember 2023 dan 2022

Satker	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(penurunan)	
			Rp	%
Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno	759.434.703,00	0,00	759.434.703,00	N/A
Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran	862.332.603,00	609.902.097,00	252.430.506,00	41,39
Sekretariat Wakil Presiden	15.787.950,00	0,00	15.787.950,00	N/A
<b>Jumlah</b>	<b>1.637.555.256,00</b>	<b>609.902.097,00</b>	<b>1.027.653.159,00</b>	<b>168,49</b>

Piutang Bukan  
Pajak  
Rp1.769.261.770,00

### C.6 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.769.261.770,00 dan Rp4.800.393.304,00. Penyisihan Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp8.966.308,00 dan Rp23.983.737,00, sehingga saldo Piutang Bukan Pajak (Neto) per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp1.760.295.462,00 dan Rp4.776.409.567,00. Dibandingkan per 31 Desember 2022, Piutang Bukan Pajak (Neto) per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp3.016.114.105,00 atau 63,15 persen. Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

**Perbandingan Saldo Piutang Bukan Pajak Berdasarkan Satker  
Per 31 Desember 2023 dan 2022**

Satker	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(penurunan)	
			Rp	%
Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara	262.307.354,00	3.702.801.805,00	(3.440.494.451,00)	(92,92)
PPKGBK	229.332.435,00	309.939.371,00	(80.606.936,00)	(26,01)
Istana Kepresidenan Jakarta	773.589.184,00	335.084.193,00	438.504.991,00	130,86
Istana Kepresidenan Yogyakarta	1.829.000,00	0,00	1.829.000,00	N/A
Sekretariat Wakil Presiden	502.203.797,00	248.172.905,00	254.030.892,00	102,36
Sekretariat Militer Presiden	0,00	204.395.030,00	(204.395.030,00)	(100,00)
<b>Jumlah Bruto</b>	<b>1.769.261.770,00</b>	<b>4.800.393.304,00</b>	<b>(3.031.131.534,00)</b>	<b>(63,14)</b>
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(8.966.308,00)	(23.983.737,00)	15.017.429,00	(62,62)
<b>Jumlah Neto</b>	<b>1.760.295.462,00</b>	<b>4.776.409.567,00</b>	<b>(3.016.114.105,00)</b>	<b>(63,15)</b>

Penjelasan atas saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 antara lain sebagai berikut:

1. Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara  
Saldo Piutang Bukan Pajak sebesar Rp262.307.354,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Piutang PNBPN sebesar Rp15.281.300,00 berupa kelebihan pembayaran penghasilan pegawai.
  - b. Piutang Lainnya sebesar Rp260.779.224,00 antara lain terdiri dari pengembalian uang lembur bulan Desember 2023, pengembalian uang makan bulan Desember 2023, pengembalian belanja barang kunjungan kerja tim dokter kepresidenan, pengembalian belanja tunjangan jabatan struktural Eselon I.a bulan Desember 2023, serta piutang atas kelebihan pembayaran penghasilan pegawai.
2. PPKGBK  
Saldo sebesar Rp229.332.435,00 merupakan piutang lainnya dari pengembalian belanja TAYL, yang terdiri dari:
  - a. Belanja gaji dan tunjangan sebesar Rp38.149.000,00.
  - b. Belanja barang sebesar Rp108.616.330,00.
  - c. Belanja jasa sebesar Rp54.386.923,00.
  - d. Belanja pemeliharaan sebesar Rp28.180.182,00.
3. Istana Kepresidenan Jakarta  
Saldo sebesar Rp773.589.184,00 berupa penerimaan belanja barang dan belanja modal TAYL.
4. Istana Kepresidenan Yogyakarta

Saldo sebesar Rp1.829.000,00 berupa kelebihan biaya lembur PPNPN Tahun 2023 sebesar Rp615.000,00 dan pencatatan kelebihan biaya lembur pegawai (ASN) Tahun 2023 sebesar Rp1.214.000,00.

#### 5. Sekretariat Wakil Presiden

Saldo sebesar Rp502.203.797,00 terdiri dari:

- Pengembalian tiket kunjungan kerja Wakil Presiden yang baru disetor ke kas negara pada bulan Maret 2024 sebesar Rp452.604.705,00.
- Pengembalian atas kelebihan Belanja Pegawai dan Belanja Barang sebesar Rp49.599.092,00 yang disetorkan pada tanggal 8, 9, 10, 11, 12, dan 23 Januari 2024.

Bagian Lancar  
Tagihan  
Tuntutan  
Perbendaharaan/Tuntutan  
Ganti Rugi  
Rp24.000.000,  
00

### C.7 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp24.000.000,00 dan Rp24.000.000,00. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp120.000,00, sehingga saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Neto) per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp24.000.000,00 dan Rp23.880.000,00. Dibandingkan per 31 Desember 2022, Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi neto per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp120.000,00 atau 0,50 persen. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

#### Perbandingan Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP /TGR) Berdasarkan Satker Per 31 Desember 2023 dan 2022

Satker	31 Desember 2023	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(penurunan)	
			Rp	%
Istana Kepresidenan Jakarta	24.000.000,00	24.000.000,00	-	-
<b>Jumlah Bruto</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0,00	(120.000,00)	120.000,00	(100,00)
<b>Jumlah Neto</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>23.880.000,00</b>	<b>120.000</b>	<b>0,50</b>

Piutang dari  
Kegiatan  
Operasional  
BLU  
Rp961.230.59  
0.817,00

## C.8 Piutang dari Kegiatan Operasional BLU

Saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp1.063.525.938.532,00 dan Rp1.171.387.187.151,00. Penyisihan Piutang Dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp102.295.347.715,00 dan Rp94.431.633.663,00, sehingga saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (Neto) per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp961.230.590.817,00 dan Rp1.076.955.553.488,00. Dibandingkan per 31 Desember 2022, Piutang dari Kegiatan Operasional BLU neto per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp115.724.962.671,00 atau 10,75 persen. Piutang dari Kegiatan Operasional BLU merupakan tagihan kepada pihak ketiga yang belum diselesaikan pada tanggal neraca.

Rincian Piutang dari Kegiatan Operasional BLU pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

### Piutang Dari Kegiatan Operasional BLU Per 31 Desember 2023 dan 2022

Satker	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(penurunan)	
			Rp	%
Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno	42.097.016.394,00	48.393.490.904,00	(6.296.474.510,00)	(13,01)
Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran	1.021.428.922.138,00	1.122.993.696.247,00	(101.564.774.109,00)	(9,04)
<b>Jumlah Bruto</b>	<b>1.063.525.938.532,00</b>	<b>1.171.387.187.151,00</b>	<b>(107.861.248.619,00)</b>	<b>(9,21)</b>
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(102.295.347.715,00)	(94.431.633.663,00)	(7.863.714.052,00)	8,33
<b>Jumlah Neto</b>	<b>961.230.590.817,00</b>	<b>1.076.955.553.488,00</b>	<b>(115.724.962.671,00)</b>	<b>(10,75)</b>

Penjelasan atas Piutang dari Kegiatan Operasional BLU adalah sebagai berikut:

#### 1. Satker Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno

Saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp42.097.016.934,00 dan Rp48.393.490.904,00. Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp6.296.473.970,00 atau 13,01 persen karena terdapat pelunasan piutang oleh mitra kerjasama dari kegiatan operasional BLU diantaranya PT Manggala Gelora Perkasa, PT Pixindo Media, PT Asia Sport Development, PT Ariobimo Laguna Perkasa, PT Aneka Bina Lestari, PT Terminal Builders, PT Lingga Hampanan Kirda dan sewa/retail lainnya.

Adapun PPKGBK telah menyerahkan pengurusan piutang atas nama PT Putraja Perkasa dengan Nomor B.113/PPKGBK/Dirut/05/2012 sebesar Rp13.286.355.000,00 kepada Panitia Urusan Piutang Negara Macet (PUPN) dan telah terbit surat dengan Nomor PJP/05/PUPN.10.01/2012 mengenai jumlah

piutang yang diakui PUPN yakni sebesar Rp12.375.250.000,00, sementara denda sebesar Rp911.105.000,00 tidak diakui merujuk surat konfirmasi KP3N Nomor S.2047/WKN.07/KNL.01/2012. Selain itu, PPKGBK juga telah menyerahkan pengelolaan piutang atas nama PT. Diya Nuansa Anugrah (PT. DNA) sebesar Rp2.210.524.000,00 merujuk putusan Mahkamah Agung RI Nomor 629/PK/Pdt/2022. Piutang dari Kegiatan Operasional BLU merupakan piutang usaha atas sewa lahan/venue berdasarkan perjanjian/kontrak kerjasama.

## 2. Satker Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran

Saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU sebesar Rp1.021.428.922.138,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Kerjasama pembangunan untuk mendayagunakan/pengusahaan lahan blok B2 dan B3 di Komplek Kemayoran PT. Theda Persada Nusantara	194.030.508.335
2	Kerjasama pembangunan Gedung Menara Jakarta PT. Prasada Japa Pamudja, Sesuai KMK 201/PMK.05/2009	419.692.500.000
3	Pendapatan Sewa PT.Prasada Japa Pamudja	5.473.908.000
4	Kerjasama tanah blok B7, B8 dan C7 dalam rangka kerjasama pembangunan untuk mendayagunakan/pengusahaan tanah PT. Theda Persada Nusantara	256.135.379.240
5	Penyerahan penggunaan sebidang tanah blok B-5 No. 2 dan 3 di KBBKPT. Merpati Nusantara Airlines *Sudah diajukan ke PUPN	26.692.355.897
6	Kerjasama bagi hasil lahan Blok D-3 di KBBK PT. Bina Citra Tataswati	76.992.533.000
7	Piutang atas pendapatan dalam bentuk cash dari Springhill Group	24.273.266.314
8	Piutang Jasa Air Pelanggan	9.238.583.921
	*)Rincian Piutang Jasa Air Pelanggan dapat dilihat pada lampiran Laporan Keuangan	
9	Piutang Jasa Listrik Pelanggan Piutang atas langganan jasa listrik kepada para pelanggan Perkantoran di Kemayoran	204.700.183
	*)Rincian Piutang Jasa Listrik Pelanggan dapat dilihat pada lampiran Laporan Keuangan	
10	Tagihan penerimaan sewa lantai dasar rusun III Tahun 2014	13.068.000,00
11	Tagihan penerimaan sewa lantai dasar rusun III Tahun 2015	13.068.000,00
12	Tagihan penerimaan sewa lantai dasar rusun III Tahun 2016	13.068.000,00
13	Tagihan penerimaan sewa lantai dasar rusun III Tahun 2017	13.068.000,00
14	Tagihan penerimaan sewa lantai dasar rusun III Tahun 2018	19.602.000,00
15	Tagihan penerimaan sewa lantai dasar rusun III Tahun 2019	26.136.000,00
16	Tagihan penerimaan sewa lantai dasar rusun III Tahun 2020	9.771.300,00
17	Tagihan penerimaan sewa lantai dasar rusun III Tahun 2021	52.272.000,00
18	Tagihan penerimaan sewa lantai dasar rusun III Tahun 2022	65.340.000,00
19	Penjualan rumah dinas Gol III Diah Astriani Sulistianti sesuai dengan kontrak No.B-1025/Kemsetneg/PPKK/Dirut/08/2014 & Surat No. B-1525/ Kemsetneg/PPKK/Dirut/11/2014	293.256.250,00
20	Pencatatan piutang atas LHP BPK Ri No.01 Tahun 2012:	6.766.129.827,00
	PT. Sembilan Sakti Sejati senilai Rp.1.165.612.355	
	PT. Mantika Bukit Abadi senilai Rp.240.917.000	
	PT. Alam Semesta Sejati senilai Rp.1.630.476.567	

	PT. Citineon Prima Mandiri senilai Rp.1.161.541.875	
	PT. International Auksion Multimesin senilai Rp.2.617.532.030	
21	Pencatatan piutang berdasarkan LHP BPK RI Nomor 292 Tahun 2013:	646.000.000,00
	1) Pengembalian honor pengelolaan Golf Kemayoran senilai Rp.526.000.000,-	
	2) Pengembalian honor pengelolaan Pasar Mobil Kemayoran senilai Rp.120.000.000,-	
22	Pendapatan Sewa PT. BIT Teknologi Nusantara	10.000.000,00
23	Pendapatan Sewa PT. BIT Teknologi Nusantara	3.390.000,00
24	Pendapatan Sewa PT. Telkom	6.750.000,00
25	Pendapatan Sewa PT. Indonesia Comnets Plus	8.712.000,00
26	Pendapatan Sewa PT. Indonesia Comnets Plus	180.000.000,00
27	Pendapatan Sewa PT. Nindya Karya	90.450.000,00
28	Pendapatan sewa lahan PT Bersama Maju Service	394.104.871,00
29	Pendapatan Sewa PT Nindya Karya	675.000,00
30	Pendapatan Sewa PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	70.326.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.021.428.922.138</b>

Piutang dari kegiatan operasional PPKK merupakan piutang atas jasa utilitas, piutang kerjasama, piutang jasa sewa, dan piutang pengembalian yang telah diberikan haknya dan belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal neraca.

*Piutang dari  
Kegiatan Non  
Operasional  
BLU  
Rp563.190.  
095,00*

### **C.9 Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU**

Saldo Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp563.190.095,00. Tidak terdapat kenaikan atau penurunan piutang. Penyisihan Piutang Dari Kegiatan Non Operasional BLU per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp563.190.095,00, sehingga saldo Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU (Neto) per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp0,00.

Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU terdapat pada Satker PPKGBK. Piutang tersebut berupa piutang dari Panitia Gebyar Budaya Merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia sebesar Rp563.190.095,00 dan telah dilimpahkan kewenangannya dengan nomor surat B.113/PPKGBK/Dirut/05/2012 tanggal 31 Mei 2012.

*Persediaan  
Rp1.074.607.7  
11.711,00*

### **C.10 Persediaan**

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.074.607.711.711,00 dan Rp1.074.688.059.576,00. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Dibandingkan per 31 Desember 2022,

Persediaan per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp80.347.865,00 atau 0,01 persen.

Persediaan Kementerian Sekretariat Negara diperoleh dari hasil *opname* fisik/inventarisasi dari masing-masing satuan kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 untuk masing-masing Satker di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara adalah sebagai berikut:

**Perbandingan Saldo Persediaan Berdasarkan Satker  
Per 31 Desember 2023 dan 2022**

Satker	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(penurunan)	
			Rp	%
Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara	1.029.130.916.852,00	1.018.040.777.608,00	11.090.139.244,00	1,09
Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno	455.526.946,00	347.769.372,00	107.757.574,00	30,99
Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran	1.806.323.333,00	625.722.135,00	1.180.601.198,00	188,68
Istana Kepresidenan Jakarta	4.034.926.632,00	6.122.504.823,00	(2.087.578.191,00)	(34,10)
Istana Kepresidenan Bogor	2.193.421.658,00	2.887.962.190,00	(694.540.532,00)	(24,05)
Istana Kepresidenan Cipanas	2.698.010.306,00	2.590.891.056,00	107.119.250,00	4,13
Istana Kepresidenan Yogyakarta	572.857.039,00	5.720.470.142,00	(5.147.613.103,00)	(89,99)
Istana Kepresidenan Tampaksiring Bali	4.873.696.530,00	4.744.681.345,00	129.015.185,00	2,72
Sekretariat Wakil Presiden	4.262.378.286,00	4.898.184.787,00	(635.806.501,00)	(12,98)
Sekretariat Militer Presiden	22.700.205.481,00	26.386.144.069,00	(3.685.938.588,00)	(13,97)
Pasukan Pengamanan Presiden	785.373.852,00	1.069.057.656,00	(283.683.804,00)	(26,54)
Dewan Pertimbangan Presiden	694.151.046,00	898.887.293,00	(204.736.247,00)	(22,78)
Kantor Staf Presiden	399.923.750,00	355.007.100,00	44.916.650,00	12,65
<b>Jumlah</b>	<b>1.074.607.711.711,00</b>	<b>1.074.688.059.576,00</b>	<b>(80.347.865,00)</b>	<b>(0,01)</b>

Rincian saldo Persediaan berdasarkan jenis Persediaan pada Kementerian  
Sekretariat Negara per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:  
**Perbandingan Saldo Persediaan Berdasarkan Jenis Persediaan  
Per 31 Desember 2023 dan 2022**

Jenis Persediaan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(penurunan)	
			Rp	%
Barang Konsumsi	16.145.588.037,00	18.728.578.512,00	(2.582.990.475,00)	(13,79)
Bahan untuk Pemeliharaan	15.909.453.355,00	16.335.176.542,00	(425.723.187,00)	(2,61)
Suku Cadang	711.877.941.389,00	709.289.834.263,00	2.588.107.126,00	0,36
Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada	301.731.447.500,00	301.731.447.500,00	0,00	100,00
Aset tetap Lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada	1.645.500.000,00	0,00	1.645.500.000,00	N/A
Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	21.750.404.380,00	25.564.279.603,00	(3.813.875.223,00)	(14,92)
Persediaan Lainnya untuk Diserahkan ke Masyarakat	2.584.977.988,00	0,00	2.584.977.988,00	N/A
Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	18.466.000,00	36.255.035,00	(17.789.035,00)	100,00
Bahan Baku	653.033.718,00	449.966.690,00	203.067.028,00	45,13
Persediaan Lainnya	2.290.899.344,00	2.552.521.431,00	(261.622.087,00)	(10,25)
<b>Jumlah</b>	<b>1.074.607.711.711,00</b>	<b>1.074.688.059.576,00</b>	<b>(80.347.865,00)</b>	<b>(0,01)</b>

Penjelasan atas persediaan antara lain:

- a. Kebijakan pimpinan Istana Kepresidenan Yogyakarta untuk tidak membukukan barang-barang tertentu yang dinilai mudah rusak/hilang seperti pecah belah dan linen sebagai Persediaan. Hal ini dikarenakan sulitnya melakukan penelusuran atas barang-barang tersebut terutama dalam rangka mendukung pelayanan terhadap VVIP dan tamu-tamu VIP lainnya.
- b. Penggunaan akun belanja khusus COVID-19 termasuk pada Persediaan tidak lagi diterapkan mulai Semester II Tahun 2023 sesuai dengan Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-24/PB/PB.6/2023 tanggal 24 Agustus 2023 hal Penggunaan Akun Khusus COVID-19.
- c. Tanah dan bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat pada Satker Setkemensetneg merupakan penyediaan tanah dan bangunan bagi Presiden berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2020 tentang Penyediaan, Standar Kelayakan dan Perhitungan Nilai Rumah Kediaman bagi Mantan Presiden dan atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Tanah  
Rp586.178.916.553.093,00

### C.11 Tanah

Saldo Tanah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp586.178.916.553.093,00 dan Rp585.216.320.466.093,00. Dibandingkan per 31 Desember 2022, nilai tanah per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp962.596.087.000,00 atau sebesar 0,16 persen. Mutasi nilai tanah dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp</b>	<b>585.216.320.466.093,00</b>
<b>Mutasi Tambah:</b>	<b>Rp</b>	<b>1.156.518.772.000,00</b>
Transfer Masuk	Rp	1.156.518.772.000,00
<b>Mutasi Kurang:</b>	<b>Rp</b>	<b>(193.922.685.000,00)</b>
Koreksi Pencatatan	Rp	(193.922.685.000,00)
<b>Nilai Perolehan Per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>586.178.916.553.093,00</b>
Akumulasi penyusutan	Rp	-
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>586.178.916.553.093,00</b>

Mutasi tambah sebesar Rp1.156.518.772.000,00 merupakan transfer masuk tanah bangunan kantor pemerintahan dari Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan berdasarkan BAST Nomor BA-33/M.K1/SJ.7/2023.

Mutasi kurang sebesar Rp193.922.685.000,00 merupakan koreksi pencatatan tanah bangunan kantor pemerintahan dari Tanah Mess Kowad di Tanah Abang Timur 9 karena pencatatan ganda dengan Mabes TNI AD.

Rincian Aset Tanah berdasarkan Satuan Kerja dapat dilihat pada tabel berikut:

#### Perbandingan Tanah Berdasarkan Satker Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Satker	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ penurunan	
			Rp	%
Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara	119.637.020.663.453,00	118.674.424.576.453,00	962.596.087.000,00	0,81
Sekretariat Wakil Presiden	188.976.984.000,00	188.976.984.000,00	0,00	0,00
Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (GBK)	323.768.471.293.640,00	323.768.471.293.640,00	0,00	0,00
Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran	142.584.447.612.000,00	142.584.447.612.000,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>586.178.916.553.093,00</b>	<b>585.216.320.466.093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Menindaklanjuti PMK No. 85/PMK.05/2023 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruar Nomor 17, terdapat Properti Investasi berupa Tanah sebesar Rp.85.675.576.582.436,00 yang belum dapat

direklasifikasi karena aplikasi SAKTI belum mengakomodir pemisahan luas lahan sehingga masih tercatat sebagai Aset Tetap.

Peralatan dan  
Mesin  
Rp4.620.753.  
299.191,00

### C.12 Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp4.620.753.299.191,00 dan Rp4.312.341.973.278,00. Dibandingkan per 31 Desember 2023, nilai Peralatan dan Mesin pada 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp308.411.325.913,00 atau 7,15 persen. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp</b>	<b>4.312.341.973.278,00</b>
<b>Mutasi Tambah:</b>	<b>Rp</b>	<b>515.429.919.205,00</b>
Pembelian	Rp	297.844.728.842,00
Batal Transfer Keluar	Rp	5.950.699.662,00
Hibah Masuk	Rp	1.428.831.999,00
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	Rp	1.623.852.197,00
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	Rp	3.821.176.247,00
Koreksi Saldo Awal	Rp	95.297.184.199,00
Transfer Masuk	Rp	26.213.695.076,00
Reklasifikasi Masuk	Rp	3.501.192.900,00
Pengembangan Melalui KDP	Rp	32.272.810.331,00
Perolehan Lainnya	Rp	61.673.300,00
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	Rp	47.414.074.452,00
<b>Mutasi Kurang:</b>	<b>Rp</b>	<b>(207.018.593.292,00)</b>
Koreksi Pencatatan	Rp	(201.813.610,00)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	Rp	(170.862.972,00)
Koreksi Susulan	Rp	(524.417,00)
Penghentian Aset Dari Penggunaan	Rp	(178.611.042.104,00)
Transfer Keluar	Rp	(12.864.245.330,00)
Reklasifikasi Keluar	Rp	(15.170.104.859,00)
<b>Nilai Perolehan Per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>4.620.753.299.191,00</b>
Akumulasi penyusutan	Rp	(3.431.887.746.910)
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>1.188.865.552.281,00</b>

Mutasi tambah Peralatan dan Mesin sebesar Rp515.429.919.205,00 dijelaskan sebagai berikut:

- Pembelian dengan total nilai sebesar Rp297.844.728.842,00, antara lain berupa:
  - Alat besar sebesar Rp746.438.248,00.
  - Alat angkutan sebesar Rp63.980.418.133,00.
  - Alat bengkel dan alat ukur sebesar Rp232.964.468,00.
  - Alat pertanian sebesar Rp34.770.100,00.
  - Alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp110.625.627.421,00.
  - Alat studio, komunikasi dan pemancar sebesar Rp29.419.999.084,00.

- Alat kedokteran dan kesehatan sebesar Rp801.291.446,00.
  - Alat laboratorium sebesar Rp371.647.577,00.
  - Alat persenjataan sebesar Rp34.355.000,00.
  - Komputer sebesar Rp91.251.533.341,00.
  - Alat keselamatan kerja sebesar Rp16.650.000,00.
  - Peralatan proses/produksi sebesar Rp21.077.625,00.
  - Peralatan olah raga sebesar Rp307.956.399,00.
- Batal Transfer Keluar dengan total nilai sebesar Rp5.950.699.662,00 antara lain berupa:
- Alat angkutan sebesar Rp485.836.495,00.
  - Alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp4.604.344.567,00.
  - Alat kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp33.220.000,00.
  - Alat laboratorium sebesar Rp216.700.000,00.
  - Komputer sebesar Rp58.799.600,00.
  - Alat keselamatan kerja sebesar Rp319.000.000,00.
  - Peralatan olah raga sebesar Rp232.799.000,00.
- Hibah Masuk dengan total nilai sebesar Rp1.428.831.999,00 berdasarkan SPTMHL Nomor 09/SWP/D-4/04/2023 berupa:
- Alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp151.605.000,00.
  - Alat studio, komunikasi dan pemancar sebesar Rp76.949.000,00.
  - Komputer sebesar Rp1.199.177.999,00.
  - Peralatan proses/produksi sebesar Rp1.100.000,00.
- Pengembangan Nilai Aset (Langsung) dengan total nilai sebesar Rp1.623.852.197,00 antara lain berupa:
- Alat angkutan sebesar Rp1.031.504.000,00.
  - Alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp501.412.197,00.
  - Alat kedokteran dan kesehatan sebesar Rp14.800.000,00.
  - Komputer sebesar Rp76.136.000,00.
- Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif dengan total nilai sebesar Rp3.821.176.247,00 berupa:
- Alat angkutan sebesar Rp614.040.400,00.
  - Alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp1.823.967.297,00.
  - Alat studio, komunikasi dan pemancar sebesar Rp12.499.000,00.
  - Alat kedokteran dan kesehatan sebesar Rp3.951.000,00.
  - Alat persenjataan sebesar Rp102.602.000,00.
  - Komputer sebesar Rp1.264.116.550,00.
- Koreksi Saldo Awal dengan total nilai sebesar Rp95.297.184.199,00 antara lain berupa:
- Alat besar sebesar Rp57.165.323.600,00.
  - Alat angkutan sebesar Rp356.443.500,00.

- Alat bengkel dan alat ukur sebesar Rp558.937.500,00.
  - Alat pertanian sebesar Rp163.598.900,00.
  - Alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp30.123.213.942,00.
  - Alat studio, komunikasi dan pemancar sebesar Rp2.262.422.072,00.
  - Alat kedokteran dan kesehatan sebesar Rp192.645.500,00.
  - Alat laboratorium sebesar Rp1.788.518.000,00.
  - Alat persenjataan sebesar Rp27.000.000,00.
  - Komputer sebesar Rp2.331.612.985,00.
  - Alat eksplorasi sebesar Rp101.820.600,00.
  - Alat keselamatan kerja sebesar Rp1.499.100,00.
  - Alat peraga sebesar Rp3.000.000,00.
  - Peralatan proses/produksi sebesar Rp216.148.500,00.
  - Peralatan olah raga sebesar Rp5.000.000,00.
- Transfer Masuk dengan total nilai sebesar Rp26.213.695.076,00 berupa:
- Alat besar sebesar Rp14.966.164.904,00.
  - Alat angkutan sebesar Rp4.466.207.321,00.
  - Alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp5.663.020.351,00.
  - Alat studio, komunikasi dan pemancar sebesar Rp14.652.000,00.
  - Alat kedokteran dan kesehatan sebesar Rp33.220.000,00.
  - Alat laboratorium sebesar Rp213.180.000,00.
  - Alat persenjataan sebesar Rp102.602.000,00.
  - Komputer sebesar Rp267.165.000,00.
  - Alat keselamatan kerja sebesar Rp319.000.000,00.
  - Peralatan olah raga sebesar Rp168.483.500,00.
- Reklasifikasi Masuk dengan total nilai sebesar Rp3.501.192.900,00 berupa:
- Alat angkutan sebesar Rp3.265.000.000,00.
  - Alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp140.520.000,00.
  - Komputer sebesar Rp95.672.900,00.
- Pengembangan Melalui KDP dengan total nilai sebesar Rp32.272.810.331,00 berupa Alat angkutan.
- Perolehan Lainnya dengan total nilai sebesar Rp61.673.000,00 berupa Alat kantor dan rumah tangga.
- Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP dengan total nilai sebesar Rp47.414.074.452,00 antara lain berupa:
- Alat angkutan sebesar Rp5.454.593.654,00.
  - Alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp5.792.624.000,00.
  - Alat studio, komunikasi dan pemancar sebesar Rp3.741.976.500,00
  - Alat laboratorium sebesar Rp6.052.314.065,00.
  - Komputer sebesar Rp104.340.000,00.
  - Alat keselamatan kerja sebesar Rp26.268.226.233,00.

Mutasi kurang Peralatan dan Mesin sebesar Rp207.018.593.292,00 dijelaskan sebagai berikut:

- Koreksi Pencatatan dengan total nilai sebesar Rp201.813.610,00 antara lain berupa:
  - Alat pertanian sebesar Rp134.298.900,00.
  - Alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp65.259.710,00.
  - Alat studio, komunikasi dan pemancar sebesar Rp2.255.000,00.
- Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang dengan total nilai sebesar Rp170.862.972,00 berupa:
  - Alat laboratorium sebesar Rp167.460.365,00.
  - Alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp3.402.607,00.
- Koreksi Susulan dengan total nilai sebesar Rp524.417,00 berupa alat kantor dan rumah tangga.
- Penghentian Aset dari Penggunaan dengan total nilai sebesar Rp178.611.042.104,00 berupa:
  - Alat besar sebesar Rp3.069.134.645,00.
  - Alat angkutan sebesar Rp3.323.400.505,00.
  - Alat bengkel dan alat ukur sebesar Rp3.950.000,00.
  - Alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp109.055.196.658,00.
  - Alat studio, komunikasi dan pemancar sebesar Rp2.703.884.210,00.
  - Alat kedokteran dan kesehatan sebesar Rp19.526.000,00.
  - Alat laboratorium sebesar Rp9.570.000,00.
  - Komputer sebesar Rp35.300.465.086,00.
  - Alat persenjataan sebesar Rp25.054.020.000,00.
  - Alat keselamatan kerja sebesar Rp71.895.000,00.
- Transfer Keluar dengan total nilai sebesar Rp12.864.245.330,00 berupa:
  - Alat angkutan sebesar Rp1.303.112.996,00.
  - Alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp9.582.311.234,00.
  - Alat studio, komunikasi dan pemancar sebesar Rp14.652.000,00.
  - Alat kedokteran dan kesehatan sebesar Rp66.440.000,00.
  - Alat persenjataan sebesar Rp102.602.000,00.
  - Alat laboratorium sebesar Rp429.880.000,00.
  - Komputer sebesar Rp325.964.600,00.
  - Alat keselamatan kerja sebesar Rp638.000.000,00.
  - Peralatan olah raga sebesar Rp401.282.500,00.
- Reklasifikasi Keluar dengan total nilai sebesar Rp15.170.104.859,00 berupa:
  - Alat besar sebesar Rp11.804.431.959,00.
  - Alat angkutan sebesar Rp3.265.000.000,00.
  - Alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp5.000.000,00.
  - Komputer sebesar Rp95.672.900,00.

Rincian Aset Peralatan dan Mesin berdasarkan Satuan Kerja dapat dilihat pada tabel berikut:

**Perbandingan Peralatan dan Mesin Berdasarkan Satker  
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Satker	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(penurunan)	
			Rp	%
Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara	2.742.349.983.289,00	2.521.925.706.888,00	220.424.276.401,00	8,74
Istana Kepresidenan Jakarta	382.469.615.164,00	343.791.985.721,00	38.677.629.443,00	11,25
Istana Kepresidenan Bogor	73.332.900.944,00	63.878.406.268,00	9.454.494.676,00	14,80
Istana Kepresidenan Yogyakarta	54.090.830.589,00	56.134.458.992,00	(2.043.628.403,00)	(3,64)
Istana Kepresidenan Tampaksiring	49.637.157.153,00	47.391.375.599,00	2.245.781.554,00	4,74
Istana Kepresidenan Cipanas	40.984.141.123,00	40.043.365.884,00	940.775.239,00	2,35
Sekretariat Wakil Presiden	224.044.411.952,00	211.461.868.653,00	12.582.543.299,00	5,95
Sekretariat Militer Presiden	13.508.748.342,00	13.602.063.767,00	(93.315.425,00)	(0,69)
Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (GBK)	802.735.216.879,00	769.084.622.825,00	33.650.594.054,00	4,38
Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran	62.887.325.087,00	59.347.243.417,00	3.540.081.670,00	5,97
Pasukan Pengamanan Presiden	82.182.438.957,00	108.708.952.957,00	(26.526.514.000,00)	(24,40)
Dewan Pertimbangan Presiden	12.325.635.180,00	11.050.230.392,00	1.275.404.788,00	11,54
Kantor Staf Presiden	80.204.894.532,00	65.921.691.915,00	14.283.202.617,00	21,67
<b>Jumlah</b>	<b>4.620.753.299.191,00</b>	<b>4.312.341.973.278,00</b>	<b>308.411.325.913,00</b>	<b>7,15</b>

Gedung dan  
Bangunan  
Rp6.587.560.  
322.969,00

### C.13 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp6.587.560.322.969,00 dan Rp6.529.159.343.839,00. Dibandingkan per 31 Desember 2022, nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp58.400.979.130,00 atau 0,89 persen. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp</b>	<b>6.529.159.343.839,00</b>
<b>Mutasi Tambah:</b>	<b>Rp</b>	<b>706.875.139.077,00</b>
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	Rp	310.215.096.825,00
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	Rp	6.740.675.875,00
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	Rp	5.527.867.000,00
Reklasifikasi dari Aset Kemitraan ke Aset Tetap	Rp	143.056.736.000,00
Koreksi Saldo Awal	Rp	41.556.194.000,00
Perolehan Lainnya	Rp	183.605.114.000,00
Pembelian	Rp	177.347.000,00
Hibah Masuk	Rp	3.347.563.478,00
Transfer Masuk	Rp	168.091.000,00
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	Rp	2.504.744.978,00
Koreksi Susulan	Rp	554.345.000,00
Pengembangan Melalui KDP	Rp	9.421.363.921,00
<b>Mutasi Kurang:</b>	<b>Rp</b>	<b>(648.474.159.947,00)</b>
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	Rp	(14.317.500,00)
Koreksi Pencatatan	Rp	(188.677.000,00)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	Rp	(30.817.000,00)
Perubahan BMN ke Aset Kemitraan	Rp	(424.287.157.260,00)
Transfer Keluar	Rp	(168.091.000,00)
Perubahan BMN Ke PI	Rp	(223.785.100.187,00)
<b>Nilai Perolehan Per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>6.587.560.322.969,00</b>
Akumulasi penyusutan	Rp	(1.485.791.263.111,00)
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>5.101.769.059.858,00</b>

Mutasi tambah Gedung dan Bangunan sebesar Rp706.875.139.077,00 dijelaskan sebagai berikut:

- Penerimaan Aset Tetap Renovasi dengan total nilai sebesar Rp310.215.096.825,00 antara lain berupa:
  - Bangunan gedung sebesar Rp284.175.206.811,00.
  - Monumen sebesar Rp25.865.181.147,00.
  - Tugu titik kontrol/pasti sebesar Rp174.708.867,00.
- Pengembangan Nilai Aset dengan total nilai sebesar Rp6.740.675.875,00 antara lain berupa:
  - Bangunan gedung sebesar Rp6.740.675.875,00.
- Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif dengan total nilai sebesar Rp5.527.867.000,00 berupa bangunan Gedung.
- Reklasifikasi dari Aset Kemitraan ke Aset Tetap dengan total nilai sebesar Rp143.056.736.000,00 antara lain berupa:
  - Bangunan gedung sebesar Rp138.473.712.000,00.
  - Monumen sebesar Rp4.583.024.000,00.
  - Tugu titik kontrol/pasti sebesar Rp555.531.000,00.
- Koreksi Saldo Awal dengan total nilai sebesar Rp41.556.194.000,00 berupa bangunan Gedung.

- Perolehan Lainnya dengan total nilai sebesar Rp183.605.114.000,00 berupa bangunan gedung.
- Pembelian dengan total nilai sebesar Rp177.347.000,00 berupa bangunan gedung.
- Hibah Masuk dengan total nilai sebesar Rp3.347.563.478,00 berupa bangunan gedung.
- Transfer Masuk dengan total nilai sebesar Rp168.091.000,00 berupa bangunan gedung.
- Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah dengan total nilai sebesar Rp2.504.744.978,00 berupa bangunan gedung.
- Koreksi Susulan dengan total nilai sebesar Rp554.345.000,00 berupa bangunan gedung.
- Pengembangan melalui KDP dengan total nilai sebesar Rp9.421.363.921,00 antara lain berupa:
  - Bangunan gedung sebesar Rp7.109.745.918,00.
  - Tugu titik kontrol/pasti sebesar Rp2.311.618.003,00.

Mutasi kurang Gedung dan Bangunan sebesar Rp648.474.159.947,00 dijelaskan sebagai berikut:

- Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang dengan total nilai sebesar Rp14.317.500,00 berupa bangunan gedung.
- Koreksi Pencatatan dengan total nilai sebesar Rp188.677.000,00 berupa bangunan Gedung.
- Penghentiaan Aset Dari Penggunaan dengan total nilai sebesar Rp30.817.000,00 berupa bangunan gedung.
- Perubahan BMN ke Aset Kemitraan dengan total nilai sebesar Rp424.287.157.260,00 antara lain berupa:
  - Bangunan gedung sebesar Rp393.108.712.246,00.
  - Monumen sebesar Rp30.448.205.147,00.
  - Tugu titik kontrol/pasti sebesar Rp730.239.867,00.
- Transfer Keluar dengan total nilai sebesar Rp168.091.000,00 berupa bangunan gedung.
- Perubahan BMN Ke PI dengan total nilai sebesar Rp223.785.100.187,00 berupa bangunan gedung.

Rincian Aset Gedung dan Bangunan berdasarkan Satuan Kerja dapat dilihat pada tabel berikut:

### Rincian Gedung dan Bangunan Berdasarkan Satker Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Satker	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(penurunan)	
			Rp	%
Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara	2.716.512.092.129,00	2.645.705.673.064,00	70.806.419.065,00	2,68
Istana Kepresidenan Jakarta	184.061.592.087,00	178.101.627.221,00	5.959.964.866,00	3,35
Istana Kepresidenan Bogor	173.203.437.051,00	172.044.828.551,00	1.158.608.500,00	0,67
Istana Kepresidenan Yogyakarta	86.008.590.002,00	84.887.752.002,00	1.120.838.000,00	1,32
Istana Kepresidenan Tampaksiring	110.382.402.057,00	107.876.644.156,00	2.505.757.901,00	2,32
Istana Kepresidenan Cipanas	65.750.112.192,00	63.315.563.989,00	2.434.548.203,00	3,85
Sekretariat Wakil Presiden	95.759.929.702,00	94.749.055.366,00	1.010.874.336,00	1,07
Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (GBK)	2.847.196.755.002,00	2.873.802.042.743,00	-26.605.287.741,00	-0,93
Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran	308.685.412.747,00	308.508.065.747,00	177.347.000,00	0,06
Kantor Staf Presiden	0,00	168.091.000,00	-168.091.000,00	-100,00
<b>Jumlah</b>	<b>6.587.560.322.969,00</b>	<b>6.529.159.343.839,00</b>	<b>58.400.979.130,00</b>	<b>0,89</b>

Jalan, Irigasi  
dan Jaringan  
Rp997.161.39  
5.979,00

#### C.14 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp997.161.395.979,00 dan Rp897.641.015.005,00. Dibandingkan per 31 Desember 2022, nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp99.520.380.974,00 atau 11,09 persen. Mutasi nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp</b>	<b>897.641.015.005,00</b>
<b>Mutasi Tambah:</b>	<b>Rp</b>	<b>516.352.528.971,00</b>
Koreksi Manual	Rp	3.036.072.000,00
Pengembangan Melalui KDP	Rp	448.962.230,00
Pembelian	Rp	428.296.627,00
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	Rp	365.453.452.997,00
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	Rp	519.224.780,00
Reklasifikasi Dari Aset Kemitraan ke Aset Tetap	Rp	50.509.886.000,00
Transfer Masuk	Rp	59.322.302.184,00
Reklasifikasi Masuk	Rp	11.668.911.959,00
Perolehan Lainnya	Rp	24.965.420.194,00
<b>Mutasi Kurang:</b>	<b>Rp</b>	<b>(416.832.147.997,00)</b>
Koreksi Pencatatan	Rp	(3.036.072.000,00)
Perubahan BMN ke Aset Kemitraan	Rp	(413.796.075.997,00)
<b>Nilai Perolehan Per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>997.161.395.979,00</b>
Akumulasi penyusutan	Rp	(488.848.827.256,00)
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>508.312.568.723,00</b>

Mutasi tambah Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp516.352.528.971,00 dijelaskan sebagai berikut:

- Koreksi Manual dengan total nilai sebesar Rp3.036.072.000,00 antara lain berupa:
  - Jalan dan jembatan sebesar Rp391.360.000,00.
  - Bangunan air sebesar Rp2.644.712.000,00.
- Pengembangan Melalui KDP dengan total nilai sebesar Rp448.962.230,00 berupa bangunan air.
- Pembelian dengan total nilai sebesar Rp428.296.627,00 berupa bangunan air.
- Penerimaan Aset Tetap Renovasi dengan total nilai sebesar Rp365.453.452.997,00 antara lain berupa:
  - Jalan dan jembatan sebesar Rp177.386.621.020,00.
  - Bangunan air sebesar Rp188.066.831.977,00
- Pengembangan Nilai Aset (Langsung) dengan total nilai sebesar Rp519.224.780,00 antara lain berupa:
  - Jalan dan jembatan sebesar Rp424.205.062,00.
  - Bangunan air sebesar Rp95.019.718,00
- Reklasifikasi Dari Aset Kemitraan ke Aset Tetap dengan total nilai sebesar Rp50.509.886.000,00 antara lain berupa:
  - Jalan dan jembatan sebesar Rp19.234.652.000,00.
  - Bangunan air sebesar Rp31.275.234.000,00.
- Transfer Masuk dengan total nilai sebesar Rp59.322.302.184,00 antara lain berupa:
  - Bangunan air sebesar Rp51.581.529.000,00.
  - Instalasi sebesar Rp823.400.041,00.
  - Jaringan sebesar Rp6.917.373.143,00.
- Reklasifikasi Masuk dengan total nilai sebesar Rp11.668.911.959,00 berupa instalasi.
- Perolehan Lainnya dengan total nilai sebesar Rp24.965.420.194,00 berupa:
  - Jalan dan jembatan sebesar Rp15.611.484.240,00.
  - Bangunan air sebesar Rp9.353.935.954,00.

Mutasi kurang Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp416.832.147.997,00 dijelaskan sebagai berikut:

- Koreksi Pencatatan dengan total nilai sebesar Rp3.036.072.000,00 antara lain berupa:
  - Jalan dan jembatan sebesar Rp391.360.000,00.
  - Bangunan air sebesar Rp2.644.712.000,00.
- Perubahan BMN ke Aset Kemitraan total nilai sebesar Rp413.796.075.997,00 antara lain berupa:
  - Jalan dan jembatan sebesar Rp194.454.010.020,00.
  - Bangunan air sebesar Rp219.342.065.977,00.

Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan berdasarkan Satuan Kerja dapat dilihat pada tabel berikut:

**Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan Berdasarkan Satker  
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Satker	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(penurunan)	
			Rp	%
Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara	48.259.509.058,00	48.259.509.058,00	0,00	0,00
Istana Kepresidenan Jakarta	72.754.072.753,00	70.586.809.753,00	2167263000,00	3,07
Istana Kepresidenan Bogor	11.414.178.582,00	11.414.178.582,00	0,00	0,00
Istana Kepresidenan Yogyakarta	2.062.872.630,00	1.992.020.630,00	70.852.000,00	3,56
Istana Kepresidenan Tampaksiring	21.506.576.420,00	21.506.576.420,00	0,00	0,00
Istana Kepresidenan Cipanas	13.676.337.145,00	13.676.337.145,00	0,00	0,00
Sekretariat Wakil Presiden	3.138.252.467,00	3.138.252.467,00	0,00	0,00
Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (GBK)	113.665.629.816,00	106.897.681.201,00	6.767.948.615,00	6,33
Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran	710.683.967.108,00	620.169.649.749,00	90.514.317.359,00	14,60
<b>Jumlah</b>	<b>997.161.395.979,00</b>	<b>897.641.015.005,00</b>	<b>99.520.380.974,00</b>	<b>11,09</b>

Aset Tetap  
Lainnya  
Rp3.214.802.  
904.770,00

### C.15 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp3.214.802.904.770,00 dan Rp3.214.951.526.176,00. Dibandingkan per 31 Desember 2022, Aset Tetap Lainnya pada 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp148.621.406,00 atau 0,00 persen. Aset Tetap Lainnya terdiri dari:

- a. Aset Tetap Lainnya sebesar Rp3.210.493.086.088,00. Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp</b>	<b>3.207.394.265.788,00</b>
<b>Mutasi Tambah:</b>	<b>Rp</b>	<b>3.204.883.080,00</b>
Batal Transfer Keluar	Rp	36.827.390,00
Pembelian	Rp	305.943.800,00
Perolehan Lainnya	Rp	1.388.000.000,00
Koreksi Saldo Awal	Rp	1.405.034.500,00
Transfer Masuk	Rp	69.077.390,00
<b>Mutasi Kurang:</b>	<b>Rp</b>	<b>(106.062.780,00)</b>
Transfer Keluar	Rp	(105.904.780,00)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	Rp	(158.000,00)
<b>Nilai Perolehan Per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>3.210.493.086.088,00</b>
Akumulasi penyusutan	Rp	(4.945.012.487,00)
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>3.205.548.073.601,00</b>

Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya sebesar Rp3.204.883.080,00 dijelaskan sebagai berikut:

- Batal Transfer Keluar dengan total nilai Rp36.827.390,00 antara lain berupa:
  - Bahan perpustakaan sebesar Rp10.750.000,00.
  - Barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga sebesar Rp26.077.390,00.
- Pembelian dengan total nilai sebesar Rp305.943.800,00 antara lain berupa:
  - Bahan perpustakaan sebesar Rp129.388.000,00.
  - Barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga sebesar Rp176.555.800,00.
- Perolehan Lainnya dengan total nilai sebesar Rp1.388.000.000,00 antara lain berupa Barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga sebesar Rp1.338.000.000,00.
- Koreksi Saldo Awal dengan total nilai sebesar Rp1.405.034.500,00 antara lain berupa:
  - Bahan perpustakaan sebesar Rp67.000.000,00.
  - Barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga sebesar Rp1.338.034.500,00.
- Transfer Masuk dengan total nilai sebesar Rp69.077.390,00 antara lain berupa:
  - Bahan perpustakaan sebesar Rp43.000.000,00.
  - Barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga sebesar Rp26.077.390,00.

Mutasi kurang Aset Tetap Lainnya sebesar Rp106.062.780,00 dijelaskan sebagai berikut:

- Transfer Keluar dengan total nilai sebesar Rp105.904.780,00 antara lain berupa:
  - Bahan perpustakaan sebesar Rp53.750.000,00 terdapat pada Satker Istana Kepresidenan Jakarta berupa monografi.
  - Barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga sebesar Rp52.154.780,00 terdapat pada Satker Istana Kepresidenan Jakarta berupa alat music modern/band.
- Penghentian aset dari penggunaan dengan total nilai sebesar Rp158.000,00 berupa monografi

Rincian Aset Tetap Lainnya berdasarkan Satuan Kerja dapat dilihat pada tabel berikut:

**Perbandingan Aset Tetap Lainnya Berdasarkan Satker  
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Satker	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(penurunan)	
			Rp	%
Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara	6.486.755.689,00	3.568.736.189,00	2.918.019.500,00	81,77
Istana Kepresidenan Jakarta	311.089.517.900,00	311.036.690.290,00	52.827.610,00	0,02
Istana Kepresidenan Bogor	644.151.389.005,00	644.100.665.815,00	50.723.190,00	0,01
Istana Kepresidenan Yogyakarta	2.118.451.548.284,00	2.118.440.798.284,00	10.750.000,00	0,00
Istana Kepresidenan Tampaksiring Bali	74.099.540.505,00	74.088.790.505,00	10.750.000,00	0,01
Istana Kepresidenan Cipanas	44.704.399.185,00	44.693.649.185,00	10.750.000,00	0,02
Sekretariat Wakil Presiden	3.747.438.372,00	3.702.438.372,00	45.000.000,00	1,22
Sekretariat Militer Presiden	1.954.920.000,00	1.954.920.000,00	0,00	0,00
Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno	549.783.053,00	549.783.053,00	0,00	0,00
Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran	1.074.636.350,00	1.074.636.350,00	0,00	0,00
Pasukan Pengamanan Presiden	3.770.387.500,00	3.770.387.500,00	0,00	0,00
Dewan Pertimbangan Presiden	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00
Kantor Staf Presiden	410.870.245,00	410.870.245,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.210.493.086.088,00</b>	<b>3.207.394.265.788,00</b>	<b>3.098.820.300,00</b>	<b>0,10</b>

- b. Aset Tetap Renovasi sebesar Rp4.309.818.682,00. Mutasi nilai Aset Tetap Renovasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp</b>	<b>7.557.260.388,00</b>
<b>Mutasi Tambah:</b>	<b>Rp</b>	<b>10.554.708.350,00</b>
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	Rp	2.870.040.775,00
Pembelian	Rp	847.127.542,00
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	Rp	167.460.365,00
Transfer Masuk	Rp	6.473.997.280,00
Batal Transfer Keluar	Rp	196.082.388,00
<b>Mutasi Kurang:</b>	<b>Rp</b>	<b>(13.802.150.056,00)</b>
Transfer Keluar	Rp	(392.164.776,00)
Koreksi Pencatatan	Rp	(13.409.985.280,00)
<b>Nilai Perolehan Per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>4.309.818.682,00</b>
Akumulasi penyusutan	Rp	-
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>4.309.818.682,00</b>

Mutasi tambah Aset Tetap Renovasi sebesar Rp10.554.708.350,00 dijelaskan sebagai berikut:

- Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP dengan total nilai sebesar Rp2.870.040.775,00 berupa jalan, irigasi, dan jaringan dalam renovasi.
- Pembelian dengan total nilai sebesar Rp847.127.542,00 berupa:
  - Gedung dan bangunan dalam renovasi sebesar Rp831.627.542,00.
  - Aset tetap lainnya dalam renovasi sebesar Rp15.500.000,00.
- Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah dengan total nilai sebesar Rp167.460.365,00 berupa gedung dan bangunan dalam renovasi.
- Transfer Masuk dengan total nilai sebesar Rp6.473.997.280,00 berupa jalan, irigasi, dan jaringan dalam renovasi.
- Batal Transfer Keluar dengan total nilai sebesar Rp196.082.388,00 berupa Gedung dan bangunan dalam renovasi.

Mutasi kurang Aset Tetap Renovasi sebesar Rp13.802.150.056,00 dijelaskan sebagai berikut:

- Transfer Keluar dengan total nilai sebesar Rp392.164.776,00 berupa Gedung dan bangunan dalam renovasi.
- Koreksi Pencatatan dengan total nilai sebesar dengan total nilai sebesar Rp13.409.985.280,00 berupa:
  - Gedung dan bangunan dalam renovasi sebesar Rp3.426.576.000,00.
  - Jalan, irigasi, dan jaringan dalam renovasi sebesar Rp9.983.409.280,00.

Rincian Aset Tetap Renovasi berdasarkan Satuan Kerja dapat dilihat pada tabel berikut:

**Perbandingan Aset Tetap Renovasi Berdasarkan Satker  
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Satker	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(penurunan)	
			Rp	%
Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara	314.040.000,00	7.250.028.000,00	(6.935.988.000,00)	(95,67)
Istana Kepresidenan Jakarta	561.359.542,00	307.232.388,00	254.127.154,00	82,71
PPK Gelora Bung Karno	3.037.501.140,00	0,00	3.037.501.140,00	100,00
Dewan Pertimbangan	396.918.000,00	0,00	396.918.000,00	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.309.818.682,00</b>	<b>7.557.260.388,00</b>	<b>(3.247.441.706,00)</b>	<b>(42,97)</b>

*Konstruksi  
Dalam  
Pengerjaan  
Rp12.305.312  
.233,00*

**C.16 Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Saldo nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp12.305.312.233,00 dan Rp6.422.903.773,00. Dibandingkan per 31 Desember 2022, Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp5.882.408.460,00 atau 91,58 persen. Mutasi nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp</b>	<b>6.422.903.773,00</b>
<b>Mutasi Tambah:</b>	<b>Rp</b>	<b>109.490.156.829,00</b>
Perolehan/Penambahan KDP	Rp	55.706.533.714,00
Pengembangan KDP	Rp	45.655.395.494,00
Batal Transfer Keluar KDP	Rp	1.946.546.423,00
Reklasifikasi Masuk KDP	Rp	4.235.134.775,00
Transfer Masuk KDP	Rp	1.946.546.423,00
<b>Mutasi Kurang:</b>	<b>Rp</b>	<b>(103.607.748.369,00)</b>
Transfer Keluar KDP	Rp	(3.893.092.846,00)
Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	Rp	(92.427.251.709,00)
Koreksi Nilai KDP Berkurang	Rp	(3.052.269.039,00)
Reklasifikasi Keluar KDP	Rp	(4.235.134.775,00)
<b>Nilai Perolehan Per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>12.305.312.233,00</b>
Akumulasi penyusutan	Rp	0,00
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>12.305.312.233,00</b>

Mutasi tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp109.490.156.829,00 dijelaskan sebagai berikut:

- Perolehan/Penambahan KDP dengan total nilai sebesar Rp55.706.533.714,00 antara lain berupa:
  - Peralatan dan mesin dalam pengerjaan sebesar Rp48.463.038.435,00.
  - Gedung dan bangunan dalam pengerjaan sebesar Rp6.811.669.111,00.
  - Irigasi dalam pengerjaan sebesar Rp430.002.168,00.
  - Jaringan dalam pengerjaan sebesar Rp1.824.000,00.
- Pengembangan KDP dengan total nilai sebesar Rp45.655.395.494,00 antara lain berupa:
  - Peralatan dan mesin dalam pengerjaan sebesar Rp29.858.752.348,00.
  - Gedung dan bangunan dalam pengerjaan sebesar Rp14.414.413.084,00.
  - Irigasi dalam pengerjaan sebesar Rp18.960.062,00.
  - Jaringan dalam pengerjaan sebesar Rp1.363.270.000,00.
- Batal Transfer Keluar KDP dengan total nilai sebesar Rp1.946.546.423,00 berupa gedung dan bangunan dalam pengerjaan.
- Reklasifikasi Masuk KDP dengan total nilai sebesar Rp4.235.134.775,00 berupa:
  - Peralatan dan mesin dalam pengerjaan sebesar Rp1.365.094.000,00.
  - Aset Tetap Lainnya dalam pengerjaan sebesar Rp2.870.040.775,00.
- Transfer Masuk KDP dengan total nilai sebesar Rp1.946.546.423,00 berupa peralatan dan mesin dalam pengerjaan.

Mutasi kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp103.607.748.369,00 dijelaskan sebagai berikut:

- Transfer Keluar KDP dengan total nilai sebesar Rp3.893.092.846,00 berupa gedung dan bangunan dalam pengerjaan.
- Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi dengan total nilai sebesar Rp92.427.251.709,00 berupa:
  - Peralatan dan mesin dalam pengerjaan sebesar Rp79.686.884.783,00.
  - Aset Tetap Lainnya dalam pengerjaan sebesar Rp2.870.040.775,00.
  - Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan sebesar Rp9.421.363.921,00.
  - Irigasi Dalam Pengerjaan Dalam Pengerjaan sebesar Rp448.962.230,00.
- Koreksi Nilai KDP Berkurang dengan total nilai sebesar Rp3.052.269.039,00 berupa gedung dan bangunan dalam pengerjaan.
- Reklasifikasi Keluar KDP dengan total nilai sebesar Rp4.235.134.775,00 berupa:
  - Peralatan dan mesin dalam pengerjaan sebesar Rp1.365.094.000,00.
  - Aset Tetap Lainnya dalam pengerjaan sebesar Rp2.870.040.775,00.

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan berdasarkan Satuan Kerja dapat dilihat pada tabel berikut:

**Perbandingan Konstruksi Dalam Pengerjaan Berdasarkan Satker  
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Satker	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(penurunan)	
			Rp	%
Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara	3.112.677.850,00	3.112.677.850,00	0,00	0,00
Istana Kepresidenan Jakarta	7.998.277.383,00	2.115.868.923,00	5.882.408.460,00	278,01
Istana Kepresidenan Bogor	974.177.000,00	974.177.000,00	0,00	0,00
Istana Kepresidenan Cipanas	211.000.000,00	211.000.000,00	0,00	0,00
Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran	9.180.000,00	9.180.000,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>12.305.312.233,00</b>	<b>6.422.903.773,00</b>	<b>5.882.408.460,00</b>	<b>91,58</b>

*Akumulasi  
Penyusutan  
Rp5.411.472.  
849.764,00*

**C.17 Akumulasi Penyusutan**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp5.411.472.849.764,00 dan Rp4.873.823.372.575,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

**Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap  
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	4.620.753.299.191,00	(3.431.887.746.910,00)	1.188.865.552.281,00
2	Gedung dan Bangunan	6.587.560.322.969,00	(1.485.791.263.111,00)	5.101.769.059.858,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	997.161.395.979,00	(488.848.827.256,00)	508.312.568.723,00
4	Aset Tetap Lainnya	3.214.802.904.770,00	(4.945.012.487,00)	3.209.857.892.283,00
	<b>Jumlah</b>	<b>15.420.277.922.909,00</b>	<b>(5.411.472.849.764,00)</b>	<b>10.008.805.073.145,00</b>

Properti  
Investasi  
Rp851.414.794.095,00

## C.18 Properti Investasi

Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp851.414.794.095,00 dan Rp627.629.693.908,00. Berdasarkan PSAP No. 17, Properti Investasi merupakan properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya, termasuk infrastruktur yang terintegrasi) yang dikuasai untuk menghasilkan pendapatan berupa sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau kedua-duanya, dan dikelola entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan yang diberi tugas untuk melakukan pengelolaan aset, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum atau diserahkan kepada masyarakat. PSAP 17 diterapkan efektif mulai tahun 2022. Mutasi nilai Properti Investasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Per 31 Desember 2022</b>	Rp	<b>627.629.693.908,00</b>
<b>Mutasi Tambah:</b>	Rp	<b>223.785.100.187,00</b>
Reklasifikasi BMN Ke PI	Rp	223.785.100.187,00
<b>Mutasi Kurang:</b>	Rp	<b>-</b>
<b>Nilai Perolehan Per 31 Desember 2023</b>	Rp	<b>851.414.794.095,00</b>
Akumulasi penyusutan	Rp	<b>(122.382.280.484,00)</b>
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2023</b>	Rp	<b>729.032.513.611,00</b>

Mutasi tambah Properti Investasi sebesar Rp223.785.100.187,00 antara lain dijelaskan sebagai berikut:

- Reklasifikasi BMN ke PI dengan total nilai sebesar Rp223.785.100.187,00 antara lain berupa:
  - Bangunan Rumah Sakit Umum sebesar Rp83.552.214.000,00.
  - Flat/Rumah Susun Lainnya sebesar Rp100.052.900.000,00.
  - Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan Permanen sebesar Rp27.430.342.000,00.
  - Bangunan Lainnya sebesar Rp12.749.644.187,00.

Rincian Properti Investasi berdasarkan Satuan Kerja dapat dilihat pada tabel berikut:

### Perbandingan Properti Investasi Berdasarkan Satker Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Satker	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(penurunan)	
			Rp	%
Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno	379.987.638.096,00	339.807.651.909,00	40.179.986.187,00	0,00
Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran	471.427.155.999,00	287.822.041.999,00	183.605.114.000,00	63,79
<b>Jumlah</b>	<b>851.414.794.095,00</b>	<b>627.629.693.908,00</b>	<b>223.785.100.187,00</b>	<b>35,66</b>

**Daftar Properti Investasi  
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

NO	KETERANGAN	NOMOR PERJANJIAN	TANGGAL PERJANJIAN
1	STC Lantai 6	Perjan. 31/PPKGBK/Dirut/10/2022	14 Oktober 2022
2	Wisma Serbaguna	Perjanjian Kerjasama Nomor 2	2 Juli 2024
3	On 3 Café	Perjan Nomor 5	21 November 2023
4	Kantin UMKM Mandiri	BAST.01/PPKGBK/Dir.PPU/01/2023	2 Januari 2023
5	Hotel Century	Nomor 35/PPKGBK/Dirut/11/2022	23 November 2022
6	Plataran	Perjan Nomor 1	16 Desember 2019
7	Bangunan Rumah Sakit Umum	Akta Nomor 17 tahun 2020	15 Desember 2020
8	Bangunan Olahraga Terbuka	Akta Nomor 08 tahun 2022	31 September 2022
9	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Pemanen	KS-06/Kemensetneg/PPKK/DIT.PK/02/2024	20 Februari 2024
		KS-01/Kemensetneg/PPKK/DIT.PK/01/2024	12 Januari 2024
		KS-02/Kemensetneg/PPKK/DIT.PK/01/2024	12 Januari 2024
		KS-12/Kemensetneg/PPKK/DIT.PK/03/2024	25 Maret 2024
		KS-38/Kemensetneg/PPKK/Dirut/06/2022	28 April 2023
		BAST Nomor 06/Setneg/PPKK/KU/12/2011	19 Desember 2011
16	Flat/Rumah Susun Lainnya	035/Legal-GPR/BAST/VIII/2020	14 Agustus 2020
		036/Legal-GPR/BAST/VIII/2020	14 Agustus 2020
		038/Legal-GPR/BAST/VIII/2020	14 Agustus 2020
		01/PPKK/DIRUT/12/2021	27 Desember 2021
		02/PPKK/DIRUT/12/2021	28 Desember 2021
		01/PPKK/DIRUT/11/2022	21 November 2022
		02/PPKK/DIRUT/12/2023	4 Desember 2023

Akumulasi  
Penyusutan  
Rp122.382.280.484,00

### C.19 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp122.382.280.484,00 dan Rp90.355.363.595,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Properti Investasi yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Properti Investasi. Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat Properti Investasi adalah berdasarkan PSAP 17, metode penyusutan pada Properti Investasi menggunakan metode garis lurus menggunakan masa manfaat aset yang tercatat. Rincian Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

### Perbandingan Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Satker	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(penurunan)	
			Rp	%
Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno	(86.496.703.709,00)	(62.967.010.092,00)	(23.529.693.617,00)	37,37
Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran	(35.885.576.775,00)	(27.388.353.503,00)	(8.497.223.272,00)	31,02
<b>Jumlah</b>	<b>(122.382.280.484,00)</b>	<b>(90.355.363.595,00)</b>	<b>(32.026.916.889,00)</b>	<b>35,45</b>

Piutang  
Jangka  
Panjang  
Lainnya  
Rp110.460.  
209,00

## C.20 Piutang Jangka Panjang Lainnya

Nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp110.460.209,00 dan Rp88.002.500,00. Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Piutang Jangka Panjang Lainnya berdasarkan Satuan Kerja dapat dilihat pada tabel berikut:

### Perbandingan Piutang Jangka Panjang Lainnya Berdasarkan Satker Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Satker	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara	58.460.209,00	12.002.500,00	46.457.709,00	387,07
Istana Kepresidenan Jakarta	52.000.000,00	76.000.000,00	(24.000.000,00)	(31,58)
<b>JUMLAH</b>	<b>110.460.209,00</b>	<b>88.002.500,00</b>	<b>22.457.709,00</b>	<b>25,52</b>

Rincian Piutang Jangka Panjang Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada Satker Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp58.460.209,00 merupakan Piutang PNPB pegawai.
2. Pada Satker Istana Kepresidenan Jakarta sebesar Rp52.000.000,00 merupakan Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR).

Penyisihan  
Piutang Tidak  
Tertagih-  
Piutang  
Jangka  
Panjang  
Lainnya  
Rp552.302,00

## C.21 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp552.302,00 dan Rp440.013,00. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya merupakan estimasi ketidaktertagihan Piutang Jangka Panjang Lainnya yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Rincian Piutang Jangka Panjang Lainnya berdasarkan Satuan Kerja dapat dilihat pada tabel berikut:

### Perbandingan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya Berdasarkan Satker Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Satker	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(penurunan)	
	(Rp)	(Rp)	Rp	%
Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara	(292.302,00)	(60.013,00)	(232.289,00)	387,06
Istana Kepresidenan Jakarta	(260.000,00)	(380.000,00)	120.000,00	(31,58)
<b>Jumlah</b>	<b>(552.302,00)</b>	<b>(440.013,00)</b>	<b>(112.289,00)</b>	<b>25,52</b>

Kemitraan  
Dengan Pihak  
Ketiga  
Rp34.066.396.  
.817.257,00

## C.22 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Nilai Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp34.066.396.817.257,00 dan Rp

33.421.880.206.000,00. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga adalah aset kerja sama yang timbul dari perjanjian antara pemerintah dengan mitra (badan usaha, pihak ketiga atau investor) yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Mutasi transaksi terhadap Kemitraan Dengan Pihak Ketiga selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp</b>	<b>33.421.880.206.000,00</b>
<b>Mutasi Tambah:</b>	<b>Rp</b>	<b>838.083.233.257,00</b>
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Kemitraan	Rp	838.083.233.257,00
<b>Mutasi Kurang:</b>	<b>Rp</b>	<b>(193.566.622.000,00)</b>
Perubahan Aset Kemitraan	Rp	(193.566.622.000,00)
<b>Nilai Perolehan Per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>34.066.396.817.257,00</b>
Akumulasi amortisasi	Rp	(689.071.404.460,00)
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>33.377.325.412.797,00</b>

Rincian Mutasi Kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

1. Mutasi Tambah Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp838.083.233.257,00 terdapat pada Satker Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara berasal dari Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Kemitraan, dengan rincian:
  - Gedung dan Bangunan, dengan total nilai sebesar Rp424.287.157.260,00.
  - Jalan dan Jembatan, dengan total nilai sebesar Rp194.454.010.020,00.
  - Irigasi, dengan total nilai sebesar Rp219.342.065.977,00.
  
2. Mutasi Kurang Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp193.566.622.000,00 terdapat pada
  - Satker Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara berasal dari Perubahan Aset Kemitraan ke BMN sebesar Rp188.746.473.000,00, dengan rincian:
    - Gedung dan Bangunan, dengan total nilai sebesar Rp138.236.587.000,00.
    - Jalan dan Jembatan, dengan total nilai sebesar Rp19.234.652.000,00.
    - Irigasi, dengan total nilai sebesar Rp31.275.234.000,00.
  - Satker PPKGBK berasal dari Perubahan Aset Kemitraan ke BMN sebesar Rp4.820.149.000,00 berupa Gedung dan Bangunan.

## Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2023

No	Uraian	Per 31 Desember 2023		
		Kuantitas		Rupiah
1	Tanah Persil	1.457.195	M2	33.014.208.812.000,00
2	Alat Besar Darat	2	Unit	296.542.000,00
3	Alat Angkutan Bermotor	42	Unit	3.485.478.000,00
4	Bangunan Gedung Tempat Kerja	182	Unit	586.146.072.246,00
5	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	9	Unit	5.758.712.000,00
6	Monumen/Tugu Peringatan/Prasasti	12	Unit	34.538.442.147,00
7	Tugu/Tanda Batas	2	Unit	5.436.687.867,00
8	Jalan dan Jembatan	74.488	M2	196.776.783.020,00
9	Bangunan Air Bersih/Air Baku	4	Unit	219.749.287.977,00
<b>Jumlah</b>				<b>34.066.396.817.257,00</b>

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada Satuan Kerja Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara merupakan hasil Reklasifikasi Aset Tetap atas Aset Taman Mini Indonesia Indah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah yang pengelolaannya melalui mekanisme Kerjasama Pemanfaatan (KSP) sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian antara Kemensetneg dengan PT TWC Nomor 01 tanggal 1 Juli 2021.

Aset Tak Berwujud  
Rp49.299.294.386,00

### C.23 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp49.299.294.386,00 dan Rp69.299.317.395,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud berupa *software*, lisensi dan aset tak berwujud lainnya. Mutasi nilai Aset Tak Berwujud dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp</b>	<b>69.299.317.395,00</b>
<b>Mutasi Tambah:</b>	<b>Rp</b>	<b>9.594.594.872,00</b>
Pembelian	Rp	8.755.462.372,00
Pengembangan Nilai Aset	Rp	839.132.500,00
<b>Mutasi Kurang:</b>	<b>Rp</b>	<b>29.594.617.881,00</b>
Penghentian Aset dari Penggunaan	Rp	29.594.617.881,00
<b>Nilai Perolehan Per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>49.299.294.386,00</b>
Akumulasi Amortisasi	Rp	(36.426.363.803,00)
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>12.872.930.583,00</b>

Mutasi tambah Aset Tak Berwujud sebesar Rp9.594.594.872,00 dijelaskan sebagai berikut:

- Pembelian sebesar Rp8.755.462.372,00 dengan penjelasan sebagai berikut:
  1. Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara berupa 282 unit *software* dengan total nilai sebesar Rp8.152.731.524,00.

2. Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno berupa 22 unit *software* dengan total nilai sebesar Rp396.174.000,00.
3. Sekretariat Wakil Presiden berupa 54 unit *software* dengan total nilai sebesar Rp206.556.848,00.

➤ Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp839.132.500,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Istana Kepresidenan Jakarta dengan total nilai sebesar Rp441.597.500,00.
2. Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno dengan total nilai sebesar Rp397.535.000,00.

Mutasi kurang Aset Tak Berwujud sebesar Rp29.594.617.881,00 berasal dari Penghentian Aset Dari Penggunaan, dijelaskan sebagai berikut:

1. Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara dengan total nilai sebesar Rp27.788.803.856,00.
2. Sekretariat Wakil Presiden dengan total nilai sebesar Rp1.457.918.825,00.
3. Istana Kepresidenan Yogyakarta dengan total nilai sebesar Rp39.140.000,00.
4. Istana Kepresidenan Jakarta dengan total nilai sebesar Rp308.755.200,00.

Rincian Aset Tak Berwujud berdasarkan Satuan Kerja dapat dilihat pada tabel berikut:

#### Perbandingan Aset Tak Berwujud Berdasarkan Satker Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Satker	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(penurunan)	
			Rp	%
Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara	28.020.404.803,00	47.656.477.135,00	(19.636.072.332,00)	(41,20)
Istana Kepresidenan Jakarta	4.021.035.540,00	3.888.193.240,00	132.842.300,00	3,42
Istana Kepresidenan Yogyakarta	135.182.840,00	174.322.840,00	(39.140.000,00)	(22,45)
Istana Kepresidenan Tampaksiring	154.670.000,00	154.670.000,00	0,00	0,00
Sekretariat Wakil Presiden	1.741.226.184,00	2.992.588.161,00	(1.251.361.977,00)	(41,82)
Sekretariat Militer Presiden	475.569.600,00	475.569.600,00	0,00	0,00
Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (GBK)	6.088.058.545,00	5.294.349.545,00	793.709.000,00	14,99
Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran	1.681.718.720,00	1.681.718.720,00	0,00	0,00
Dewan Pertimbangan Presiden	858.693.900,00	858.693.900,00	0,00	0,00
Kantor Staf Presiden	6.122.734.254,00	6.122.734.254,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>49.299.294.386,00</b>	<b>69.299.317.395,00</b>	<b>(20.000.023.009,00)</b>	<b>(28,86)</b>

Rincian dan penjelasan lebih lanjut atas Aset Tak Berwujud disajikan pada Catatan atas Laporan Barang Milik Negara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Dana Yang  
Dibatasi  
Penggunaannya  
Rp237.719.  
668.619,00

## C.24 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp237.719.668.619,00 dan Rp0,00. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan Dana di Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran yang digunakan untuk menampung pendanaan atas pekerjaan yang belum diserahkan pada akhir tahun anggaran. Pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang direncanakan untuk diserahkan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada KPPN sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan dan penyelesaiannya dilanjutkan melewati batas akhir tahun anggaran.

### Perbandingan Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Berdasarkan Satker Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Satker	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
			(Rp)	%
Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara	219.420.789.984,00	0,00	219.420.789.984,00	100,00
Sekretariat Wakil Presiden	1.870.713.770,00	0,00	1.870.713.770,00	100,00
Istana Kepresidenan Jakarta	12.558.720.530,00	0,00	12.558.720.530,00	100,00
Istana Kepresidenan Bogor	695.031.882,00	0,00	695.031.882,00	100,00
Kantor Staf Presiden	2.832.530.271,00	0,00	2.832.530.271,00	100,00
Dewan Pertimbangan Presiden	341.882.182,00	0,00	341.882.182,00	100,00
<b>JUMLAH</b>	<b>237.719.668.619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.719.668.619,00</b>	<b>100,00</b>

Aset Lain-  
Lain  
Rp245.955.  
816.845,00

## C.25 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp245.955.816.845,00 dan Rp212.500.937.932,00. Aset Lain-lain berupa BMN yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Kementerian Sekretariat Negara serta dalam proses penghapusan dari BMN. Mutasi nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp</b>	<b>212.500.937.932,00</b>
<b>Mutasi Tambah:</b>	<b>Rp</b>	<b>208.236.634.985,00</b>
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	Rp	208.236.634.985,00
<b>Mutasi Kurang:</b>	<b>Rp</b>	<b>(174.781.756.072,00)</b>
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	Rp	(165.432.712.825,00)
Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	Rp	(9.349.043.247,00)
<b>Nilai Perolehan Per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>245.955.816.845,00</b>
Akumulasi Amortisasi	Rp	(154.948.844.284,00)
<b>Nilai Buku Per Per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>91.006.972.561,00</b>

Mutasi tambah Aset Lain-lain sebesar Rp208.236.634.985,00 dijelaskan sebagai berikut:

- Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp208.236.634.985,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara dengan total nilai sebesar Rp162.820.800.067,00 terdiri dari:
  - a. *Software* Komputer sebesar Rp25.125.833.677,00.
  - b. Aset Tak Berwujud Lainnya sebesar Rp1.857.454.000,00.
  - c. Lisensi sebesar Rp706.516.179,00.
  - d. Desain Industri sebesar Rp99.000.000,00.
  - e. Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp98.445.566.040,00.
  - f. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebesar Rp1.836.043.530,00.
  - g. Komputer sebesar Rp34.157.753.641,00.
  - h. Alat Angkutan Darat Bermotor sebesar Rp520.580.000,00.
  - i. Alat Keselamatan Kerja sebesar Rp71.895.000,00.
  - j. Bahan Perpustakaan Tercetak sebesar Rp158.000,00.
2. Istana Kepresidenan Jakarta dengan total nilai sebesar Rp5.129.937.575,00 terdiri dari:
  - a. Alat Angkutan Darat Bermotor sebesar Rp237.330.000,00
  - b. Alat Rumah Tangga sebesar Rp4.570.982.375,00.
  - c. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebesar Rp3.080.000,00.
  - d. Aset Tak Berwujud Lainnya sebesar Rp308.755.200,00.
  - e. Komputer sebesar Rp9.790.000,00.
3. Istana Kepresidenan Tampaksiring dengan total nilai sebesar Rp1.694.819.393,00 terdiri dari:
  - a. Alat Rumah Tangga sebesar Rp815.547.252,00.
  - b. Komputer sebesar Rp480.093.650,00.
  - c. Alat Kantor sebesar Rp289.268.091,00.
  - d. Alat Angkutan sebesar Rp93.460.400,00.
  - e. Alat Komunikasi sebesar Rp12.499.000,00.
  - f. Alat Kedokteran sebesar Rp3.951.000,00.
4. Istana Kepresidenan Yogyakarta dengan total nilai sebesar Rp4.460.951.742,00 terdiri dari:
  - a. Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp2.817.544.437,00.
  - b. Alat Studio dan Komunikasi sebesar Rp852.261.680,00.
  - c. Alat Angkutan sebesar Rp39.265.830,00.
  - d. Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar Rp3.950.000,00.
  - e. Komputer sebesar Rp652.827.795,00.
  - f. Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp15.575.000,00.
  - g. Alat Laboratorium sebesar Rp9.570.000,00.
  - h. Bangunan Gedung sebesar Rp30.817.000,00.
  - i. *Software* sebesar Rp39.140.000,00.
5. Istana Kepresidenan Bogor dengan total nilai sebesar Rp601.000.052,00 berupa Alat Rumah Tangga.

6. Sekretariat Militer Presiden dengan total nilai sebesar Rp340.302.425,00 berupa Alat Angkutan.
7. Sekretariat Wakil Presiden dengan total nilai sebesar Rp1.752.326.525,00 terdiri dari:
  - a. *Software* sebesar Rp1.457.918.825,00.
  - b. Alat Rumah Tangga sebesar Rp294.407.700,00.
8. Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno dengan total nilai sebesar Rp3.948.515.356,00 terdiri dari:
  - a. Alat Besar Darat sebesar Rp3.069.134.645,00.
  - b. Alat Angkutan Darat Bermotor sebesar Rp798.500.000,00.
  - c. Alat Rumah Tangga sebesar Rp80.880.711,00.
9. Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran dengan total nilai sebesar Rp727.231.850,00 berupa Alat Angkutan.
10. Pasukan Pengamanan Presiden dengan total nilai sebesar Rp26.760.750.000,00 terdiri dari:
  - a. Alat Angkutan sebesar Rp566.730.000,00.
  - b. Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp1.140.000.000,00.
  - c. Alat Persenjataan sebesar Rp25.054.020.000,00.

Mutasi kurang Aset Lain-Lain sebesar Rp174.781.756.072,00 dijelaskan sebagai berikut:

- Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan sebesar Rp165.432.712.825,00 dengan penjelasan sebagai berikut:
1. Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara dengan total nilai sebesar Rp126.685.768.040,00 terdiri dari:
    - a. Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp89.062.200.920,00.
    - b. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebesar Rp5.313.771.239,00.
    - c. Komputer sebesar Rp32.237.900.881,00.
    - d. Alat Keselamatan Kerja sebesar Rp71.895.000,00.
  2. Istana Kepresidenan Jakarta dengan total nilai sebesar Rp17.078.051.832,00 terdiri dari:
    - a. Alat Angkutan sebesar Rp5.522.235.000,00.
    - b. Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp1.794.013.915,00.
    - c. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebesar Rp5.942.988.975,00.
    - d. Komputer sebesar Rp3.818.813.942,00.
  3. Istana Kepresidenan Yogyakarta dengan total nilai sebesar Rp4.224.218.047,00 terdiri dari:
    - a. Alat Angkutan sebesar Rp39.265.830,00.
    - b. Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar Rp3.950.000,00.
    - c. Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp2.652.721.072,00.

- d. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebesar Rp850.308.350,00.
  - e. Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp15.575.000,00.
  - f. Alat Laboratorium sebesar Rp9.570.000,00.
  - g. Komputer sebesar Rp652.827.795,00.
4. Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran dengan total nilai sebesar Rp727.231.850,00 berupa Alat Angkutan.
  5. Pasukan Pengamanan Presiden dengan total nilai sebesar Rp12.813.244.148,00 terdiri dari:
    - a. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebesar Rp9.997.570.734,00.
    - b. Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp1.651.026.654,00.
    - c. Komputer sebesar Rp1.164.646.760,00
  6. Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno dengan total nilai sebesar Rp3.904.198.908,00 terdiri dari:
    - a. Alat Angkutan sebesar Rp798.500.000,00.
    - b. Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp3.037.583.908,00.
    - c. Unit Peralatan Proses/Produksi sebesar Rp68.115.000,00.
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap sebesar Rp9.349.043.247,00 dengan penjelasan sebagai berikut:
1. Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara dengan total nilai sebesar Rp540.063.000,00 terdiri dari:
    - a. Alat Angkutan sebesar Rp520.580.000,00.
    - b. Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp19.483.000,00.
  2. Istana Kepresidenan Jakarta dengan total nilai sebesar Rp5.508.384.000,00 berupa Bangunan Gedung.
  3. Istana Kepresidenan Tampaksiring dengan nilai total sebesar Rp1.415.444.247,00 terdiri dari:
    - a. Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp871.523.297,00.
    - b. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebesar Rp71.294.000,00.
    - c. Alat Angkutan sebesar Rp93.460.400,00.
    - d. Komputer sebesar Rp379.166.550,00.
  4. Kantor Staf Presiden dengan total nilai sebesar Rp1.885.152.000,00 terdiri dari:
    - a. Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp897.600.000,00.
    - b. Alat Persenjataan sebesar Rp102.602.000,00.
    - c. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebesar Rp884.950.000,00.

**Perbandingan Aset Lain-lain Berdasarkan Satkser  
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Satkser	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara	69.173.403.928,00	33.578.434.901,00	35.594.969.027,00	106,01
Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK-GBK)	102.783.057.696,00	102.738.741.248,00	44.316.448,00	0,04
Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran	36.757.512,00	36.757.512,00	0,00	0,00
Sekretariat Wakil Presiden	2.118.373.475,00	366.046.950,00	1.752.326.525,00	478,72
Istana Kepresidenan Jakarta	14.847.880.495,00	32.304.378.752,00	(17.456.498.257,00)	(54,04)
Istana Kepresidenan Bogor	888.871.159,00	287.871.107,00	601.000.052,00	208,77
Istana Kepresidenan Cipanas	444.713.000,00	444.713.000,00	0,00	0,00
Istana Kepresidenan Yogyakarta	236.733.695,00	0,00	236.733.695,00	100,00
Istana Kepresidenan Tampaksiring	1.723.071.555,00	1.443.696.409,00	279.375.146,00	19,35
Kantor Staf Presiden	17.879.968.641,00	19.765.120.641,00	(1.885.152.000,00)	(9,54)
Sekretariat Militer Presiden	4.327.563.377,00	3.987.260.952,00	340.302.425,00	8,53
Pasukan Pengamanan Presiden	31.495.422.312,00	17.547.916.460,00	13.947.505.852,00	79,48
<b>JUMLAH</b>	<b>245.955.816.845,00</b>	<b>212.500.937.932,00</b>	<b>33.454.878.913,00</b>	<b>15,74</b>

Rincian dan penjelasan lebih lanjut atas Aset Lain-lain disajikan pada Catatan atas Laporan Barang Milik Negara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya Rp880.446.612.547,00*

**C.26 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya**

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp880.446.612.547,00 dan Rp435.902.892.650,00. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

**Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya  
Per 31 Desember 2023**

Aset Tetap	Nilai Perolehan Per 31 Desember 2023 (Rp)	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Per 31 Desember 2023 (Rp)	Nilai Buku Per 31 Desember 2023 (Rp)
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	34.066.396.817.257,00	(689.071.404.460,00)	33.377.325.412.797,00
Aset Tak Berwujud	49.312.494.386,00	(36.426.363.803,00)	12.886.130.583,00
Aset Lain-lain	245.942.616.845,00	(154.948.844.284,00)	90.993.772.561,00
<b>Jumlah</b>	<b>34.361.651.928.488,00</b>	<b>(880.446.612.547,00)</b>	<b>33.481.205.315.941,00</b>

Utang kepada  
Pihak Ketiga  
Rp475.719.  
479.662,00

## C.27 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp475.719.479.662,00 dan Rp190.560.147.685,00.

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kewajiban	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	6.690.834.436,00	6.690.834.710,00	(274,00)	0,00
2	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	147.606.209.904,00	113.218.382.381,00	34.387.827.523,00	30,37
3	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	18.670.120.263,00	17.415.797.200,00	1.254.323.063,00	7,20
4	Dana Pihak Ketiga	84.840.077.425,00	51.788.418.876,00	33.051.658.549,00	63,82
5	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	217.912.237.634,00	1.446.714.518,00	216.465.523.116,00	14.962,56
<b>JUMLAH</b>		<b>475.719.479.662,00</b>	<b>190.560.147.685,00</b>	<b>285.159.331.977,00</b>	<b>149,64</b>

Rincian Utang Pihak Ketiga berdasarkan Satuan Kerja dapat dilihat pada tabel berikut:

### Perbandingan Utang Kepada Pihak Ketiga Berdasarkan Satker Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Satker	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(penurunan)	
			Rp	%
Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara	263.063.526.087,00	66.675.754.534,00	196.387.771.553,00	294,54
Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno	74.331.970.457,00	43.213.969.790,00	31.118.000.667,00	72,01
Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran	20.808.925.150,00	18.726.736.238,00	2.082.188.912,00	11,12
Istana Kepresidenan Jakarta	106.466.226.316,00	18.276.676.248,00	88.189.550.068,00	482,53
Istana Kepresidenan Bogor	1.024.454.096,00	326.837.389,00	697.616.707,00	213,44
Istana Kepresidenan Cipanas	75.253.433,00	69.458.536,00	5.794.897,00	8,34
Istana Kepresidenan Yogyakarta	131.104.519,00	194.412.889,00	(63.308.370,00)	(32,56)
Istana Kepresidenan Tampaksiring Bali	85.655.850,00	92.828.510,00	(7.172.660,00)	100,00
Sekretariat Wakil Presiden	2.183.053.272,00	16.080.242.728,00	(13.897.189.456,00)	(86,42)
Sekretariat Militer Presiden	587.984.700,00	0,00	587.984.700,00	100,00
Pasukan Pengamanan Presiden	3.780.839.896,00	26.896.203.489,00	(23.115.363.593,00)	0,00
Dewan Pertimbangan Presiden	347.955.615,00	7.027.334,00	340.928.281,00	4.851,46
Kantor Staf Presiden	2.832.530.271,00	0,00	2.832.530.271,00	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>475.719.479.662,00</b>	<b>190.560.147.685,00</b>	<b>285.159.331.977,00</b>	<b>149,64</b>

masing-masing Satker adalah sebagai berikut:

#### 1. Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	18.670.120.263,00
2	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	41.681.667.872,00
3	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	202.711.737.952,00
<b>Jumlah</b>		<b>263.063.526.087,00</b>

## 2. Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Dana Pihak Ketiga	74.253.386.457,00
2	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	78.584.000,00
Jumlah		74.331.970.457,00

## 3. Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	3.609.983.746,00
2	Utang Kepada Pihak Ketiga BLU	6.612.250.436,00
3	Dana Pihak Ketiga	10.586.690.968,00
Jumlah		20.808.925.150,00

## 4. Istana Kepresidenan Jakarta

No	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	97.001.551.916
2	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	9.464.674.400
Jumlah		106.466.226.316,00

## 5. Istana Kepresidenan Bogor

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	329.422.214,00
2	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	695.031.882,00
Jumlah		1.024.454.096,00

## 6. Istana Kepresidenan Cipanas

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	75.253.433,00
Jumlah		75.253.433,00

## 7. Istana Kepresidenan Yogyakarta

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	131.104.519,00
Jumlah		131.104.519,00

## 8. Istana Kepresidenan Tampaksiring Bali

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	85.655.850,00
Jumlah		85.655.850,00

## 9. Sekretariat Wakil Presiden

No	Keterangan	Nilai (Rp)
2	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	316.672.325,00
3	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	1.866.380.947,00
Jumlah		2.183.053.272,00

## 10. Sekretariat Militer Presiden

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	587.984.700,00
Jumlah		587.984.700,00

## 11. Pasukan Pengamanan Presiden

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	3.780.839.896,00
Jumlah		3.780.839.896,00

## 12. Dewan Pertimbangan Presiden

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	6.073.433,00
2	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	341.882.182,00
Jumlah		347.955.615,00

## 13. Kantor Staf Presiden

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	2.832.530.271,00
Jumlah		2.832.530.271,00

Pendapatan  
Diterima Di  
Muka  
Rp49.953.077  
.531,00

**C.28 Pendapatan Diterima Dimuka**

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp49.953.077.531,00 dan Rp57.603.599.189,00. Saldo Pendapatan Diterima di Muka adalah pendapatan PNBP yang telah diterima tetapi belum menjadi hak sepenuhnya karena masih melekat kewajiban untuk memberikan barang/jasa.

Penjelasan atas rincian Pendapatan Diterima Dimuka per Satker adalah sebagai berikut:

- a. PPKGBK sebesar Rp11.004.504.196,00 bersumber dari pendapatan sewa lahan/sarana/prasarana dan pendapatan iklan.
- b. Pendapatan Sewa Diterima Dimuka pada Satker PPKK sebesar Rp36.773.313.593,00 bersumber dari pendapatan sewa lahan/sarana/prasarana dan pendapatan iklan.
- c. Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara Rp1.886.062.275,00 bersumber dari sewa tanah, Gedung dan bangunan yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun.

- d. Pendapatan Sewa Diterima Dimuka pada Satker Sekretariat Wakil Presiden sebesar Rp289.197.467,00 yang bersumber dari sewa atas penempatan BTS, ATM, dan sewa untuk Kantin Dharma Wanita.

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka berdasarkan Satuan Kerja dapat dilihat pada tabel berikut:

**Perbandingan Pendapatan Diterima Dimuka Berdasarkan Satker  
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Satker	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/(penurunan)	
			Rp	%
Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara	1.886.062.275,00	2.347.503.577,00	(461.441.302,00)	(19,66)
Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno	11.004.504.196,00	17.544.669.555,00	(6.540.165.359,00)	(37,28)
Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran	36.773.313.593,00	37.690.526.015,00	(917.212.422,00)	(2,43)
Sekretariat Wakil Presiden	289.197.467,00	20.900.042,00	268.297.425,00	1283,72
<b>Jumlah</b>	<b>49.953.077.531,00</b>	<b>57.603.599.189,00</b>	<b>(7.650.521.658,00)</b>	<b>(13,28)</b>

Uang Muka  
dari KPPN  
Rp27.282.  
699.334,00

### C.29 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp27.282.699.334,00 dan Rp36.343.556.425,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang Jangka  
Pendek  
Lainnya  
Rp6.264.040.  
867,00

### C.30 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp6.264.040.867,00 dan Rp4.848.500.149,00. Utang Jangka Pendek Lainnya antara lain berupa utang potongan pajak oleh Bendahara Pengeluaran Satker yang belum disetor ke rekening kas negara. Rincian utang jangka pendek lainnya pada masing-masing Satker disajikan sebagai berikut:

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya berdasarkan Satuan Kerja dapat dilihat pada tabel berikut:

**Perbandingan Utang Jangka Pendek Lainnya Berdasarkan Satker  
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

Satker	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara	113.641.343,00	0,00	113.641.343,00	100,00
Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK-GBK)	4.039.007.465,00	2.663.986.390,00	1.375.021.075,00	51,62
Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran	527.114.258,00	864.667.511,00	(337.553.253,00)	(39,04)
Istana Kepresidenan Jakarta	1.584.277.801,00	1.319.846.248,00	264.431.553,00	20,04
<b>JUMLAH</b>	<b>6.264.040.867,00</b>	<b>4.848.500.149,00</b>	<b>1.415.540.718,00</b>	<b>29,20</b>

*Ekuitas*  
Rp633.119.  
330.433.547  
,00

### C.31 Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp633.119.330.433.547,00 dan Rp631.909.007.145.694,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

### D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Pendapatan  
PNBP  
Rp689.211.029.838  
,00

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp689.211.029.838,00. Jika dibandingkan dengan PNBP untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar Rp417.441.861.324,00, maka terjadi kenaikan sebesar Rp271.769.168.514,00 atau sebesar 65,10 persen.

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per jenis akun untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

#### Pendapatan Negara Bukan Pajak Per Jenis Akun Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

Akun	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
	Rp	Rp	Rp	%
Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	41.328.744.940,00	41.126.852.811,00	201.892.129,00	0,49
Pendapatan Pengelolaan Kawasan Lainnya	403.822.071.381,00	251.591.821.792,00	152.230.249.589,00	60,51
Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan -	3.347.563.478,00	0,00	3.347.563.478,00	N/A
Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	8.536.802.760,00	7.398.227.017,00	1.138.575.743,00	15,39
Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	107.644.090.618,00	32.538.687.204,00	75.105.403.414,00	230,82
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	28.768.705.316,00	18.147.327.742,00	10.621.377.574,00	58,53
Pendapatan Lain-Lain BLU	213.840.654,00	0,00	213.840.654,00	N/A
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.178.161.348,00	1.097.947.810,00	80.213.538,00	7,31
Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan	733.413.472,00	712.674.640,00	20.738.832,00	2,91
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi	512.900.000,00	81.655.000,00	431.245.000,00	528,13
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	693.583.000,00	916.357.000,00	(222.774.000,00)	(24,31)
Pendapatan Jasa Lainnya	91.908.777.164,00	62.350.247.274,00	29.558.529.890,00	47,41
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	522.375.697,00	1.469.250.984,00	(946.875.287,00)	(64,45)
Pendapatan Anggaran Lain-lain	10,00	0,00	10,00	N/A
<b>Jumlah</b>	<b>689.211.029.838,00</b>	<b>417.441.861.324,00</b>	<b>271.769.168.514,00</b>	<b>65,10</b>

Beban Pegawai  
Rp630.794.182.021,  
00

## D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp630.794.182.021,00. Jika dibandingkan dengan Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar Rp544.288.053.382,00, maka terjadi kenaikan sebesar Rp86.506.128.639,00 atau sebesar 15,89 persen.

Rincian Beban Pegawai per jenis akun untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

### Beban Pegawai Per Jenis Akun Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

Akun	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
	Rp	Rp	Rp	%
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	121.700.061.779,00	122.597.056.778,00	(896.994.999,00)	(0,73)
Beban Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	18.706.827.459,00	18.697.298.292,00	9.529.167,00	0,05
Beban Gaji dan Tunjangan Non PNS	53.480.356.492,00	52.738.184.302,00	742.172.190,00	1,41
Beban Honorarium	1.980.000.000,00	1.920.000.000,00	60.000.000,00	3,13
Beban Lembur	11.257.312.000,00	11.598.888.750,00	(341.576.750,00)	(2,94)
Beban Tunjangan Khusus	299.853.724.936,00	234.052.305.852,00	65.801.419.084,00	28,11
Beban Gaji dan Tunjangan - BLU	123.815.899.355,00	102.684.319.408,00	21.131.579.947,00	20,58
<b>Jumlah</b>	<b>630.794.182.021,00</b>	<b>544.288.053.382,00</b>	<b>86.506.128.639,00</b>	<b>15,89</b>

Beban  
Persediaan  
Rp40.296.404.505,  
00

## D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp40.296.404.505,00. Jika dibandingkan dengan Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar Rp41.719.864.756,00, maka terjadi penurunan sebesar Rp1.423.460.251,00 atau sebesar 3,41 persen.

Rincian Beban Persediaan per jenis akun untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

#### Beban Persediaan Per Jenis Akun Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

Akun	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
	Rp	Rp	Rp	%
Beban Persediaan Konsumsi	34.694.727.907,00	35.727.843.213,00	(1.033.115.306,00)	(2,89)
Beban Persediaan Amunisi	3.389.880,00	3.720.600,00	(330.720,00)	100,00
Beban Persediaan Bahan Baku	1.711.382.536,00	1.364.022.511,00	347.360.025,00	25,47
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	73.408.835,00	58.039.153,00	15.369.682,00	26,48
Beban Persediaan Lainnya	3.813.495.347,00	4.566.239.279,00	(752.743.932,00)	(16,48)
<b>Jumlah</b>	<b>40.296.404.505,00</b>	<b>41.719.864.756,00</b>	<b>(1.423.460.251,00)</b>	<b>(3,41)</b>

Beban Barang dan Jasa  
Rp2.304.469.220.267,00

#### D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.304.469.220.267,00. Jika dibandingkan dengan Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar Rp1.514.375.107.372,00, maka terjadi kenaikan sebesar Rp790.094.112.895,00 atau sebesar 52,17 persen.

Rincian Beban Barang dan Jasa per jenis akun untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

#### Beban Barang dan Jasa Per Jenis Akun Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

Akun	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
	Rp	Rp	Rp	%
Beban Barang Operasional	294.809.391.930,00	333.740.213.226,00	(38.930.821.296,00)	(11,67)
Beban Barang Non Operasional	192.276.426.716,00	44.586.271.246,00	147.690.155.470,00	331,25
Beban Langganan Daya dan Jasa	1.604.377.064.492,00	1.118.173.457.291,00	486.203.607.201,00	43,48
Beban Barang dan Jasa BLU	212.750.835.279,00	17.663.425.609,00	195.087.409.670,00	1.104,47
Beban Aset Ekstrakomptabel	255.501.850,00	211.740.000,00	43.761.850,00	20,67
<b>Jumlah</b>	<b>2.304.469.220.267,00</b>	<b>1.514.375.107.372,00</b>	<b>790.094.112.895,00</b>	<b>52,17</b>

Beban Barang dan Jasa sebesar Rp2.304.469.220.267,00 di atas sudah termasuk Beban Barang dan Jasa – Penanganan Pandemi COVID-19 pada Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp2.384.866.401,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Rincian Beban Barang dan Jasa Penanganan Pandemi COVID-19  
Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022**

Akun	31 Desember TA 2023 (Rp)
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1.185.231.601,00
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	170.550.000,00
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	1.026.784.700,00
Beban Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	2.300.100,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.384.866.401,00</b>

*Beban  
Pemeliharaan  
Rp536.241.823.114  
,00*

**D.5 Beban Pemeliharaan**

Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp536.241.823.114,00. Jika dibandingkan dengan Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar Rp468.037.801.385,00, maka terjadi kenaikan sebesar Rp68.204.021.729,00 atau sebesar 14,57 persen.

Rincian Beban Pemeliharaan per jenis akun untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

**Beban Pemeliharaan Per Jenis Akun  
Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022**

Akun	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
	Rp	Rp	Rp	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	46.350.996.042,00	41.664.958.372,00	4.686.037.670,00	11,25
Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	2.208.970.000,00	1.235.905.905,00	973.064.095,00	78,73
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	77.439.503.720,00	69.501.664.562,00	7.937.839.158,00	11,42
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	296.803.355.654,00	287.538.112.531,00	9.265.243.123,00	3,22
Beban Asuransi Alat Angkutan Darat/Apung/Udara Bermotor	2.140.668.054,00	255.724.775,00	1.884.943.279,00	737,10
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.411.835.343,00	1.371.356.420,00	40.478.923,00	2,95
Beban Pemeliharaan Jaringan	4.715.523.091,00	4.509.972.200,00	205.550.891,00	4,56
Beban Pemeliharaan Lainnya	10.217.277.377,00	7.886.267.358,00	2.331.010.019,00	29,56
Beban Pemeliharaan BLU	35.820.227.517,00	21.791.150.235,00	14.029.077.282,00	64,38
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	14.532.885.182,00	7.113.793.269,00	7.419.091.913,00	104,29
Beban Persediaan suku cadang	44.594.231.134,00	25.139.793.758,00	19.454.437.376,00	77,39
Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan	6.350.000,00	29.102.000,00	(22.752.000,00)	(78,18)
<b>Jumlah</b>	<b>536.241.823.114,00</b>	<b>468.037.801.385,00</b>	<b>68.204.021.729,00</b>	<b>14,57</b>

Beban Perjalanan Dinas  
Rp813.215.044.026  
,00

#### D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp813.215.044.026,00. Jika dibandingkan dengan Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar Rp592.184.179.683,00, maka terjadi kenaikan sebesar Rp221.030.864.343,00 atau sebesar 37,32 persen.

Rincian Beban Perjalanan Dinas per jenis akun untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

**Beban Perjalanan Dinas Per Jenis Akun  
Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022**

Akun	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
	Rp	Rp	Rp	%
Beban Perjalanan Biasa	362.668.667.026,00	315.720.674.890,00	46.947.992.136,00	14,87
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.396.618.000,00	2.799.504.759,00	11.597.113.241,00	414,26
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.742.302.109	4.793.161.921,00	2.949.140.188,00	61,53
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	16.941.788.443,00	17.682.035.041,00	(740.246.598,00)	(4,19)
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	392.428.465.405,00	235.636.435.996,00	156.792.029.409,00	66,54
Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	9.143.276.122,00	7.061.376.701,00	2.081.899.421,00	29,48
Beban Perjalanan BLU	9.893.926.921,00	8.490.990.375,00	1.402.936.546,00	16,52
<b>Jumlah</b>	<b>813.215.044.026,00</b>	<b>592.184.179.683,00</b>	<b>221.030.864.343,00</b>	<b>37,32</b>

*Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp43.668.655.081,00*

**D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat adalah beban barang dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Jumlah Beban Barang Yang Diserahkan Ke Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp43.668.655.081,00. Jika dibandingkan dengan Beban Barang Yang Diserahkan Ke Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar Rp19.207.375.889,00, maka terjadi kenaikan sebesar Rp24.461.279.192,00 atau sebesar 127,35 persen.

Rincian Beban Barang Yang Diserahkan Ke Masyarakat per jenis akun untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

### Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Per Jenis Akun Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

Akun	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
	Rp	Rp	Rp	%
Beban Tanah untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden	263.256.000,00	0,00	263.256.000,00	N/A
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Mantan	16.157.876.163,00	0,00	16.157.876.163,00	N/A
Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	6.125.000,00	5.810.000,00	315.000,00	5,4216867
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan	27.241.397.918,00	19.201.565.889,00	8.039.832.029,00	41,87071
<b>Jumlah</b>	<b>43.668.655.081,00</b>	<b>19.207.375.889,00</b>	<b>24.461.279.192,00</b>	<b>127,35</b>

Beban  
Penyusutan dan  
Amortisasi  
Rp1.065.207.166.0  
66,00

### D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.065.207.166.066,00. Jika dibandingkan dengan Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar Rp675.511.785.439,00, maka terjadi kenaikan sebesar Rp389.695.380.627,00 atau sebesar 57,69 persen.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per jenis akun untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

### Beban Penyusutan dan Amortisasi Per Jenis Akun Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

Akun	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
	Rp	Rp	Rp	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	302.954.383.724,00	323.398.693.828,00	(20.444.310.104,00)	(6,32)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	257.551.352.341,00	275.009.057.010,00	(17.457.704.669,00)	(6,35)
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	48.254.451.988,00	43.801.516.415,00	4.452.935.573,00	10,17
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	95.503.490,00	36.878.287,00	58.625.203,00	158,97
Beban Penyusutan Properti Investasi	20.110.878.670,00	3.330.586.151,00	16.780.292.519,00	503,82
Beban Amortisasi Software, Lisensi, dan Aset Tak Berwujud Lainnya	5.686.401.075,00	6.060.797.512,00	(374.396.437,00)	(6,18)
Beban Penyusutan Aset Lainnya	5.903.845.250,00	6.819.768.921,00	(915.923.671,00)	(13,43)
Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	424.650.349.528,00	17.054.487.315,00	407.595.862.213,00	2.389,96
<b>Jumlah</b>	<b>1.065.207.166.066,00</b>	<b>675.511.785.439,00</b>	<b>389.695.380.627,00</b>	<b>57,69</b>

Beban Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih  
Rp7.872.562.661,0  
0

## D.9 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertahiran piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp7.872.562.661,00. Jika dibandingkan dengan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar Rp290.614.585,00, maka terjadi kenaikan sebesar Rp7.581.948.076,00 atau 2.608,93 persen.

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per jenis akun untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

### Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per Jenis Akun Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

Akun	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
	Rp	Rp	Rp	%
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNB	(146.066,00)	37.949,00	(184.015,00)	(484,90)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	7.288.971,00	23.830.030,00	(16.541.059,00)	(69,41)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Kegiatan	7.865.247.455,00	0,00	7.865.247.455,00	N/A
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang –	52.301,00	440.013,00	(387.712,00)	(88,11)
Beban Penyisihan Piutang Kegiatan Operasional Lainnya BLU	0,00	259.679.878,00	(259.679.878,00)	(100,00)
Beban Penyisihan Piutang BLU Pengelola Kawasan Lainnya	0,00	6.506.715,00	(6.506.715,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>7.872.562.661,00</b>	<b>290.614.585,00</b>	<b>7.581.948.076,00</b>	<b>2.608,94</b>

Defisit Dari  
Kegiatan  
Operasional  
Rp4.752.554.027,9  
03,00

## D.10 Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Operasional

Pos Surplus/ Defisit dari Kegiatan Operasional merupakan selisih antara pendapatan dan beban yang sifatnya rutin dan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas selama satu periode pelaporan. Defisit Dari Kegiatan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp4.752.554.027.903,00 dan Rp3.438.172.921.167,00. Defisit Dari Kegiatan Operasional merupakan selisih antara total Pendapatan Operasional sebesar Rp689.211.029.838,00 dan total Beban Operasional sebesar Rp5.441.765.057.741,00.

Defisit Pelepasan  
Aset Non Lancar  
Rp451.893.528,00

### D.11 Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar

Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar terdiri dari pendapatan pelepasan aset non lancar dan beban pelepasan aset non lancar. Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah defisit sebesar Rp451.893.528,00 dan Rp8.221.484.076,00. Defisit Pelepasan Aset Non Lancar pada 31 Desember 2023 merupakan selisih antara total Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp2.033.509.286,00 dan total Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp2.485.402.814,00.

Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar per jenis akun untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan dalam tabel berikut:

#### Rincian Pendapatan dari Pelepasan Aset Non Lancar Per Jenis Akun Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

Akun	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
	Rp	Rp	Rp	%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	1.496.626.788,00	3.727.557.819,00	(2.230.931.031,00)	100,00
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	536.882.498,00	5.067.566.565,00	(4.530.684.067,00)	(89,41)
<b>Jumlah</b>	<b>2.033.509.286,00</b>	<b>8.795.124.384,00</b>	<b>(6.761.615.098,00)</b>	<b>(76,88)</b>

Rincian Beban Kerugian Pelepasan Aset Non Lancar per jenis akun disajikan dalam tabel berikut:

#### Rincian Beban Kerugian Pelepasan Aset Non Lancar Per Jenis Akun Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

Akun	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
	Rp	Rp	Rp	%
Beban Kerugian Pelepasan Aset	2.485.402.814,00	573.640.308,00	1.911.762.506,00	333,27
<b>Jumlah</b>	<b>2.485.402.814,00</b>	<b>573.640.308,00</b>	<b>1.911.762.506,00</b>	<b>333,27</b>

Surplus dari  
Kegiatan Non  
Operasional  
Lainnya  
Rp1.345.852.979,0  
0

## D.12 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp1.345.852.979,00 dan Rp3.175.999.019,00. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya merupakan selisih antara total pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp1.547.563.501,00 dan total beban kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp201.710.522,00.

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per jenis akun disajikan dalam tabel berikut:

### Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per Jenis Akun Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

Akun	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
	Rp	Rp	Rp	%
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	575.000.000,00	0,00	575.000.000,00	N/A
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	345.962.225,00	302.249.998,00	43.712.227,00	14,46
Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	576.375.374,00	4.124.844.387,00	(3.548.469.013,00)	(86,03)
Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	34.631.550,00	0,00	34.631.550,00	N/A
Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi	15.594.352,00	0,00	15.594.352,00	N/A
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0,00	20.076.000,00	(20.076.000,00)	(100,00)
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00	78.500.000,00	(78.500.000,00)	(100,00)
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lair/Pihak Ketiga	0,00	120.000.000,00	(120.000.000,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>1.547.563.501,00</b>	<b>4.645.670.385,00</b>	<b>(3.098.106.884,00)</b>	<b>(66,69)</b>

Rincian Beban dari kegiatan non operasional lainnya per jenis akun disajikan dalam tabel berikut:

### Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per Jenis Akun Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022

Akun	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/(Penurunan)	
	Rp	Rp	Rp	%
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	3.443.000,00	35.600.720,00	(32.157.720,00)	(90,33)
Beban Persediaan Rusak/Usang	198.267.522,00	1.361.693.050,00	(1.163.425.528,00)	(85,44)
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	0,00	72.377.596,00	(72.377.596,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>201.710.522,00</b>	<b>1.469.671.366,00</b>	<b>(1.267.960.844,00)</b>	<b>(86,28)</b>

Surplus Dari  
Kegiatan Non  
Operasional  
Rp893.959.451,00

#### D.13 Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional diperoleh dari selisih antara pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp893.959.451,00 dan Rp11.397.483.095,00. Surplus Kegiatan Non Operasional merupakan jumlah dari Defisit Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp451.893.528,00 dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp1.345.852.979,00.

Defisit LO  
Rp4.751.660.068.4  
52,00

#### D.14 Surplus/Defisit LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp4.751.660.068.452,00 dan Rp3.426.775.438.072,00. Surplus/Defisit LO merupakan penjumlahan selisih lebih antara surplus/defisit dari kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

## **D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Ekuitas Kementerian adalah kekayaan bersih kementerian yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban kementerian pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas periode pelaporan dibandingkan dengan periode sebelumnya

*Ekuitas Awal  
Rp631.909.007.14  
5.694,00*

### **E.1 Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp631.909.007.145.694,00 dan Rp637.788.515.002.811,00.

*Defisit-LO  
Rp4.751.660.068.4  
52,00*

### **E.2 Surplus/Defisit-LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah senilai Rp4.751.660.068.452,00 dan Rp3.426.775.438.072,00. Surplus/Defisit LO merupakan penjumlahan selisih lebih antara surplus/defisit dari kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

*Koreksi Nilai  
Persediaan  
Rp0,00*

### **E.3 Koreksi Nilai Persediaan**

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah senilai Rp0,00 dan Rp525.380.900,00.

*Koreksi Atas  
Reklasifikasi  
Rp791.751.913,00*

### **E.4 Koreksi Atas Reklasifikasi**

Koreksi Atas Reklasifikasi mencerminkan transaksi koreksi pencatatan aset berupa reklasifikasi masuk dan reklasifikasi keluar terkait akun persediaan, aset tetap dan aset lainnya. Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 nilai koreksi atas reklasifikasi adalah senilai Rp791.751.913,00 dan Rp20.318.606,00. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan selisih antara pencatatan reklasifikasi masuk dengan reklasifikasi keluar. Selisih tersebut terjadi karena perbedaan pencatatan klasifikasi BMN saat dilakukan reklasifikasi keluar dengan klasifikasi BMN saat dilakukan reklasifikasi masuk.

Koreksi Nilai  
Aset Non  
Revaluasi  
(Rp154.327.119.146,00)

### E.5 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan perolehan aset tetap misalnya reklasifikasi antar Aset Tetap yang menyebabkan perubahan penyusutan karena perbedaan masa manfaat Aset Tetap. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 senilai minus Rp154.327.119.146,00 dan minus Rp5.667.533.023.606,00. Koreksi ini antara lain koreksi saldo awal dan pencatatan atas aset pada satker berikut:

Satuan Kerja	Nilai Koreksi (Rp)
Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara	157.101.444.034,00
Istana Kepresidenan Jakarta	783.000.000,00
Istana Kepresidenan Bogor	8.232.294,00
Istana Kepresidenan Tampaksiring Bali	3.529.829,00
Istana Kepresidenan Cipanas	(57.934.400,00)
Sekretariat Wakil Presiden	(7.985.545,00)
Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran	(3.502.826.805,00)
Dewan Pertimbangan Presiden	(340.261,00)
<b>Jumlah</b>	<b>154.327.119.146,00</b>

Koreksi Lain-lain  
Rp656.283.860,00

### E.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-lain merupakan koreksi atas nilai ekuitas yang disebabkan oleh selain koreksi nilai persediaan, revaluasi aset tetap dan koreksi nilai aset non revaluasi. Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah senilai Rp656.283.860,00 dan minus Rp5.229.789.521,00. Koreksi Lain-lain senilai Rp656.283.860,00 antara lain merupakan koreksi piutang, penyisihan piutang, pendapatan tahun anggaran yang lalu serta koreksi utang.

Satuan Kerja	Nilai Koreksi (Rp)
Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara	1.717.290.386,00
Istana Kepresidenan Jakarta	89.596.421,00
Sekretariat Wakil Presiden	105.006.052,00
Sekretariat Militer Presiden	1.021.975,00
Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno	990.160.000,00
Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran	(2.246.790.974,00)
<b>Jumlah</b>	<b>656.283.860,00</b>

Transaksi Antar  
Entitas  
Rp6.114.862.439.6  
78,00

## E.7 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah senilai Rp6.114.862.439.678,00 dan Rp3.219.484.694.576,00. Nilai tersebut merupakan transaksi antara Entitas Pelaporan dengan Entitas Pelaporan lain (Diterima dari Entas Lain, Ditagihkan ke Entitas Lain dan Pengesahan Hibah Langsung) serta antar unit di dalam Entitas Pelaporan itu sendiri maupun dengan Entitas Pelaporan lain (Transfer Masuk dan Transfer Keluar). Transfer Masuk dan Transfer Keluar sebagian besar disebabkan adanya perpindahan aset berupa piutang pajak dan aset tetap dari satu instansi/satker ke instansi/satker lain.

Adapun rincian transaksi antar entitas per akun dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	Nilai (Rp)
Ditagihkan ke Entitas Lain	4.038.219.994.243,00
Diterima dari Entitas Lain	(103.346.512.885,00)
Transfer Keluar	(6.539.876.530,00)
Transfer Masuk	1.902.274.289.118,00
Pengesahan Hibah Langsung	284.254.545.732,00
<b>Jumlah</b>	<b>6.114.862.439.678,00</b>

Diterima dari  
Entitas Lain  
(DDEL)/Ditagihkan  
ke Entitas Lain  
(DKEL)  
Rp103.346.512.88  
5,00 /  
Rp4.038.219.994.2  
43,00

### E.7.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, DDEL sebesar Rp103.346.512.885,00 sedangkan DKEL sebesar Rp4.038.219.994.243,00.

Transfer Masuk /  
Transfer Keluar  
Rp1.902.274.289.1  
18,00 /  
Rp6.539.876.530,0  
0

### E.7.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajibandari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp Rp1.902.274.289.118,00 terdiri dari:

No.	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Barang Konsumsi	Sekretariat Wakil Presiden	2.948.422,00
2	Tanah	Sekretariat Jenderal	1.156.518.772.000,00
3	Peralatan dan Mesin	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jakarta Metropolitan	18.386.977.424,00
4	Peralatan dan Mesin	Istana Kepresidenan Bogor	16.750.000,00
5	Peralatan dan Mesin	Istana Kepresidenan Jakarta	6.674.317.568,00
6	Peralatan dan Mesin	Kantor Staf Presiden	222.478.100,00
7	Peralatan dan Mesin	Sekretariat Jenderal	913.171.984,00
8	Gedung dan Bangunan	Badan Keamanan Laut	1.260.865.691,00
9	Gedung dan Bangunan	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	2.023.512.305,00
10	Gedung dan Bangunan	Badan Pengawas Pemilihan Umum	4.454.954.340,00
11	Gedung dan Bangunan	Istana Kepresidenan Jakarta	196.082.388,00
12	Gedung dan Bangunan	Kantor Menteri Negara PPN/BAPPENAS	49.272.000,00
13	Gedung dan Bangunan	Kantor Pusat Sekretariat Jenderal	578.251.000,00
14	Gedung dan Bangunan	Kantor Staf Presiden	168.091.000,00
15	Gedung dan Bangunan	Mahkamah Konstitusi RI	283.064.269,00
16	Gedung dan Bangunan	Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	4.901.594.172,00
17	Gedung dan Bangunan	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	1.612.861.089,00
18	Gedung dan Bangunan	Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah Jakarta Metropolitan	286.050.570.260,00
19	Gedung dan Bangunan	Sekretariat Jenderal	3.857.776.446,00
20	Gedung dan Bangunan	Sekretariat Jenderal DPD RI	261.738.000,00
21	Gedung dan Bangunan	Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian	2.118.873.000,00
22	Gedung dan Bangunan	Sekretariat Jenderal Kominfo	2.305.721.085,00
23	Gedung dan Bangunan	Sekretariat Kemenko Bidang PMK	259.960.780,00
24	Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jakarta Metropolitan	59.322.302.184,00
25	Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan	Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jabar	127.304.449.020,00
26	Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan	Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah V Provinsi Jawa Barat	2.167.263.000,00
27	Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan	Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah Jakarta Metropolitan	235.981.740.977,00
28	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Istana Kepresidenan Jakarta	1.946.546.423,00
29	Aset Tetap Lainnya	Istana Kepresidenan Jakarta	69.077.390,00
30	Amunisi	Denma MABES TNI	3.389.880,00
31	Aset Tetap Renovasi	Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Banten	6.473.997.280,00
32	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jakarta Metropolitan	(14.936.596.028,00)
33	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Istana Kepresidenan Bogor	(10.468.750,00)
34	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Istana Kepresidenan Jakarta	(2.487.507.715,00)
35	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Kantor Staf Presiden	(222.478.100,00)
36	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Sekretariat Jenderal	(328.851.545,00)
37	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Kantor Staf Presiden	(22.921.500,00)
38	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian	(70.806.711,00)
39	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	(3.869.655.229,00)
40	Akumulasi Penyusutan Irigasi dan Jaringan	Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jakarta Metropolitan	(2.150.756.085,00)
41	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Istana Kepresidenan Jakarta	(13.038.696,00)
<b>Jumlah</b>			<b>1.902.274.289.118,00</b>

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp6.539.876.530,00 terdiri dari:

No.	Jenis	Entitas Asal	Nilai (Rp)
1	Barang Konsumsi	Sekretariat Wakil Presiden	2.948.422,00
2	Peralatan dan Mesin	Istana Kepresidenan Jakarta	59.738.182,00
3	Peralatan dan Mesin		5.803.722.721,00
4	Peralatan dan Mesin		381.292.659,00
5	Peralatan dan Mesin		270.262.800,00
6	Peralatan dan Mesin		159.301.206,00
7	Peralatan dan Mesin	Istana Kepresidenan Bogor	16.750.000,00
8	Peralatan dan Mesin	Kantor Staf Presiden	222.478.100,00
9	Gedung dan Bangunan	Kantor Staf Presiden	168.091.000,00
10	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Istana Kepresidenan Jakarta	128.704.500,00
11	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Istana Kepresidenan Jakarta	1.817.841.923,00
12	Aset Tetap Lainnya	Istana Kepresidenan Jakarta	36.827.390,00
13	Aset Tetap Lainnya		10.750.000,00
14	Aset Tetap Lainnya		10.750.000,00
15	Aset Tetap Lainnya		10.750.000,00
16	Aset Tetap Renovasi	Istana Kepresidenan Jakarta	196.082.388,00
17	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Istana Kepresidenan Jakarta	(8.534.026,00)
18	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		(2.344.666.199,00)
19	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		(70.416.321,00)
20	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		(48.376.968,00)
21	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		(15.514.201,00)
22	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Istana Kepresidenan Bogor	(10.468.750,00)
23	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Kantor Staf Presiden	(222.478.100,00)
24	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Kantor Staf Presiden	(22.921.500,00)
25	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Istana Kepresidenan Jakarta	(13.038.696,00)
<b>Jumlah</b>			<b>6.539.876.530,00</b>

*Pengesahan  
Hibah Langsung  
dan  
Pengembalian  
Pengesahan  
Hibah Langsung  
Rp284.254.545.73  
2,00*

### **E.7.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung**

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang, maupun jasa, sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp284.254.545.732,00. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

*Ekuitas Akhir  
Rp633.119.330.43  
3.547,00*

### **E.8 Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah senilai Rp633.119.330.433.547,00 dan Rp631.909.007.145.694,00. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan saldo Ekuitas Awal, Surplus/ Defisit LO, Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar dan Transaksi Antar Entitas.

**F. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN****A. Pengungkapan Terkait Alokasi Anggaran Pandemi COVID-19**

Dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Sekretariat Negara Tahun Anggaran 2023 dialokasikan anggaran sebesar Rp5.250.409.000,00, sampai dengan 31 Agustus 2023 telah terealisasi sebesar Rp5.233.144.174,00 atau 99,67 persen. Rincian realisasi anggaran penanganan Covid-19 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran Semula (Rp)	Anggaran Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Neto (Rp)	Realisasi Bruto (%)
1	521131	7.338.277.000,00	1.157.369.000,00	1.157.364.938,00	0,00	1.157.364.938,00	100,00
2	521241	356.000.000,00	170.550.000,00	170.550.000,00	0,00	170.550.000,00	100,00
3	521841	2.465.567.000,00	349.683.000,00	349.282.236,00	0,00	349.282.236,00	99,89
4	522192	4.055.540.000,00	3.570.506.000,00	3.553.646.900,00	0,00	3.553.646.900,00	99,53
5	525152	141.684.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	525153	161.628.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	525154	297.322.000,00	2.301.000,00	2.300.100,00	0,00	2.300.100,00	99,96
8	532119	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>14.841.018.000,00</b>	<b>5.250.409.000,00</b>	<b>5.233.144.174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.233.144.174,00</b>	<b>99,67</b>

**B. Pengungkapan Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) pada Kementerian Sekretariat Negara**

Pengertian Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran atau disebut RPATA berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran adalah rekening lain-lain milik BUN untuk menampung dana atas penyelesaian pekerjaan yang direncanakan untuk diserahkan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara s.d. tanggal 31 Desember TA berkenaan dan pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir TA yang penyelesaiannya diberikan kesempatan untuk dilanjutkan pada TA berikutnya.

Melaksanakan ketentuan tersebut, atas penyelesaian pekerjaan yang direncanakan untuk diserahkan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara s.d. tanggal 31 Desember TA 2023 dan pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir TA 2023 yang penyelesaiannya diberikan kesempatan untuk dilanjutkan pada TA 2024 maksimal sampai dengan akhir Maret 2024 diajukan pembentukan rekening RPATA dengan nilai sebesar Rp237.719.668.619,00 dengan rincian sebagai berikut:

## Rincian Rekening Penampungan Akhir Tahun 2023

No	Satker	Nominal
1	Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara	219.420.789.984,00
2	Istana Kepresidenan Jakarta	12.558.720.530,00
3	Istana Kepresidenan Bogor	695.031.882,00
4	Sekretariat Wakil Presiden	1.870.713.770,00
5	Kantor Staf Presiden	2.832.530.271,00
6	Dewan Pertimbangan Presiden	341.882.182,00
<b>Jumlah</b>		<b>237.719.668.619,00</b>

## C. Pengungkapan Informasi Aset Bersejarah

Neraca Kementerian Sekretariat Negara (Kemensekneg) per 31 Desember 2023 menyajikan nilai Aset sebesar Rp633.884.484.767.748,00 dengan rincian sebagai berikut:

## Nilai Aset Dalam Neraca Kemensekneg per 31 Desember 2023

Uraian	Catatan	Nilai per 31 Desember 2023 (Rp)
Aset Lancar	C.1 - C.11	3.051.836.954.486,00
Aset Tetap	C.12 - C.18	596.407.856.257.804,00
Properti Investasi	C.19 - C.20	700.768.565.643,00
Piutang Jangka Panjang	C.21 - C.22	109.907.907,00
Aset Lainnya	C.23 - C.27	33.723.913.081.908,00
<b>Jumlah</b>		<b>633.884.484.767.748,00</b>

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*).

Pengungkapan informasi Aset Bersejarah dalam CaLK sebagai berikut:

- a. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam CaLK dengan tanpa nilai. Aset bersejarah (contohnya bangunan bersejarah) selain memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah karena nilai sejarahnya, juga digunakan untuk ruang perkantoran, maka terhadap Aset bersejarah tersebut diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.
- b. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

Beberapa unit Aset Bersejarah (heritage assets) di lingkungan Kemensetneg yang telah memperoleh penetapan sebagai cagar budaya, sebagai berikut:

#### Aset Bersejarah yang Belum Diungkap Pada CaLK Kemensetneg Tahun 2023

No	Nama Cagar Budaya	Jenis Cagar Budaya	Jumlah Bangunan (Unit)	Lokasi/Alamat	Penetapan Cagar Budaya	Satuan Kerja
1	Gedung Istana Merdeka	Bangunan Cagar Budaya	1	Jalan Medan Merdeka Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat	SK Menteri Nomor 237/M/1999 tanggal 4 Oktober 1999 dan SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 475 tahun 1993 tanggal 29 Maret 1993.	Istana Kepresidenan Jakarta
2	Gedung Istana Negara	Bangunan Cagar Budaya	1	Jalan Veteran Nomor 17 Kec. Gambir, Jakarta Pusat	SK Menteri Nomor 237/M/1999 tanggal 4 Oktober 1999.	Istana Kepresidenan Jakarta
3	Istana Wakil Presiden	Bangunan Cagar Budaya	2	Jalan merdeka Selatan No. 6/7 Kec. Gambir, Jakarta Pusat	SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 475 tahun 1993 tanggal 29 Maret 1993.	Sekretariat Wakil Presiden
4	Istana Bogor	Bangunan Cagar Budaya	1	Jalan Ir. H. Juanda, Kota Bogor	SK Menteri Pariwisata dan Kebudayaan No. PM.26/PW.007/MKP/2007 tanggal 26 Maret 2007.	Istana Kepresidenan Bogor
5	Istana Cipanas	Bangunan Cagar Budaya	1	Jl. Raya Cipanas Kecamatan Cipanas, Cianjur Jawa Barat	SK Menteri Pariwisata dan Kebudayaan No. PM.58/PW.007/MKP/2010 tanggal 22 Juni 2010.	Istana Kepresidenan Cipanas
6	Gedung Agung Yogyakarta	Bangunan Cagar Budaya	3	Jalan Jenderal Ahmad Yani Kec. Gondomanan Kota Yogyakarta	SK Menteri Pariwisata dan Kebudayaan No. PM.89/PM.007/MKP/ 2011- 10- 17 dan SK Gubernur DIY Nomor 75/KEP/2017.	Istana Kepresidenan Yogyakarta

Bangunan bersejarah Kemensetneg tersebut digunakan untuk kegiatan kenegaraan sehingga diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya namun dengan kekhususan sebagai Bangunan Cagar Budaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan telah sajikan pada pada Pos Aset Tetap Gedung dan Bangunan dalam Neraca satuan kerja per 31 Desember 2023 dan Neraca Kemensetneg per 31 Desember 2023.

#### **D. Kesalahan penggunaan akun belanja pada Kementerian Sekretariat Negara tahun 2023**

Terdapat kesalahan akun belanja pada Kemensetneg untuk TA 2023 dengan nilai sebesar Rp21.202.601.392,00 dengan rincian sebagai berikut:

### Rincian Belanja Barang Digunakan untuk Perolehan dan/atau Pengembangan Nilai Aset Tetap

No	Nama Pekerjaan	Nilai (Rp)	MAK Belanja Digunakan	MAK Belanja Seharusnya	Uraian Realisasi Pekerjaan
<b>A</b>	<b>Sekretariat Kemensekneg</b>				
1	Pemasangan ACP Menara I RJPN Kemayoran	2.210.000.000	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya (523119)	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan (533121).	Pembongkaran dan penggantian dinding marmer menjadi dinding baru ACP
<b>B</b>	<b>PPKK</b>				
1	Perbaikan Drainase dan Pedestrian pada Pasar Mobil Kemayoran	9.257.143.954	Belanja Pemeliharaan (525114)	Belanja Modal Irigasi (534121)	Pekerjaan drainase dan pedestrian, serta jalan pada Pasar Mobil Kemayoran. Aset drainase, pedestrian dan jalan belum dicatat sebagai aset tetap. Pekerjaan dilakukan di lahan dimana kerja sama pemanfaatan atas lahan tersebut oleh pihak lain telah berakhir dan atas lahan tersebut belum diterbitkan HGB atas nama pihak lain.
2	Pekerjaan Perbaikan Jalan pada Pasar Mobil Kemayoran	9.044.191.460	Belanja Pemeliharaan (525114)	Belanja Modal Jalan dan Jembatan (534111)	
<b>C</b>	<b>Istana Kepresidenan Bogor</b>				
1	Pekerjaan Pemeliharaan Hardscape Museum I	199.877.000	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (523119)	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan (533121)	Pembuatan <i>hardscape</i> yang sebelumnya hanya berupa tanah berumput
2	Pembongkaran Toilet dan Pemeliharaan Plafond Museum I	196.644.000		Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan (533121)	Pembongkaran toilet dan penggantian <i>plafond</i> mengubah fungsi ruangan, yang sebelumnya merupakan ruangan kantor menjadi ruangan <i>display</i> benda seni dan telah terdapat realisasi Belanja Modal untuk merenovasi ruangan
<b>D</b>	<b>Istana Kepresidenan Tanahabang</b>				
1	Pekerjaan Lingkungan, Rumput, dan Kebersihan Halaman (Pemeliharaan Railing)	255.788.400	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (523119)	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan (533121)	Penggantian <i>railing</i> yang sebelumnya berbahan pipa <i>galvanis</i> menjadi <i>stainless steel</i> , penambahan <i>acrylic</i> dan kaca <i>tempered</i> , serta penambahan tinggi pagar.
2	Pekerjaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (Gedung/Bangunan Kantor Tidak	38.956.578	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (523119)	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan (533121)	Penambahan kapasitas berupa terpasangnya pintu
	<b>Jumlah</b>	<b>21.202.601.392</b>			

#### E. Catatan atas Transfer Masuk Barang Milik Negara dari Kementerian PUPR

##### 1. Pada Triwulan III Tahun Anggaran 2023

Berdasarkan Berita Acara Kementerian PUPR nomor: 02/KSN/S/PB.02/04/2022, tanggal 10 Maret 2022, Kementerian PUPR telah melakukan serah terima BMN di lingkungan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jakarta Metropolitan kepada Kementerian Sekretariat Negara. Selanjutnya sebagaimana berita acara nomor: BAST-25/KSN/Um/PB.02/028/2022 tanggal 14 April 2022 Kementerian Sekretariat Negara melakukan serah terima ke BLU Pusat Pengelolaan Komplek Kamayoran dengan nilai sebesar Rp67.240.271.820,00 (enam puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus dua puluh rupiah).

##### 2. Pada Semester II Tahun Anggaran 2023

Berdasarkan Berita Acara Kementerian PUPR nomor: 30/BA/SJ/2023 nomor: BA-02/KSNS/06/2023, tanggal 05 Juni 2023,

Kementerian PUPR telah melakukan serah terima status penggunaan BMN Kementerian Sekretariat Negara. Selanjutnya sebagaimana berita acara nomor: BAST-35/KSN/Um/PB.02/12/202 tanggal 7 Desember 2023 Kementerian Sekretariat Negara melakukan serah terima ke BLU Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran dengan nilai sebesar Rp1.047.850.538,00 (satu milyar empat puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).

3. Pada Semester II Tahun Anggaran 2023

Berdasarkan Berita Acara nomor 1111/BA/ATR/Bb27/2023 nomor: BA-25/KM/UM/TB.02/08/2023, tanggal 10 Agustus 2023, Kementerian PUPR telah melakukan serah terima BMN kepada Kementerian Sekretariat Negara (BLU Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran) dengan nilai sebesar Rp6.473.997.280,00 (enam milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

**F. Catatan atas Serah Terima Gedung dan Bangunan Di Blok D-10 Komplek Kemayoran (Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran)**

Berdasarkan Berita Acara Nomor 03/PPKK/DIRUT/12/2023 Nomor: 006/KSM/DIR/BA/XII/2023, tanggal 7 Desember 2023, PT Karya Sukses Mandiri (Rumah Sakit Mitra Keluarga) telah melakukan serah terima atas Gedung dan Bangunan Rumah Sakit Mitra Kemayoran kepada BLU Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran dengan nilai sebesar Rp83.552.214.000,00 (delapan puluh tiga milyar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus empat belas ribu rupiah).

**G. Pengungkapan atas BMN Kementerian Sekretariat Negara**

1. Terdapat Rumah Negara Golongan III Tipe A yang masih tercatat dalam buku barang Kemensetneg dengan kondisi dihentikan dalam penggunaan, hampir seluruhnya telah dipindahtanggankan dan sudah lunas.
2. Aset berupa tanah dan bangunan gedung tempat tinggal dengan kondisi dihentikan dalam penggunaan merupakan aset wisma yang berlokasi di wisma Cibeureum, Bogor, Jawa Barat. Aset tersebut memang sengaja dihentikan, karena aset tersebut dalam kondisi sengketa dan Setneg dinyatakan kalah dalam Sidang Pengadilan dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Aset tersebut belum dikeluarkan dalam catatan, karena belum ada ijin prinsip dari pengelola barang terkait penghapusannya.
3. Terdapat Gedung Bangunan Kantor Permanen yang dihentikan dalam penggunaannya, karena aset tersebut digunakan oleh pihak

ketiga tanpa perjanjian diantaranya Gedung Pepabri, Mess Kowad, Gedung PWRI. Penghentian atas aset tersebut telah dilakukan atas rekomendasi BPK RI.

4. Kementerian Sekretariat Negara memiliki Barang Milik Negara (BMN) berupa Tanah yang berlokasi di Desa Harjamukti, Cimanggis, Depok, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Surat Hak Pakai Nomor 3 Tahun 1996 seluas 35.000 m<sup>2</sup>. Di lokasi dimaksud saat ini dihuni oleh para penghuni liar. Kementerian Sekretariat Negara telah menyampaikan laporan kepada kepolisian berdasarkan Laporan/Pengaduan nomor LP/2524/K/XI/2020/PMJ/Restro Depok tanggal 10 November 2020 dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pengawasan Penyidikan (SP2HP2) Nomor B/2969/IV/RES.7.5/2021/Bareskrim/ tanggal 20 April 2021. Selain itu, Kementerian Sekretariat Negara telah mengeluarkan Surat Peringatan I nomor B-39/S/Um/PB.02/08/2022 tanggal 26 Agustus 2022, Surat Peringatan II nomor B-01/S/Um/PB.02/09/2022 tanggal 6 September 2022, Surat Peringatan III nomor B-02/S/Um/PB.02/09/2022 tanggal 12 September 2022 kepada para penghuni liar. Sebagian tanah tersebut seluas 17.500 m<sup>2</sup> telah dilakukan alih status kepada Kemenhan cq. Paspampres sesuai dengan izin prinsip KPKNL, Kementerian Keuangan nomor S-49/MK.6/WKN.07/KNL.02/2022 tanggal 14 Januari 2022, dan Berita Acara Serah Terima nomor BAST-01/KSN/S/PB.02/01/2022 tanggal 26 Januari 2022, serta telah dilakukan penghapusan dari pencatatan sebagian tanahnya sesuai Surat Keputusan Sekretaris Menteri Sekretariat Negara a.n. Menteri Sekretaris Negara Nomor 51 Tahun 2022 tanggal 17 Februari 2022 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Tanah Milik Kementerian Sekretariat Negara di Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat dari Daftar Barang Kementerian Sekretariat Negara. Eksekusi penertiban BMN masih menunggu kesiapan Paspampres, karena berdasarkan kesepakatan tidak tertulis sebagai akibat dari alih status sebagian tanah di Desa Harjamukti dimaksud, pelaksanaan penertiban adalah Paspampres dan Biro Umum Kemensetneg akan membantu terkait sarana dan prasarana penertiban BMN.

#### **H. Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara**

Dalam rangka pelaksanaan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, pada tahun 2017 Menteri Sekretaris Negara menetapkan Peraturan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan

Operasional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga.

Pada Petunjuk Operasional Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (POK DIPA) Satuan Kerja Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2023 tersedia alokasi anggaran Bantuan Pemerintah dengan Kode Kegiatan, Kode Output dan Kode Mata Anggaran Keluaran (MAK) yaitu 6433.BEI.001.051.A.521233 sebesar Rp7.887.022.000,00. Alokasi anggaran tersebut disediakan untuk bantuan pemerintah kepada Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI). Realisasi anggaran bantuan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp7.887.022.000,00 atau 100,00%. Rincian anggaran dan realisasi belanja sebagai berikut:

**Realisasi Anggaran Bantuan Kepada AIPI  
Sampai dengan 31 Desember 2023**

No.	Uraian	Anggaran Setelah Revisi (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Neto (Rp)	Realisasi Bruto (%)	Sisa Anggaran (Rp)
1	AIPI	7.887.022.000,00	7.887.022.000,00	0,00	7.887.022.000,00	100,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>7.887.022.000,00</b>	<b>7.887.022.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.887.022.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

Dalam rangka pelaksanaan bantuan di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara pada tahun 2017 ditetapkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Operasional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga. Penyaluran bantuan kepada Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) dilaksanakan secara bertahap melalui mekanisme LS.

#### **I. Taman Mini Indonesia Indah**

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah bahwa tanah dengan luas keseluruhan 1.467.707m<sup>2</sup> dan bangunan serta asset lainnya diatas tanah tersebut pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian/Lembaga atau Pemerintah daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Dengan ditetapkannya penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah oleh

Kementerian Sekretariat Negara maka penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah oleh Yayasan Harapan Kita berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1977 dinyatakan berakhir.

Pada tanggal 1 Juli tahun 2021 telah dilakukan perjanjian antara Kementerian Sekretariat Negara RI dengan PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (Persero) tentang Kerja Sama Pemanfaatan BMN pada Kemensetneg RI di Taman Mini Indonesia Indah. Pelaksanaan KSP dilaksanakan dalam jangka waktu 25 tahun terhitung yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 31 Desember 2046.

Sesuai dengan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan, dilakukan koreksi pencatatan atas Aset Taman Mini Indonesia Indah yang semula dicatat sebagai Aset Tetap direklasifikasi ke Aset Kemitraan. Rekomendasi tersebut merupakan tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah yang menyatakan bahwa pengelolaannya dilaksanakan oleh Kementerian Sekretariat Negara, kementerian/lembaga atau pemerintah daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang semula oleh Yayasan Harapan Kita dan Akta Perjanjian Nomor 01 tanggal 01 Juli 2021 pengelolaannya dilaksanakan melalui mekanisme Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) oleh PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (Persero).

Pencatatan Aset Taman Mini Indonesia Indah sebagai Aset Tetap yang selanjutnya direklasifikasi dari Aset Tetap ke Kemitraan sebesar Rp20.879.540.836.000,00 sebagaimana tersaji dalam Neraca maupun Catatan atas Laporan Keuangan belum dilengkapi Berita Acara Serah Terima.

Sesuai dengan temuan pemeriksaan BPK, kewajiban yg timbul dari pembayaran dana talangan pembayaran pesangon karyawan eks BPP TMII (karyawan *legacy* TMII) oleh PT TWC harus diungkapkan di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Satuan Kerja Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara. Namun demikian, masih terdapat permasalahan status TMII yang bukan merupakan satker pada Kementerian Sekretariat Negara, melainkan status BPP TMII masih sebagai entitas Unit Badan Lainnya Non Satker Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Kementerian Keuangan. Dalam hal ini, Laporan Keuangan BPP TMII selama ini disampaikan langsung kepada Kementerian Keuangan, dan

belum dilakukan likuidasi atas BPP TMII oleh Kementerian Keuangan. Disamping itu, nilai hutang dan piutang jangka pendek dan jangka panjang masih akan diperhitungkan di dalam addendum kerja sama pemanfaatan TMII.

Kementerian Keuangan saat ini sedang Menyusun Tim Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) TMII Tahap II yang akan menghitung Kontribusi Tetap dan Variabel Keuntungan serta memperhitungkan Investasi Pemerintah melalui Revitalisasi TMII dengan APBN serta Dana Talangan yang dikeluarkan oleh PT TWC sehingga diperoleh hasil yang sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### J. Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Satuan tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pada Pasal 11 dinyatakan bahwa segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Satgas Undang-Undang Cipta Kerja, Sekretariat Satgas Undang-Undang Cipta Kerja, dan kelompok kerja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Anggaran Belanja Kementerian Sekretariat Negara. Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 tersedia alokasi anggaran Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja dengan Kode Program, Kode Kegiatan, Kode Rincian Output yaitu 007.01.CA.6433.BAH.002 sebesar Rp16.821.139.000,00 dan realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp15.019.030.430,00 atau 89.29%. Rincian anggaran dan realisasi belanja sebagai berikut:

No.	Akun	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Neto (Rp)	Realisasi Bruto (%)
1	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	4.900.000,00	4.398.500,00	0,00	501.500,00	89,77
2	521211	Belanja Bahan	1.129.406.000,00	1.129.225.500,00	0,00	180.500,00	99,98
3	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	226.200.000,00	215.200.000,00	0,00	11.000.000,00	95,14
4	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	105.646.000,00	90.171.424,00	0,00	15.474.576,00	85,35
5	522131	Belanja Jasa Konsultan	752.189.000,00	752.188.500,00	0,00	500,00	100,00
6	522141	Belanja Sewa	62.855.000,00	59.564.160,00	0,00	3.290.840,00	94,76
7	522151	Belanja Jasa Profesi	530.099.000,00	475.600.000,00	0,00	54.499.000,00	89,72
8	522191	Belanja Jasa Lainnya	3.105.856.000,00	3.105.855.250,00	0,00	750,00	100,00
9	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	445.812.000,00	344.157.561,00	0,00	101.654.439,00	77,20
10	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.700.000,00	15.900.000,00	0,00	4.800.000,00	76,81
11	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.429.687.000,00	1.202.520.280,00	0,00	227.166.720,00	84,11
12	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	9.007.789.000,00	7.624.249.255,00	0,00	1.383.539.745,00	84,64
Jumlah			16.821.139.000,00	15.019.030.430,00	0,00	1.802.108.570,00	89,29

## K. Hibah

### 1. Hibah Jasa dari Pemerintah Australia pada Satker Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara

Pada tanggal 3 Juli 2014, Pemerintah RI yang diwakili oleh Kementerian Sekretariat Negara dan Pemerintah Australia yang diwakili oleh *Department of Foreign Affairs and Trade* (DFAT) menandatangani *Subsidiary Agreement* kegiatan *Australia Awards in Indonesia* yaitu program beasiswa bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Sarjana (S1), Magister (S2) dan Doktor (S3) di Australia. Pelaksanaan kegiatan ini adalah selama 5 (lima) tahun yang dimulai pada tahun 2014 dan berakhir pada tahun 2018.

Pada tahun 2018 telah dilaksanakan addendum *Subsidiary Agreement* ke-2 yang merubah jangka waktu pelaksanaan hibah semula 5 (lima) tahun (2014 s.d. 2018) menjadi 9 (sembilan) tahun (2014 s.d. 2022) dan nilai hibah semula AUD86.000.000,00 menjadi AUD166.000.000,00. Atas perubahan nilai dan jangka waktu penerimaan hibah tersebut telah disampaikan kepada Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko, Kementerian Keuangan sesuai dengan Surat Plt. Direktur Evaluasi Akuntansi dan Setelmen Nomor S-929/PR.8/2018 tanggal 23 Oktober 2018.

Adapun realisasi pengesahan penerimaan hibah *Australia Awards in Indonesia* (AAI) s.d. 31 Desember 2022 sebesar AUD133.621.547,51 ekuivalen Rp1.367.647.817.250,85.

Paska berakhirnya Agreement Phase I program AAI periode 3 Juli 2014 s.d. 31 Desember 2022 dengan nilai komitmen sebesar AUD166.000.000,00 dan realisasi sebesar AUD133.621.547,51 ekuivalen Rp1.367.647.817.250,85, Pemerintah Australia melalui Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) tetap berkomitmen melanjutkan pemberian hibah program AAI kepada Pemerintah Indonesia yang dituangkan dalam agreement dan ditandatangani pada tanggal 28 September 2022 Nomor SA-28.06.2022 dengan nilai kontribusi sebesar AUS\$64.000.000,00 untuk jangka waktu sampai dengan 31 Desember 2026. Atas penandatanganan perjanjian hibah tersebut Satuan Kerja Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara telah mengajukan Register ke Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Setelment, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melalui Surat Nomor S-847/PR.08/2022 tanggal 22 Desember 2022 dengan Nomer Register 2BW3PPEA.

Adapun realisasi atas perjanjian hibah tersebut s.d. 31 Desember 2022 disajikan sebagai berikut:

Perjanjian Baru Nomor : SA-28.06.2022							
NO	TA	PENDAPATAN (AUD)	JUMLAH REALISASI		SALDO	NO. SP3HLBJS	Persetujuan MPHLBJS
			(AUD)	(Rp)			
			0,00	0,00		0,00	0,00
1	2022	9.395.288,00	6.406.196,01	64.924.753.329,00	2.989.091,99	MPHL-BJS NO. 3347T tanggal 31-12-2022	88062512792993000
2	2023	14.414.109,00	7.917.546,52	80.158.685.506,00	(2.472.439,17)	MPHL-BJS NO. 2477T tanggal 22-08-2023	811759633845248090
			8.969.001,65	89.444.792.332,00		MPHL-BJS No. 04201T tanggal 31-12-2023	814720665881310554
3	2024	16.028.803,00			16.028.803,00		
4	2025	16.986.923,00			16.986.923,00		
5	2026	7.174.877,00			7.174.877,00		
<b>Jumlah</b>		<b>64.000.000,00</b>	<b>23.292.744,18</b>	<b>234.528.231.167,00</b>	<b>40.707.255,82</b>		

## 2. Hibah Program MAHKOTA Dari Pemerintah Australia pada Satker Sekretariat Wakil Presiden

Hibah MAHKOTA (Masyarakat Indonesia yang Kokoh dan Sejahtera) merupakan hibah dari Pemerintah Australia setelah hibah PRSF berakhir. MAHKOTA memiliki tujuan untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif dan berkeadilan untuk seluruh Indonesia. MAHKOTA akan membantu memperkuat sistem perlindungan sosial yang ada agar lebih memenuhi kebutuhan kelas konsumen baru yang miskin dan rentan serta mengatasi kesenjangan dengan aktivitas dengan efektif. Program MAHKOTA mendukung 4 (empat) kerja utama:

1. Mendukung operasional dasar Sekretariat TNP2K;
2. Mendukung TNP2K untuk mencapai tujuannya;
3. Mendukung Lembaga dan/atau departemen Pemerintah Indonesia Lainnya;
4. Prioritas-prioritas Baru.

Program MAHKOTA dimulai tanggal 8 Januari 2016 dan akan berakhir pada 28 Februari 2023.

Sekretariat Wakil Presiden telah mengajukan registrasi hibah MAHKOTA dan Kementerian Keuangan telah menerbitkan nomor registrasi hibah melalui surat Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen dengan nomor S-1817/PR.8/2016 tanggal 24 Mei 2016

tentang Penerbitan Nomor Registrasi Hibah dengan nomor register **2SZWH4JA**.

Hibah MAHKOTA merupakan Hibah Barang dan Jasa dengan nilai komitmen sebesar maksimum AUD87.852.398,44. Kontribusi pemerintah Australia tersebut digunakan untuk pelaksanaan, pengelolaan, monitoring dan evaluasi kegiatan, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan program MAHKOTA.

Sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2023, telah dilaksanakan serah terima 3 (tiga) BAST Hibah Langsung Program MAHKOTA antara lain:

1. BAST Nomor: BAST-002/SWP/D-2/TNP2K/02/2023 tanggal 1 Februari 2023 terkait penyerahan jasa yang mendukung program MAHKOTA untuk periode kegiatan 1 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022. Telah dilakukan proses Pengesahan Hibah Langsung Jasa berdasarkan MPHL-BJS Nomor 810832111835425804 tanggal 11 Juli 2023 sebesar Rp95.329.799.237.
2. BAST Nomor: BAST-004/SWP/D-2/TNP2K/02/2023 tanggal 28 Maret 2023 terkait penyerahan jasa yang mendukung program MAHKOTA untuk periode kegiatan 1 Januari 2023 s.d 28 Februari 2023. Telah dilakukan proses Pengesahan Hibah Langsung Jasa berdasarkan MPHL-BJS Nomor 810832029835425802 tanggal 11 Juli 2023 sebesar Rp17.825.026.158.
3. BAST Nomor: BAST-001/SWP/D-2/TNP2K/02/2023 tanggal 1 Februari 2023 terkait penyerahan barang yang mendukung program MAHKOTA untuk periode kegiatan 1 Januari 2023 s.d 28 Februari 2023. Telah dilakukan proses Pengesahan Hibah Langsung Barang berdasarkan MPHL-BJS Nomor 810941170835425805 tanggal 11 Juli 2023 sebesar Rp1.496.242.499.

Sampai dengan Tahun 2023, jumlah keseluruhan realisasi Hibah Program MAHKOTA yang telah disahkan adalah sebesar Rp739.819.752.840,17 atau AUD71.754.027,90.

### **3. Hibah Program INEY dari Bank Dunia pada Satker Sekretariat Wakil Presiden**

Sejalan dengan Program Nasional Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat dengan Prioritas Nasional Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar sebagaimana tertutang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun

2019, Wakil Presiden pada tanggal 12 Juli 2017 meluncurkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting yang terdiri dari lima pilar, yaitu:

1. Komitmen dan visi pimpinan tertinggi negara.
2. Kampanye nasional berfokus pada pemahaman, perubahan, perilaku, komitmen, politik dan akuntabilitas.
3. Konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi program nasional, daerah, dan masyarakat.
4. Mendorong kebijakan gizi dan ketahanan pangan.
5. Pemantauan dan evaluasi.

Strategi Nasional ini memprioritaskan sejumlah intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif, dengan kelompok sasaran prioritas adalah rumah tangga dengan ibu hamil dan/atau anak berusia 0-24 bulan (selanjutnya diistilahkan dengan Rumah Tangga 1000 HPK). Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting menetapkan 100 kabupaten lokasi prioritas penanganan Tahun 2018, dan merencanakan perluasan penanganan secara bertahap sampai dengan seluruh kabupaten/kota tertangani pada 2021.

Untuk mendukung Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting, Bank Dunia memberikan hibah sebesar USD20,000,000.00 dengan nomor perjanjian PHLN TF A7565 tanggal 1 Agustus 2018 (tanggal efektif perjanjian 27 September 2018), telah memiliki nomor register 278EATNA dan akan berakhir pada 30 Desember 2023.

GFF adalah kemitraan pembiayaan yang mendukung negara-negara untuk berada pada jalur yang direncanakan untuk mencapai tujuan Sustainable Development Goals dengan memperkuat dialog antara pemangku kepentingan utama dibawah kepemimpinan pemerintah. Secara khusus, tujuan GFF adalah :

1. Mendukung identifikasi hasil-hasil prioritas yang akan mengarahkan semua mitra pembangunan untuk memberikan komitmen sumber daya untuk mencapai hasil-hasil prioritas tersebut;
2. Mendapatkan hasil yang lebih dari sumber daya yang ada dan mendorong peningkatan volume pembiayaan;
3. Memperkuat sistem untuk memantau kemajuan dan memperbaiki pelaksanaan program.

Sekretariat Wakil Presiden bertindak sebagai Koordinator Lembaga Pelaksana (Project Management Unit/PMU) sedangkan Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri merupakan dua lembaga pelaksana utama (Project Implementing Unit/PIU).

Selain Sekretariat Wakil Presiden, Bappenas, dan Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, terdapat Lembaga Pelaksana Program Lainnya yang bertanggungjawab atas capaian indikator yang terkait dengan tugas pokok dan fungsinya, Antara lain sebagai berikut:

1. Kementerian Kesehatan, bersama dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/kota bertanggungjawab untuk pelaksanaan intervensi spesifik.
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa bertanggung jawab untuk pelaksanaan intervensi gizi sensitif terkait bidang Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Kementerian Sosial bersama dengan Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota bertanggungjawab untuk melaksanakan intervensi sensitif terkait dengan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
4. Badan Pusat Statistik (BPS) bertanggungjawab untuk pelaksanaan mini survey anthropometry setiap tahun.

Pelaksanaan kegiatan percepatan pencegahan anak kerdil (stunting) Tahun Anggaran 2023 dianggarkan dalam DIPA Sekretariat Wakil Presiden pada nomenklatur (5958.ABG.001)/Hasil Analisis Kebijakan Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas kelembagaan dalam Pelaksanaan strategi Percepatan Pencegahan Stunting dengan pagu hibah Global Financing Facility (GFF) nomor TFOA7565 HLN sebesar Rp15.624.780.000 dan Rupiah Murni sebesar Rp299.370.000.

Adapun jumlah pagu dan realisasi kegiatan percepatan pencegahan anak kerdil (stunting) Semester I Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Kode	Program/Kegiatan/Output		Anggaran Semula	Anggaran setelah Revisi	Realisasi	%
(a)	(b)		(c)	(d)	(e)	(f)
<b>A</b>	<b>Jenis Intervensi: Intervensi Dukungan</b>					
007.01	Sekretariat Negara					
007.01.CA	Program Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden					
5958	Penyusunan Analisis Kebijakan kepada Wakil Presiden Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan		4.000.000.000	15.924.150.000	15.834.132.462	99,43
5958.ABG.001	Hasil Analisis Kebijakan Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas kelembagaan dalam Pelaksanaan strategi Percepatan Pencegahan Stunting		4.000.000.000	15.924.150.000	15.834.132.462	99,43
<b>TOTAL</b>			<b>4.000.000.000</b>	<b>15.924.150.000</b>	<b>15.834.132.462</b>	<b>99,43</b>

#### **L. Gedung Veteran RI (Plaza Semanggi)**

Yayasan Gedung Veteran RI (YGVRI) adalah badan hukum independen yang didirikan para tokoh veteran dari kalangan ABRI maupun sipil dengan akte notaris R. Soerojo Wongsowidjojo Nomor 40, tanggal 26 September 1969. Kepemilikan tanah dan bangunan gedung Veteran RI adalah milik Yayasan Gedung Veteran RI (YGVRI) yang dibeli dari iuran semua anggota Veteran dan sumbangan dari anggota maupun pihak luar yang tidak mengikat (bukan dari APBN).

Tanggal 26 Februari 1973, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan sertipikat HGB Nomor 27/Karet Semanggi atas nama Yayasan Gedung Veteran RI (YGVRI) yang terletak di Jl. Sudirman Kav. 50 Jakarta, sertipikat tersebut berlaku untuk 20 tahun. Di tahun 1973 s.d. 1977, timbul perbedaan pendapat diantara para anggota mengenai kepemilikan gedung tersebut. Pada tahun 1977 Presiden Soeharto menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 4 tahun 1977, yang menyatakan bahwa:

1. Pemilik tanah dan bangunan gedung adalah negara (c.q. Kementerian Sekretariat Negara).
2. Penguasaan dan pengelolaan gedung adalah Yayasan Gedung Veteran RI (YGVRI).
3. Yayasan wajib:
  - i. Memelihara gedung untuk kepentingan veteran dan masyarakat umum.
  - ii. Menyampaikan laporan pengelolaan kepada Presiden RI.

Telah dibentuk Tim Penyelesaian Permasalahan atas aset Plaza Semanggi dipimpin Direktur Barang Milik Negara II DJKN Kementerian Keuangan. Namun dengan adanya perubahan struktur organisasi dan tata laksana di lingkungan DJKN, sampai dengan berakhirnya periode pelaporan BMN TA 2016 belum ada tindak lanjut atas permasalahan tersebut. Yayasan Gedung Veteran RI (YGVRI) merupakan Unit Badan Lainnya (UBL) dan menyampaikan Laporan Keuangan serta Ikhtisar Laporan Keuangan secara langsung kepada Kementerian Keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2013 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 235/PMK.05/2011 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya.

**M. Proses Penyelesaian Penetapan Status Tanah PPKGBK**

No	Nama Kementerian/ Lembaga	Luas (m <sup>2</sup> )	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Tanah Kemempora/ Graha Pemuda	26,915	493.082.800.00 0,00	Kementerian Pemuda dan Olahraga telah mendapatkan Perjanjian Penggunaan Sementara dengan Nomor: PERJ-09/Kemensetneg/Ses/12/2020 dan Nomor: PL.02.04/12.14.2/SET.BIII/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 dengan masa hak pakai selama 5 (lima) tahun dari 14 Desember 2020 s/d 14 Desember 2025.
2	Tanah LPP TVRI	46,791	857.211.120.00 0,00	Pencatatan ganda pada neraca SIMAK TVRI dan PPKGBK. TVRI mencatat sebagai asetnya berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 27/Gelora Tahun 1979 tanggal 11 September 1979, sedangkan PPKGBK HPL 1/Gelora Tahun 1989 berdasarkan Keputusan Kepala BPN Nomor 169/HPL/BPN/1989, proses penetapan status ataupun pencatatan ganda dimaksud ada pada Kemenkeu Cq. DJKN.  Melalui Surat S-88/KN.2/2023 perihal Tindak Lanjut Penyelesaian Pencatatan Ganda untuk Kementerian Sekretariat Negara dengan TVRI, telah disampaikan pedoman koreksi atas pencatatan tanah pada Kementerian Sekretariat Negara untuk ditindaklanjuti dalam penyajian laporan keuangan tahun 2022 sesuai pembahasan rapat pada 29 Maret 2023, sehingga dilakukan koreksi nilai tanah sebesar Rp5.670.755.288.360,00 namun tidak mengurangi atau mengubah HPL kawasan PPKGBK.
3	Tanah Kementerian Pendidikan Nasional	40,345	788.179.920.00 0,00	Kementerian Pendidikan Nasional telah mendapatkan Perjanjian Penggunaan Sementara dengan Nomor: PER-07/Kemensetneg/Ses/03/2017 dan Nomor: BAST-21/Kemensetneg/Set/Um/2017 dan Nomor: 12313/A.63/LK/2017 tanggal 03 Mei 2017 dengan masa hak pakai selama 5 (lima) tahun. Selanjutnya, penggunaan sementara oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi diperbaharui melalui Perjanjian Penggunaan Sementara BMN Tanah Jalan Jenderal Sudirman dan Gatot Subroto Nomor: 07/KSN/S/05/2022 (09/V/PK5/2022) dengan masa

				penggunaan sementara selama 5 (lima) tahun dari tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2027 dan dapat diperpanjang atas persetujuan Pihak Pertama (PPKGBK).
4	Tanah Kehutanan/Manggala Wana Bhakti	100,023	1.847.224.764.000,00	Kementerian Kehutanan telah mendapatkan Perjanjian Penggunaan Sementara dengan Nomor: 17/KSN/S/11/2021 dan Nomor: PKS.9/SETJEN/ROUM/KAP.3/11/2021 tanggal 10 November 2021 dengan masa pinjam pakai selama 5 (lima) tahun dari tanggal 21 Oktober 2021 s.d 21 Oktober 2026.
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tanah Kelurahan Gelora</li> <li>➤ Tanah SMUN 24</li> <li>➤ Tanah Puskesmas Gelora</li> </ul>	1,611 2,997 402	29.513.520.000,00 46.570.982.400,00 6.368.644.800,00	Pencatatan ganda pada neraca SIMAK Pemprov dan PPKGBK, Pemprov mencatatkan sebagai asetnya berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 30 Tahun 1981 dan Nomor 32 Tahun 1983 dan PPKGBK mencatatkan berdasarkan Nomor HPL 1/Gelora Tahun 1989 berdasarkan Keputusan Kepala BPN Nomor 169/HPL/BPN/1989, proses penetapan status ataupun pencatatan ganda dimaksud ada pada Kemenleu cq. DJKN.
6	Tanah Sekretariat Jenderal DPR/MPR RI	385,003	7.281.176.736.000,00	Perjanjian Penggunaan Sementara dengan Nomor PER 05/Kemensekneg/Ses/04/2021 dan Nomor SJ/05556/SETJEN DPR RI/PK.04/04/2021 tanggal 19 April 2021 berlaku selama 3 (tiga) tahun dari tanggal 18 Agustus 2021 s.d 18 Agustus 2024.
7	Stasiun Palmerah			Untuk naskah pinjam pakai masih berada di biro hukum DKI Jakarta untuk di tandatangi oleh Sekretaris Daerah DKI Jakarta untuk masa pemakaian selama 3 (tiga) tahun.

## N. Aset Dalam Proses Peradilan PPKGBK

### A. PT Indobuildco

#### 1. Permohonan Peninjauan Kembali oleh PPKGBK dan Eksekusi Putusan PK

- a. PT Indobuildco melakukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan perkara Nomor 952/PDT.G/2006/PN.JKT.Sel melawan PPKGBK (Tergugat II) dengan inti gugatan: menyatakan cacat hukum Surat Keputusan Tergugat I Nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang pemberian HPL atas nama Sekretariat Negara cq BPGBK sepanjang menyangkut HGB No. 26/Gelora dan HGB Nomor 27/Gelora atas nama PT Indobuildco.
- b. Dalam putusan Pengadilan Negara Jakarta Selatan Nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel tanggal 08 Januari 2007, putusan

- Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 262/Pdt/2007/PT.DKI tanggal 22 Agustus 2007 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juli 2008, gugatan PT Indobuildco dikabulkan sebagian.
- c. PPKGBK mengajukan PK kepada Mahkamah Agung dan pada tanggal 23 November 2011 dengan putusan Nomor 276 PK/Pdt/2011 (salinan Putusan diterima PPKGBK tanggal 12 Maret 2012), MA mengabulkan PK PPKGBK dengan inti putusan sebagai berikut:
- ✓ mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi (PPKGBK) untuk sebagian;
  - ✓ menyatakan sah Surat Keputusan Kepala BPN Nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989; dan
  - ✓ menghukum Tergugat Rekonvensi (PT. Indobuildco) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi royalti penggunaan tanah HPL atas nama Penggugat dalam Rekonvensi (PPKGBK) beserta bunga dan denda sebesar US\$2.251.500,00.
- d. Pada tanggal 22 Maret 2013 Menteri Sekretaris Negara telah memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Jaksa Agung RI melalui Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-01/M.Sesneg/03/2013 untuk melaksanakan eksekusi terhadap Putusan PK Mahkamah Agung RI Nomor 276 PK/Pdt/2011, selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2013 Jaksa Agung RI memberi kuasa substitusi kepada 7 (tujuh) orang Jaksa Pengacara Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) melalui Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-028/A/JA/03/2013 (Tim Kuasa Hukum).
- e. Pada tanggal 8 April 2013, Direktur Utama PPKGBK melalui SK Nomor 24 Tahun 2013 telah membentuk Tim Pelaksana Eksekusi Putusan PK Mahkamah Agung RI Nomor 276 PK/Pdt/2011 yang terdiri dari unsur internal, Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan, dan Badan Pertanahan Nasional.
- f. Tim Kuasa Hukum mengundang PT Indobuildco agar bersedia melaksanakan eksekusi secara sukarela.
- g. Pada pertemuan antara Tim Kuasa Hukum dengan PT Indobuildco yang diselenggarakan pada tanggal 5 September 2013, Tim Kuasa Hukum pada intinya melaporkan bahwa PT Indobuildco beritikad baik dan bersedia untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana terdapat dalam Putusan PK Mahkamah Agung Nomor 276 PK/Pdt/2011 secara sukarela.

- h. PT Indobuildco selanjutnya mengajukan permohonan penangguhan pelaksanaan eksekusi selama 6 (enam) bulan (sampai dengan akhir tahun 2013) dan menanyakan perihal hak-hak keperdataan PT Indobuildco melalui surat tanpa nomor tertanggal 19 September 2013.
- i. Pada tanggal 26 Juli 2013, JAMDATUN melalui Direktur Perdata menyampaikan surat Nomor B-280/G/G.2/7/2013 kepada PT Indobuildco perihal permohonan penangguhan pelaksanaan eksekusi agar dapat diselesaikan dalam tahun 2013.
- j. Terkait masalah hak-hak keperdataan, PPKGBK bersama Tim Kuasa Hukum telah beberapa kali melakukan koordinasi terakhir pada tanggal 27 Agustus 2013 dengan mengundang seluruh anggota Tim.
- k. Pada tanggal 25 September 2013 Tim Kuasa Hukum kembali melakukan rapat dengan PT Indobuildco, selanjutnya hasil rapat beserta langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Tim Kuasa Hukum akan dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan Eksekusi Putusan PK Mahkamah Agung Nomor 276 PK/Pdt/2011 kepada Menteri Sekretaris Negara selaku Pemberi Kuasa.
- l. Pada tanggal 23 Oktober 2013, Jaksa Agung RI menyampaikan surat Nomor B-195/A/Gp.2/10/2013 kepada Menteri Sekretaris Negara perihal Laporan Perkembangan Penanganan Perkara Pelaksanaan Eksekusi Putusan PK MA RI Nomor 276 PK/Pdt/2011.
- m. Pada tanggal 20 November 2013, Tim Kuasa Hukum kembali mengundang PT Indobuildco untuk menanyakan kesanggupan PT Indobuildco untuk melaksanakan Putusan PK Nomor 276 PK/Pdt/2011 pada akhir tahun 2013.
- n. PPKGBK mengirimkan surat Nomor 488/PPKGBK/Dirut/11/2013 tanggal 8 November 2013 perihal Pelaksanaan eksekusi Putusan PK Mahkamah Agung Nomor 276PK/Pdt/2011 kepada JAMDATUN yang intinya PPKGBK mohon agar eksekusi putusan PK Mahkamah Agung tersebut, dapat direalisasikan sebelum akhir tahun 2013.
- o. Pada tanggal 23 Januari 2014 Direktur Utama PPKGBK berkirim surat kepada Jaksa Agung Muda Peradatan dan Tata Usaha Negara melalui surat Nomor B-32/PPKGBK/Dirut/01/2014 perihal Permohonan Eksekusi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 276 PK/Pdt/2011 tanggal 23 November 2011. Surat ini merupakan

tindak lanjut surat Nomor 488/PPKGBK/ Dirut/11/2013 tanggal 8 November 2013 perihal Pelaksanaan eksekusi Putusan PK Mahkamah Agung No. 276PK/Pdt/2011 yang disampaikan kepada JAMDATUN yang intinya PPKGBK mohon agar eksekusi putusan PK Mahkamah Agung tersebut, dapat direalisasikan sebelum akhir tahun 2013.

- p. Pada tanggal 17 Februari 2014 Direktur Utama PPKGBK menyampaikan surat kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional RI melalui surat Nomor B-53/PPKGBK/Dirut/02/2014 perihal Permohonan Peninjauan Kembali HGB Nomor 26/Gelora dan HGB Nomor 27/Gelora.
- q. Pada tanggal 21 Maret 2014 Kementerian Sekretariat Negara Cq. Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno (PPKGBK) melalui kuasa hukum Jaksa Pengacara Negara telah menyampaikan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perihal Permohonan Eksekusi atas Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 276 PK/Pdt/2011 tanggal 23 November 2011 antara Sekretariat Negara Cq. Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Bung Karno (dh. Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan) (Pemohon Eksekusi) dengan PT Indobuildco (Termohon Eksekusi).
- r. Pada tanggal 20 Mei 2014 Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menetapkan Penetapan Nomor 25/Eks.Pdt/2014 jo. Nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel untuk melakukan pemanggilan kepada PT Indobuildco pada hari Rabu, 11 September 2014.
- s. Sesuai jadwal, pada hari Rabu, 11 September 2014 PPKGBK dengan didampingi Kuasa Hukum Jaksa Pengacara Negara menghadiri anmaning terhadap PT Indobuildco, tetapi ternyata tidak dihadiri oleh PT Indobuildco dan PT Indobuildco belum menunjuk Kuasa Hukum.
- t. Oleh Panitera PN Jakarta Selatan ditetapkan tanggal 2 Juli 2014 pukul 10.00 WIB untuk dilakukan Pemanggilan ke-2 kepada PT Indobuildco.
  - ✓ Dalam Aanmaning tersebut Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghimbau kepada Termohon Eksekusi untuk segera melaksanakan amar putusan PK secara sukarela dalam waktu 8 (delapan) hari.
  - ✓ Atas himbauan tersebut, Termohon Eksekusi mengajukan surat permohonan penangguhan pelaksanaan eksekusi dengan alasan bahwa Termohon Eksekusi sedang

- melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali kedua atas Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 276 PK/Pdt/2011 tanggal 23 November 2011.
- ✓ Dalam Aanmaning ke-2 tersebut, baik PPKGBK maupun Jaksa Pengacara Negara menyatakan bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh PT Indobuildco tidak menghalangi eksekusi terhadap Putusan PK yang telah berkekuatan hukum tetap.
  - ✓ Untuk selanjutnya kami akan memohon pihak Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan permohonan sita eksekusi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- u. Jaksa Agung RI menyampaikan surat kepada Menteri Sekretaris Negara Nomor B-122/A/Gp.2/07/2014 tanggal 14 Juli 2014 perihal Laporan Aanmaning atas Permohonan Eksekusi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 276 PK/Pdt/2011 tanggal 23 November 2011.
- v. Pada tanggal 25 Agustus 2014 Menteri Sekretaris Negara menyampaikan surat kepada Jaksa Agung Nomor R.109/M.Sesneg/D-4/PU.10.01/8/2014 perihal Laporan Jaksa Agung Terkait Penundaan Eksekusi atas Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 276 PK/Pdt/2011 tanggal 23 November 2011.
- w. Pada tanggal 12 September 2014, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) mengundang Direktur Utama PPKGBK untuk menindaklanjuti surat Menteri Sekretaris Negara tersebut di atas melalui surat Nomor B.277/C/Gp.2/9/2014. Rapat telah dilaksanakan pada tanggal 18 September 2014 di Gedung JAMDATUN Kejaksaan Agung RI dan dihadiri oleh Jaksa Pengacara Negara dan wakil PPKGBK.
- x. Pada tanggal 25 September 2014 PPKGBK telah mengadakan rapat koordinasi yang dihadiri perwakilan dari Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan, BPN Pusat, dan Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, dengan hasil sebagai berikut:
- ✓ BPN segera menyelesaikan kajian dalam rangka mengkoreksi/merevisi HGB Nomor 26/Gelora dan HGB No. 27/Gelora guna melaksanakan Putusan PK MA Nomor 276 PK/Pdt/2011 tanggal 23 November 2011.
  - ✓ Hasil koreksi dari BPN atas HGB Nomor 26/Gelora dan HGB Nomor 27/Gelora, akan dijadikan sebagai salah satu

- pedoman bagi Jaksa Pengacara Negara untuk menindaklanjuti permohonan eksekusi.
- ✓ PPKGBK mengajukan permohonan penilaian ke DJKN untuk menentukan besaran royalti dari tahun 2006 sampai seterusnya.
  - ✓ Mengenai teknis eksekusinya apakah yang akan dilelang tanah dan bangunan atau bangunannya saja, perwakilan dari Kementerian Keuangan akan membahasnya secara internal.
- y. Pada tanggal 9 September 2015 bertempat di Ruang Rapat Direktorat Penilaian DJKN Kementerian Keuangan telah dilaksanakan rapat terkait permohonan penilaian besaran royalti, yang hasil rapatnya dituangkan dalam surat DJKN Kementerian Keuangan Nomor S-1409/KN/2015 tanggal 26 Oktober 2015. Inti surat tersebut adalah PPKGBK dapat berkoordinasi dengan Kemensetneg terkait pelaksanaan Putusan PK MA Nomor 187PK/Pdt/2014 dan dapat terus berkoordinasi dengan DJKN dalam penyelesaian masalah PT Indobuildco.
- z. Pada tanggal 15 Oktober 2015 PPKGBK telah mengundang PT Indobuildco untuk membahas masalah eksekusi Putusan PK MA Nomor 276 PK/Pdt/2011 tanggal 23 November 2011 atau dalam hal ini lebih tepatnya adalah Putusan PK ke-2 MA Nomor 187 PK/Pdt/2014 tanggal 19 Desember 2014. Hasil Rapat dituangkan dalam Berita Acara Rapat.
- aa. Pada tanggal 29 Oktober 2015 Direktur Utama PPKGBK menyampaikan surat Nomor B.197/PPKGBK/Dirut/10/2015 kepada PT Indobuildco perihal Tindak Lanjut atas Berita Acara Rapat antara PPKGBK dengan PT Indobuildco tanggal 15 Oktober 2015.
- bb. Pada tanggal 17 Desember 2015, PT Indobuildco menyampaikan surat Nomor 027/PTI-Dir/XII/2015 kepada PPKGBK perihal Naskah Kesepakatan dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan PK MA.
- cc. PPKGBK telah menyampaikan surat kepada PT. Indobuildco tanggal 28 Maret 2016 Nomor B-35/PPKGBK/Dirut/03/2016 perihal Penyampaian Draft Naskah Kesepakatan dan Draft Berita Acara Pelaksanaan Putusan PK MA RI.
- dd. PPKGBK dan PT.Indobuildco pada tanggal 08 Desember 2016 telah mendatangi Berita Acara Pelaksanaan Putusan PK secara Sukarela atas Putusan MA RI Nomor

276PK/Pdt/2011 tanggal 23 November 2011 Jo. 187/PK/Pdt/2014 tanggal 19 Desember 2014.

ee. Pada tanggal 15 Desember 2016 PT. Indobuildco membayar Anggsuran I sebesar US\$1.500.000,00 dan Anggsuran II PT. Indobuildco membayar sebesar US\$751.500,00

PPKGBK dan PT. Indobuildco sedang memproses pembahasan Naskah Kesepakatan pembayaran royalty penggunaan HGB di atas HPL untuk periode 2007 sampai dengan berakhirnya jangka waktu HGB tahun 2023.

## **2. Penyusunan Kontra Memori Peninjauan Kembali Ke-2 terhadap Peninjauan Kembali yang diajukan PT. Indobuildco**

a. Terhadap Putusan PK Nomor 276 PK/Pdt/2011 tersebut, pada tanggal 11 Desember 2013 PT Indobuildco mengajukan Memori Peninjauan Kembali ke-2.

b. Pada tanggal 10 Januari 2014 PT Indobuildco telah menyerahkan Memori Peninjauan Kembali (PK) yang kedua atas Putusan PK Mahkamah Agung RI Nomor 276 PK/Pdt/2011 tanggal 23 November 2011.

c. Pada tanggal 16 Januari 2014 PPKGBK melakukan koordinasi dengan instansi terkait, yaitu: Kementerian Sekretariat Negara, Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan, Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta dan Kantor Pertanahan Jakarta Pusat.

d. Dalam rangka penyusunan Kontra Memori PK yang kedua, pada tanggal 20 Januari 2014, Direktur Utama PPKGBK mengeluarkan Keputusan Direktur Utama Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Penyusun Kontra Memori Peninjauan Kembali yang Kedua Atas Putusan PK Mahkamah Agung RI Nomor 276 PK/Pdt/2011 tanggal 23 November 2011 antara Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno dengan PT Indobuildco.

e. Pada tanggal 28 Januari 2014 Menteri Sekretaris Negara menyampaikan surat kepada Jaksa Agung RI Nomor B-81/M.Sesneg/Setmen/01/2014 perihal Penyampaian Surat Kuasa Khusus Menteri Sekretaris Negara kepada Jaksa Agung RI untuk menangani upaya hukum sebagai Termohon Peninjauan Kembali Luar Biasa II atas Putusan Peninjauan Kembali Nomor 276 PK/Pdt/2011 tanggal 23 November 2011.

f. Pada tanggal 28 Januari 2014 ditandatangani Surat Kuasa Khusus dengan hak substitusi Nomor SK-01/M.Sesneg/01/2014 dari Menteri Sekretaris Negara kepada

- Jaksa Agung RI yang ditindaklanjuti dengan Surat Kuasa Substitusi dari Jaksa Agung RI kepada Tim Jaksa Pengacara Negara dengan Nomor SK-005/A/JA/01/2014 tanggal 30 Januari 2014.
- g. Pada tanggal 6 Februari 2014 Kuasa Hukum Jaksa Pengacara Negara telah menyampaikan Kontra Memori Kasasi kepada Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- h. Pada tanggal 11 Maret 2014, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Surat Nomor W10.U3.706/HK.02/III/2014 telah mengirimkan berkas Peninjauan Kembali (PK) Nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel ke Panitera Mahkamah Agung RI.
- i. Pada tanggal 19 Desember 2014, Mahkamah Agung RI melalui Putusan PK Nomor 187 PK/Pdt/2014 menyatakan menolak permohonan Peninjauan Kembali PT. Indobuildco (Surat Pemberitahuan Isi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 187 PK/Pdt/2014 diterima oleh PPKGBK pada tanggal 30 Juli 2015).
- j. Pada tanggal 8 Desember 2016, PPKGBK dan PT. Indobuildco telah menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali Secara Sukarela Atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 276 PK/PDT/2011 tanggal 23 November 2011 Jo. 187 PK/Pdt/2014 tanggal 19 Desember 2014. Inti Berita Acara tersebut adalah PT. Indobuildco bersedia membayar USD2,251,500.00 kepada PPKGBK, yang pelaksanaannya dilakukan 2 kali, yaitu USD1,500,000.00 paling lambat tanggal 15 Desember 2016 dan USD 751,500.00 paling lambat dilakukan tanggal 15 Agustus 2017.
- k. PPKGBK sedang dalam proses agar Pihak PT. Indobuildco membayar royalti penggunaan tanah HPL No.1/Gelora yang diperhitungkan dari tanggal 04 Maret 2007 sampai dengan berakhirnya jangka waktu HGB No.26/Gelora dan HGB No.27/Gelora yaitu pada tanggal 04 Maret 2023 adalah sebesar US\$ 350,000.00 (tiga ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) per tahun mengacu pada Putusan Peninjauan Kembali No.276/PK/Pdt/2011 tanggal 23 November 2011 dengan cara angsuran sebagai berikut:
- ✓ Untuk periode tanggal 4 Maret 2007 sampai dengan 4 Maret 2018 sebesar 12 (tahun) x US\$ 350,000.00 = US\$ 4,200,00.00 diangsur mulai 4 Maret 2019 sampai dengan 4 Maret 2022 secara prorata.

- ✓ Angsuran I sebesar US\$ 350,000.00 +  $\frac{1}{4}$  (US\$ 4,200,000.00) = US\$ 1,400,000.00 dibayar paling lambat pada tanggal 4 Maret 2019.
  - ✓ Angsuran II sebesar US\$ 1,400,000.00 dibayar paling lambat tanggal 4 Maret 2020.
  - ✓ Angsuran III sebesar US\$ 1,400,000.00 dibayar paling lambat tanggal 4 Maret 2021.
  - ✓ Angsuran IV sebesar US\$ 1,400,000.00 dibayar paling lambat tanggal 4 Maret 2022.
- i. Pada tanggal 05 September 2018 PPKGBK dan PT. Indobuildco membuat perjanjian Nomor : Perjan.52/PPKGBK/Dirut/09/2018 perihal penggunaan tanah untuk jalur keluar kompleks Hotel Sultan antara Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno dengan PT.Indobuildco dengan masa perjanjian selama 3 (tiga) tahun dari 2016 sampai dengan 2018 dengan kontrak perjanjian sebesar Rp.4.015.772.640,00 (termasuk PPN) dan PT. Indobuildco telah membayar kewajiban tersebut pada tanggal 05 Oktober 2018.

### **3. Penyusunan Kontra Memori Peninjauan Kembali Ke-3 terhadap Peninjauan Kembali yang diajukan PT. Indobuildco**

- a. Sedang dalam Proses Upaya Hukum Peninjauan Kembali Ke III serta PPKGBK melalui Kuasa Hukum Kejaksaan Agung Bagian Jamdatun telah menyerahkan Kontra Memori Pada hari Jumat 10 Juli 2020.
- b. Berdasarkan Relas Pemberitahuan isi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I Perkara Nomor: 837 PK/Pdt/2020 pada hari selasa tanggal 25 Mei 2021 telah diberitahukan bahwa Mahkamah Agung memberikan Putusan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan “Menyatakan Permohonan Peninjauan Kembali Ketiga dari Pemohon Pemohon Peninjauan Kembali Ketiga: PT. Indobuildco tersebut tidak dapat diterima, namun hingga saat ini hasil putusan secara resmi belum diterima oleh PPKGBK.
- c. Tanggal 21 September 2021, PT Indobuilco menyerahkan permohonan PK IV dan diterima Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 8 Juli 2021 selanjutnya diserahkan ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selaku pengadilan yang memutus Perkara ini ditingkat Pertama.

- d. BPN menerima Relas PK IV pada tanggal 30 Agustus 2021 dan Kejaksaan Agung menerima Relas PK IV pada tanggal 1 September 2021, namun Kementerian Sekretariat Negara sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021, belum menerima.
  - e. Kementerian Sekretariat Negara bersurat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor T-01/D-3/Ortala-HRT/HK.06.00/10/2021 pada tanggal 4 Oktober 2021, perihal Permohonan Klarifikasi Relas Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke IV PT Indobuilco.
  - f. Kementerian Sekretariat Negara menerima Relas Pemberitahuan dan penyerahan Memori Peninjauan Kembali (PK) ke IV Nomor 952/PDT.G/2006/PN.JKT.SEL pada tanggal 8 Oktober 2021.
  - g. Kementerian Sekretariat Negara cq PPKGBK telah melakukan koordinasi dengan Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Agung untuk menyiapkan dan memfinalisasi Kontra Memori PK ke IV dan akan dilakukan konsinyering pada awal November 2021.
- 4. Penyusunan Kontra Memori Peninjauan Kembali Ke-4 terhadap Peninjauan Kembali yang diajukan PT. Indobuildco**
- a. Sedang dalam Proses Upaya Hukum Peninjauan Kembali Ke IV serta PPKGBK melalui Kuasa Hukum Kejaksaan Agung Bagian Jamdatun Telah menyerahkan Kontra Memori Pada hari Selasa 28 September 2021.
  - b. Berdasarkan Relas Pemberitahuan isi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I Perkara Nomor 408 PK/Pdt/2022 pada hari selasa tanggal 21 September 2022 telah diberitahukan bahwa Mahkamah Agung memberikan Putusan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan “Menyatakan Permohonan Peninjauan Kembali Keempat I dan III dari Pemohon Peninjauan Kembali Ketiga: PT Indobuildco tersebut tidak dapat diterima.
- 5. Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Hukum**
- a. Pada tanggal 31 Maret 2023, Kemensetneg cq PPKGBK melalui Ketua Dewan Pengawas PPKGBK melakukan siaran pers terkait rencana pengambil alihan lahan ex HGB Nomor 26/GeloradanNomor 27/Gelora oleh Kemensetneg cq PPKGBK yang berakhir pada tanggal 3 Maret 2023. Kementerian Sekretariat Negara melalui PPKGBK mengakui

- Lahan Hotel Sultan menjadi milik negara kembali sesuai dengan Putusan Peninjauan Kembali Perkara Perdata Nomor 276PK/Pdt/2011 tanggal 23 November 2011 (PK 1).
- b. Pada tanggal 8 Mei 2023 telah diputuskan putusan sela yang inti amar putusannya mengabulkan permohonan intervensi PPKGBK sehingga menjadi Tergugat II Intervensi 2.
  - c. Pada tanggal 19 Juni 2023 telah diadakan sidang dengan agenda penyerahan dokumen pembuktian, Tim Kuasa Hukum GBK telah menyerahkan bukti eksepsi, untuk bukti pokok perkara akan diserahkan pada sidang pembuktian ke-2 (tanggal 3 Juli 2023).
  - d. Pada tanggal 27 Juli 2023 telah diadakan sidang terkait saksi ahli dari Tergugat 2 Intervensi II menyerahkan affidavit yang disampaikan oleh tim kuasa hukum PPKGBK di sidang pemeriksaan saksi ahli tersebut.
  - e. Pada tanggal 7 Agustus 2023 sidang dengan agenda penyampaian kesimpulan para pihak melalui e-court.
  - f. Pada tanggal 21 Agustus 2023 sidang pembacaan putusan melalui e-court ditunda pembacaan putusan melalui e-court tanggal 28 Agustus 2023.
  - g. Pada tanggal 28 Agustus 2023 telah keluar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor Perkara 71/G/2023/PTUN.JKT, melalui e-Court. Pada tanggal yang sama, dilakukan konferensi pers untuk menyampaikan amar Putusan PTUN tersebut bertempat di Gedung Utama Kementerian Sekretariat Negara yang dihadiri oleh Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Direktur Utama PPKGBK dan Tim Kuasa Hukum PPKGBK.
  - h. Pada tanggal 14 September 2023 PT. Indobuildco menyampaikan Memori Banding kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
  - i. Pada tanggal 4 Oktober 2023 PPKGBK bersama Tim Kuasa Hukum PPKGBK melakukan deklarasi pemasangan spanduk di Blok 15 (sekitar Hotel Sultan) yang menyatakan bahwa Tanah Blok 15 adalah asset negara berdasarkan HPL No. 1/Gelora atas nama Sekretariat Negara cq PPKGBK dan telah dinyatakan sah oleh Putusan PK MA No. 276PK/Pdt/2011. PPKGBK didampingi Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara dan Tim Kuasa Hukum PPKGBK mengadakan Press Conference terkait penyampaian pengosongan lahan di Blok 15.

- j. Pada tanggal 9 Oktober 2023 PT. Indobuildco mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- k. Pada tanggal 23 Oktober 2023 PPKGBK dan Tim Kuasa Hukum menghadiri sidang perdana atas gugatan PT Indobuildco Nomor: 667/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- l. Pada tanggal 30 Oktober 2023 PPKGBK dan Tim Kuasa Hukum menghadiri sidang kedua atas gugatan PT Indobuildco Nomor: 667/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan agenda pemeriksaan legalitas Para Pihak.
- m. Pada tanggal 15 November 2023 PT Indobuildco menggugat Kembali PPKGBK di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor 580/G/TF/2023/PTUN.JKT atas Tindakan factual yang dilakukan oleh PPKGBK yang menutup akses masuk keluar kompleks Hotel Sultan, pembuatan gerbang berikut pos penjagaan, pemasangan spanduk dan plang bertuliskan "TANAH INI ASET NEGARA MILIK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN HPL NOMOR 1/GELORA ATAS NAMA SEKRETARIAT NEGARA C.Q. PPKGBK DAN TELAH DINYATAKAN SAH OLEH PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 276 PK/PDT/2011".
- n. Pada tanggal 22 November 2023 telah dilaksanakan sidang pemeriksaan persiapan untuk perkara PT Indobuildco Nomor 580/G/TF/2023/PTUN.JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
- o. Pada tanggal 28 November 2023, telah dilaksanakan sidang dengan agenda bacaan gugatan/penyampaian perubahan gugatan yg diajukan oleh PT Indobuildco perkara Nomor: 667/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst.
- p. Pada tanggal 5 Desember 2023, telah diadakan sidang dengan agenda pemeriksaan persiapan kedua untuk Perkara PTUN 580/G/TF/2023/PTUN.JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
- q. Pada tanggal 6 Desember 2023, telah keluar putusan Nomor 310/B/2023/PT.TUN.JKT atas Putusan banding PTUN Jakarta No.71/G/2023/PTUN.JKT.
- r. Pada tanggal 12 Desember 2023 telah dilaksanakan sidang e-court pada perkara Nomor. 667/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst dengan agenda pengajuan jawaban oleh Para Tergugat.

- s. Pada tanggal 13 Desember 2023 telah dilaksanakan sidang atas perkara Nomor 580/G/TF/2023/PTUN.JKT melalui e-court dengan agenda pemeriksaan persiapan ketiga.
- t. Pada tanggal 19 Desember 2023, telah dilaksanakan sidang e-court pada perkara Nomor. 667/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst dengan agenda pengajuan permohonan provisi, replik terhadap tergugat I, III, dan IV, dan Bukti awal.
- u. Pada tanggal 20 Desember 2023 telah dilaksanakan sidang atas perkara Nomor 580/G/TF/2023/PTUN.JKT dengan agenda pembacaan gugatan Penggugat.
- v. Pada tanggal 22 Desember 2023 PT Indobuildco mengajukan permohonan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 310/B/2023/PT.TUN.JKT terhadap perkara Nomor 71/G/2023/PTUN-JKT, panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara telah menyampaikan pemberitahuan melalui surat tertanggal 29 Desember 2023 yang mana pemberitahuan tersebut telah diterima PPKGBK pada tanggal 2 Januari 2024.
- w. Pada tanggal 27 Desember 2023, telah dilaksanakan sidang e-court perkara Nomor. 667/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst, dengan agenda pengajuan Duplik oleh Para Tergugat.

## **O. Informasi Penting Lainnya**

### **1. PT Archipelago Sapta Pesona (PT. ASP)**

Perjanjian kerjasama Bangun Guna Serah (BGS) antar BPGBK dengan PT ASP di kawasan Blok 10 Gelora Bung Karno yang ditandatangani pada tanggal 2 Mei 2007 dengan jangka waktu 30 tahun bertujuan untuk merevitalisasi fasilitas-fasilitas olahraga yang berstandar internasional. Hal tersebut karena terdapat prasarana/gedung olahraga yang kondisinya secara teknis sudah sangat tua (dibangun tahun 1960), sehingga sudah tidak memungkinkan lagi dimanfaatkan untuk memajukan prestasi olahraga secara nasional. Dengan surat Nomor S-439/MK.6/2010 tanggal 9 Desember 2010 yang ditujukan kepada Sesmensesneg, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa permohonan ijin penghapusan bangunan Blok 10 GBK sebagaimana diajukan oleh Sesmensesneg dengan surat Nomor B-3795/Setneg/Sesmen/06/2010 tanggal 18 September 2010 dan kelengkapannya diajukan oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Negara dengan surat Nomor B-226/Setneg/Setmen/Um/07/2010 tanggal 27 Juli 2010, dinyatakan belum bisa diproses dan dikembalikan ke

Sekretariat Negara untuk dikaji ulang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007. Pada tanggal 14 Maret 2011 dilakukan rapat koordinasi antara PPKGBK/Kementerian Sekretariat Negara dengan Direktorat BMN I, Kementerian Keuangan disampaikan bahwa perlu diadakan addendum Perjanjian Kerjasama BOT sesuai dengan PP No.6 Tahun 2006. PPKGBK terus berusaha untuk memperoleh izin penghapusan BMN dari Kementerian Keuangan dan PT. ASP akan berusaha mendesain ulang objek perjanjian. Pada tanggal 27 Mei 2011 dilaksanakan rapat koordinasi antara PPKGBK dengan PT. ASP dengan kesepakatan bahwa para pihak berusaha mencari jalan keluar atas permasalahan yang dialami dalam melaksanakan perjanjian-perjanjian kerjasama. Direktur Utama PT ASP menegur Direktur Utama PPKGBK melalui surat Nomor 005/ASP/Dir/V/11 tanggal 31 Mei 2011, bahwa PPKGBK untuk segera mengupayakan dan memperoleh izin penghapusan dimaksud. Selanjutnya PT ASP menegaskan bahwa apabila PPKGBK tetap lalai dan tidak mengindahkan peringatan dan/atau teguran tersebut, PT ASP berhak menuntut kerugian berupa biaya dan bunga yang layak berlaku menurut norma hukum. PPKGBK akan melakukan renegotiasi dengan mentaati peraturan-peraturan yang berlaku dan rekomendasi BPK. Diatas lahan tersebut dilakukan kerjasama sewa lahan 3 (tiga) pihak antara PPKGBK, WIKA dan PT. ASP, berdasarkan perjanjian Nomor 44/PPKGBK/Dirut/07/2019 tanggal 05 Juli 2019.

Sehubungan dengan rencana pembangunan Multifunction Hall untuk mendukung penyelenggaraan Piala Dunia Bola Basket FIBA 2023 di Blok 10, bahwa sebagian lahan pada Blok 10 telah di kerjasamakan dengan PT. Archipelago Sapta Pesona (PT.ASP) sejak tahun 2007 sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Bangun Guna Serah Blok 10 Kawasan Gelanggang Olahraga Bung Karno tanggal 2 Mei tahun 2007, terkait dengan rencana pembangunan tersebut telah di tanda tangani Naskah Kesepakatan antara PPKGBK dan PT.ASP pada tanggal 3 Mei 2021 Nomor: NK 04/PPKGBK/Dirut/05/2021 Nomor 01/NK/Dir.ASP/V/2021 sepakat setelah Pelaksanaan Pembangunan PT.ASP akan mendayagunakan Multifunction Hall Venue FIBA World Cup 2023 dengan jangka waktu KSO selama 15 (lima belas) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi atau maksimal selama 30 (tiga puluh) tahun apabila mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia.

## **2. Gedung Menara Olahraga Senayan (MOS)**

Gedung MOS merupakan kompensasi awal kepada BPGBK atas hak pengusahaan tanah yang diberikan kepada PT Aneka Bina Lestari (PT ABL). Berdasarkan perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Menara Olahraga Senayan antara Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Bung Karno dan PT Aneka Bina Lestari pada tanggal 23 Agustus 2002, Pasal 3 ayat 2 bahwa setelah gedung tersebut diserahterimakan kepada BPGBK maka BPGBK akan menyerahkan penggunaannya kepada KONI Pusat dengan perjanjian yang akan dibuat tersendiri. Berita Acara Serah Terima Bangunan MOS dari PT Aneka Bina Lestari (PT.ABL) dengan BPGBK telah ditandatangani pada tanggal 30 Maret 2009 yang terdiri 8 lantai (lantai 11 sd. Lantai 19), seluas 7.103 m2 dan senilai Rp38.347.123.253,00, namun sampai saat ini KONI masih menempati ruangan Gedung Direksi PPKGBK lantai 8 s.d 12 dan Bangunan MOS. Ketua Umum KONI menyampaikan surat kepada Direktur Utama PPKGBK Nomor 477/UMM/IV/12 tanggal 10 April 2012 perihal konfirmasi untuk penggunaan ruang kantor pada lantai 8 s.d 12 Gedung Direksi PPKGBK dan akan menyerahkan Gedung MOS kepada PPKGBK. Pada tanggal 1 November 2012, Direktur Utama PPKGBK dan Ketua Umum KONI Pusat telah menandatangani Naskah Kesepakatan atas Pemanfaatan Ruang Kantor KONI Pusat pada Gedung Direksi PPKGBK lantai 8 sd 12 dengan jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang sampai dengan adanya bentuk perjanjian atas penggunaan lantai 8 sd 12 Gedung Direksi PPKGBK yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan KONI Pusat tidak akan menggunakan gedung MOS lantai 11, 12, 14 sd 19 serta menyerahkan penggunaan gedung MOS kepada PPKGBK sesuai dengan otoritas PPKGBK.

## **3. PT Selaras Nusa Perkasa (PT. SNP)**

Menindaklanjuti Putusan MA Nomor 1429K/Pdt/2010 tanggal 26 Januari 2011, PT SNP dan PPKGBK sepakat untuk melanjutkan Perjanjian Kerjasama yang diawali dengan melakukan renegotiasi amandemen perjanjian. Dalam rapat yang diselenggarakan di PPKGBK pada tanggal 5 September 2012, PT SNP diharapkan segera menyampaikan akte pendirian berikut perubahannya, *proposal action*, disain bangunan dan *time schedule* pembangunan. Pada tanggal 17 Oktober 2012 PT SNP telah memenuhi panggilan Panitia Kerja Monitoring Pengelolaan Aset Negara Komisi II DPR RI, dalam rapat tersebut PT SNP bersedia untuk melakukan renegotiasi. Sampai

dengan penyusunan laporan BMN TA 2016 ini, PT SNP belum menyampaikan dokumen-dokumen tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2015 telah ditandatangani Naskah Kesepakatan antara PPKGBK dengan PT SNP yang isinya para pihak akan melaksanakan Putusan MA Nomor 1429K/Pdt/2010 tanggal 26 Januari 2011 dan akan melaksanakan kembali Perjanjian Kerjasama dengan terlebih dahulu membuat Amandemen Perjanjian.

Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2015 juga ditandatangani Berita Acara Pelaksanaan Putusan MA Nomor 1429K/Pdt/2010 tanggal 26 Januari 2011, yang intinya Para Pihak sepakat untuk melaksanakan Putusan ini secara sukarela dan PT SNP membebaskan PPKGBK dari kewajiban untuk membayar ganti kerugian sebesar SGD37,347.00. kepada PT SNP. PPKGBK dan PT. SNP telah mengadakan pertemuan tanggal 04 Oktober 2018 pembahasan tindak lanjut kerjasama. PPKGBK dan PT. SNP telah mengadakan pertemuan tanggal 01 September 2021 pembahasan tindak lanjut kerjasama. Dalam surat terakhir PPKGBK kepada PT. SNP nomor B-141/PPKGBK/Dirut/12/2021 tertanggal 2 Desember 2021, PPKGBK kembali mengundang PT. SNP untuk pembahasan lebih lanjut terkait Perjanjian Kerjasama.

#### **4. Tanah Hidayat Latief Sesuai dengan HPL No 2/Grogol Selatan di Jalan Simprug Golf**

Tanah HPL No 2/Grogol Selatan milik PPKGBK yang disewa oleh PT SKIG digunakan untuk lapangan golf, dimana lokasi tanah tersebut berada di wilayah Simprug Grogol Selatan dan berbatasan dengan tanah Sdr. HL dan Sdr. AA yang memiliki sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB). Berdasarkan hasil pemeriksaan dengan berpatokan dari Jalan Simprug Golf 1 diketahui lokasi tanah Sdr. HL berada tepat di tepi Jalan Simprug Golf 1 dan tanah Sdr. AA tepat berada dibelakang tanah Sdr. HL.

Hasil pengamatan fisik di lapangan diketahui Tanah HPL No 2/Grogol Selatan PPKGBK yang dahulu berada di belakang tanah Sdr. HL masih ditempati oleh masyarakat tanpa ijin dari pihak PPKGBK dimana terdapat lima rumah semi permanen yang luasnya berbeda-beda yang dibangun di atas tanah HPL No 2 tersebut. Berdasarkan keterangan dari Divisi Akuntansi dan Aset, diketahui bahwa orang yang tinggal di atas tanah HPL No 2 diantaranya adalah mantan penjaga gudang milik Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan) karena dahulu di atas tanah

tersebut digunakan sebagai gudang milik Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Masyarakat dan Sdr. AA menggunakan tanah bekas Sdr. HL yang telah dilepaskan kepada PPKGBK sebagai jalan akses keluar masuk ke Jalan Simprug Golf 1. Sdr. AA juga terpaksa membuat pintu masuk darurat supaya bisa masuk ke area tanahnya. Sesuai ketentuan, tanah juga bersifat sebagai fungsi social sehingga pemilik tanah yang ada di depannya wajib memberikan akses jalan keluar masuk dari jalan ke tanah yang bersangkutan.

Direktur Keuangan PPKGBK telah mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Pusat Perihal Permohonan Pemasukan Sertipikat HGB NO.265/Grogol Selatan ke dalam HPL No.2/Grogol Selatan pada tanggal 19 Nopember 2020.

PPKGBK telah melakukan koordinasi dengan BPN Jakarta Selatan terkait pemberian sertifikat Hak Pakai atas tanah seluas 1.665 m2. Pada tanggal 29 Agustus 2023 telah dilakukan pengukuran ulang atas tanah tersebut oleh BPN Jakarta Selatan.

PPKGBK akan membuat surat pernyataan terkait tanah Abdul Aziz (Sdr.AA) dalam hal pembuatan akses jalan tanah Abdul Aziz (warga).

PPKGBK sedang melakukan proses balik nama dari HGB perorangan menjadi hak pakai Kementerian Sekretariat Negara dengan pendaftaran sertifikat hak pakai Kementerian Sekretariat Negara qq PPKGBK ke BPN Jakarta Selatan dengan Nomor Pengajuan Sertifikat 88135/2023.

## 5. Tanah yang Digunakan oleh Pihak Lain atas Nama Perorangan

No	Atas Nama	Luas (m <sup>2</sup> )	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Rumah tinggal Yayasan Dq/Sr.Myr	513	8.338.302.000,00	Sertipikat HGB No.46/Gelora Tahun 1975, lamanya hak berakhir pada 23 September 1980
2	Bengkel Otomotif/ Sdr. ARS	500	9.160.000.000,00	Sertipikat HGB No.45/Gelora Tahun 1976, lamanya hak berakhir pada 23 September 1980
3	Toko Yayasan DQ/Sdr. RS	106	1.941.920.000,00	Sertipikat HGB No.41/Gelora Tahun 1975, lamanya hak berakhir pada 23 September 1980. Perpanjangan HGB dengan Sertipikat HGB No.412/Gelora Tahun 2001 dan berakhir pada 21 November 2031
<b>Jumlah</b>		<b>1.119</b>	<b>19.440.222.000,00</b>	

## P. Program Prioritas Nasional untuk Kerja Sama Negara Selatan-Selatan

Pada DIPA Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara tersedia alokasi anggaran untuk Program Prioritas Nasional untuk kerja sama negara selatan-selatan sebesar Rp4.765.047.000,00 dengan realisasi sebesar Rp750.105.691,00 atau 15,74%.

Program kegiatan dalam kerangka KTSS merupakan salah satu bentuk perwujudan amanat konstitusi pembukaan UUD 1945 dan komitmen Pemerintah Indonesia dalam Buenos Aires Plan of Action (BAPA) tahun 1978. Indonesia telah melaksanakan program pelatihan tersebut sejak tahun 1980-an baik dengan skema pendanaan APBN murni maupun Triangular Cooperation. Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara sebagai salah satu anggota Tim Kornas KSS, bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga dan mitra pembangunan menangani penyelenggaraan program kegiatan KTSS bagi negara berkembang lainnya.

Beberapa mitra pembangunan yang tercatat pernah menjadi mitra Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara dalam skema kerja sama Triangular antara lain *United Nations Population Fund (UNFPA)*, *United Nations Development Programme (UNDP)*, *United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)*, *ASEAN Secretariat*, *Japan International Cooperation Agency (JICA)*, *Korean International Cooperation Agency (KOICA)*, *International Atomic Energy Agency (IAEA)*, *Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ)* dan *The Colombo Plan*. Pemerintah Indonesia melalui Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara menyediakan dana pendukung pelaksanaan program (*counterpart budget*) dengan komposisi pembiayaan pemerintah yang diharapkan semakin meningkat tiap tahunnya seiring dengan meningkatnya perekonomian Indonesia dan turut sertanya Indonesia sebagai anggota G-20. Peningkatan komposisi pembiayaan pemerintah ini sejalan dengan Jakarta *Commitment* yang ditandatangani Indonesia pada tahun 2009. Selain itu, peningkatan Kerja Sama Selatan-Selatan juga masih menjadi salah satu isu utama yang telah disebutkan dalam rencana RPJMN selanjutnya (2020-2024).

Pengalaman dalam mengelola bantuan dalam kerangka kerja sama teknik juga telah memberikan kontribusi positif, khususnya bagi Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, untuk merancang program yang bermanfaat bagi negara berkembang lainnya. Berdasarkan hal tersebut, kiranya di masa yang akan datang diharapkan agar porsi peran Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri dalam Program Kerja Sama Teknik Selatan-Selatan dan Triangular dapat lebih ditingkatkan. Hal ini tercantum dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, pada Lampiran 3, Kementerian Sekretariat Negara diberikan mandat untuk melaksanakan sejumlah kegiatan peningkatan kapasitas.

Pelatihan dalam rangka kerja sama teknik selatan-selatan yang dikoordinasikan Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara merupakan salah satu wujud dari komitmen Kementerian Sekretariat Negara, sebagai salah satu anggota Tim Kornas KSS dalam rangka pengembangan KSST Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan komitmen Pemerintah RI di dunia internasional mengingat Indonesia telah dipandang sebagai new emerging country dan dinilai mempunyai best practices yang dapat dibagi kepada negara berkembang lainnya. Selain itu, KSST Indonesia pada masa mendatang diharapkan dapat menjadi salah satu wacana bagi pengembangan kerja sama ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Berikut adalah daftar program Kerja Sama Teknik Selatan-Selatan dan Triangular tahun 2023.

#### **DAFTAR PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DALAM KERANGKA KSST TAHUN 2023**

NO	NAMA KEGIATAN	MITRA	KL	TANGGAL PELAKSANAAN	LOKASI	JUMLAH PESERTA	NEGARA ASAL PESERTA
1	Second Exchange SSTC TVET on Leather Tanning	GIZ	Kementerian Perindustrian, Kemlu	20 Februari - 3 Maret 2023	Yogyakarta	12	Indonesia dan Tanzania
2	Regional Training Course on RTC Detection and Characterization of Brucellosis in Animals	IAEA	BRIN	11 - 17 Juni 2023	Bogor	24	Indonesia, Cina, Thailand, Pakistan, Palestina, Sri Lanka, Kamboja, Oman, Vietnam, Iran, Myanmar, Kuwait, Uni
3	Interregional Workshop on Enhanced Management of NORM Activities Particularly NORM Residues	IAEA	BRIN	19 - 23 Juni 2023	Yogyakarta	23	Algeria, Argentina, Brazil, Filipina, Irak, Iran, Libya, Madagaskar, Malaysia, Mesir, Namibia, Nigeria, Pakistan, Rusia, Saudi Arabia, Thailand, Tunisia, Vietnam, Yordania,
4	Knowledge Sharing Program on Enhancing The Development of Small and Medium Industry 2023	Colombo Plan	Kementerian Perindustrian	2-10 Juli 2023	Semarang	17	Indonesia, Bangladesh, Iran, Laos, Maladewa, Myanmar, Nepal,
5	Blended Training of Trainers on Climate Field School for Colombo Plan Member Countries	Colombo Plan	BMKG	4-18 Juli 2023	Jakarta, Citeko	18	Indonesia, Bangladesh, Bhutan, Papua Nugini, Myanmar, Nepal, Sri Lanka,
6	SSTC Offline Training on Strategic Partnership between Muslim Religious Leaders (MRLS) in Reproductive Health, Family	UNFPA	BKKBN	23-29 Juli 2023	Surabaya	14	Burundi, Ethiopia, Nepal, Myanmar dan Malaysia.
7	RTC on Mutation by Speed Breeding (MBYS) for Abiotic Stress Tolerance	IAEA	BRIN	7-18 Agustus 2023	Jakarta	23	Bangladesh, Tiongkok, Fiji, Indonesia, Laos, Myanmar, Malaysia, Mongolia, Sri Lanka, Malaysia, Pakistan, Thailand dan Vietnam.
8	Knowledge Sharing Program "Empowering Families in Continuum of Care for Maternal, Newborn and Child Health through Collaboration across Sectors using MCH Handbook"	JICA	Kementerian Kesehatan	10-15 September 2023	Sumatera Barat	26	Kamboja, Kenya, Laos, Madagaskar, Papua Nugini, Tajikistan, Timor Leste, Vietnam dan Indonesia
10	Training on Records and Archives Digitalization for South-South	KOICA	ANRI	15 s.d. 28 Oktober 2023	Yogyakarta	15	Fiji, Filipina, Kamboja, Laos, Papua Nugini, dan Timor Leste
11	Knowledge Sharing on Addressing Socioeconomic Dimensions and Devolution of Family Planning for Bangsamoro Autonomous Region in	UNFPA	BKKBN	26 November s.d. 2 Desember 2023	Yogyakarta	14	Filipina
12	KNOWLEDGE SHARING ON FAMILY PLANNING PROGRAM IN INDONESIA WITH FOCUS ON	UNFPA	BKKBN	5 s.d. 9 November 2023	Jakarta	17	India
13	Knowledge Sharing Program on Library Transformation Program on Social Inclusion	Colombo Plan	Perpusnas	12 s.d.18 November 2023	Jakarta	18	Laos, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, dan Vietnam
14	FIRST EXCHANGE OF SOUTH-SOUTH TRIANGULAR COOPERATION ON DECENTRALIZED RENEWABLE ENERGY (SSTC DRE) MADAGASCAR	GIZ	Kementerian ESDM	26 November - 2 Desember 2023	Bandung	14	Madagaskar
<b>Total</b>						<b>235</b>	

---oooOooo---